



2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO



LPPD

TAHUN 2023



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 dapat terselesaikan dengan baik untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur. Hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk melaksanakan koreksi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya suatu pemerintahan daerah. Di samping itu, laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD bertujuan untuk meningkatkan citra pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai sarana laporan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka laporan ini minimal menyajikan 2 (tiga) substansi pokok capaian kinerja yang disajikan, antara lain :

1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari :
 - a. capaian kinerja makro;
 - b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome (hasil) dan Output (Keluaran);
 - c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan.

Sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka struktur, ruang lingkup dan substansi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan secara teknis penyusunannya berpedoman pada Surat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Desember



2023 Nomor : 100.2.2.7/8697/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif membangun Kabupaten Sidoarjo di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi mewujudkan Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Sejahtera, Mandiri dan Berlanjutan. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 mempunyai banyak manfaat serta dapat dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

I.1.	Penjelasan Umum	1
	A Dasar Hukum	1
	B Data Geografis Wilayah	2
	C Jumlah Penduduk	6
	D Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	9
	E Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan	10
	F Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021	23
I.2.	Perencanaan Pembangunan Daerah	52
	A Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	52
	B Visi dan Misi Kepala Daerah	55
	C Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	64
	D Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	65
I.3.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	66
	1 Dasar Pertimbangan Penerapan SPM (LatarBelakang)	66
	2 Dasar Penerapan SPM	68
	3 Kebijakan Umum	69
	4 Kebijakan Penerapan SPM.	71
	A. Bidang Urusan Pendidikan	71
	B. Bidang Urusan Kesehatan	72
	C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	74
	D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	75
	E. Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	76
	F. Bidang Urusan Sosial	77

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 80

II.1	Kinerja Makro	80
II.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	87
II.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	87
	1 Urusan Pendidikan	87
	2 Urusan Kesehatan	99
	3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106
	4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	116
	5 Urusan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan	122



	Masyarakat	
6	Urusan Sosial	129
7	Urusan Tenaga kerja	133
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	143
9	Urusan Pangan	153
10	Urusan Pertanahan	155
11	Urusan Lingkungan Hidup	157
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	162
13	Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	163
14	Urusan Perhubungan	165
15	Urusan Komunikasi dan Informatika	167
16	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	173
17	Urusan Penanaman Modal	179
18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	183
19	Urusan Statistik	184
20	Urusan Persandian	185
21	Urusan Kebudayaan	187
22	Urusan Perpustakaan	192
23	Urusan Kearsipan	193
24	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	196
25	Urusan Kelautan & Perikanan	197
26	Urusan Pariwisata	198
27	Urusan Pertanian	199
28	Urusan Kehutanan	200
29	Urusan Energi dan Sumber daya mineral	200
30	Urusan Perdagangan	201
31	Urusan Perindustrian	203
32	Urusan Transmigrasi	204
II.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	204
1	Urusan Pendidikan	204
2	Urusan Kesehatan	205
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	206
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	207
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	208
6	Urusan Sosial	209
7	Urusan Tenaga kerja	210
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	210
9	Urusan Pangan	211
10	Urusan Pertanahan	211
11	Urusan Lingkungan Hidup	211



	12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	212
	13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	212
	14	Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	213
	15	Urusan Perhubungan	213
	16	Urusan Komunikasi dan Informatika	213
	17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	214
	18	Urusan Penanaman Modal	214
	19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	214
	20	Urusan Statistik	215
	21	Urusan Persandian	215
	22	Urusan Kebudayaan	215
	23	Urusan Perpustakaan	215
	24	Urusan Kearsipan	216
	25	Urusan Kelautan dan Perikanan	216
	26	Urusan Pariwisata	216
	27	Urusan Pertanian	217
	28	Urusan Kehutanan	217
	29	Urusan Energi dan Sumber daya mineral	217
	30	Urusan Perdagangan	217
	31	Urusan Perindustrian	218
	32	Urusan Transmigrasi	219
II.2.3		Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	219
	1	Urusan Pemerintahan(Perencanaan & Keuangan)	219
	2	Urusan Pemerintahan(Pengadaan)	220
	3	Urusan Pemerintahan(Kepegawaian)	221
	4	Urusan Pemerintahan(Manajemen Keuangan)	221
	5	Urusan Pemerintahan(Transparansi & Partisipasi Publik)	222
II.3		Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	223
	1	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	223
	2	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	223
	3	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	229
	4	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja Yang Telah Dicapai)	233
	5	Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	256



BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	267
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	268
A. Bidang Urusan Pendidikan	268
B. Bidang Urusan Kesehatan	275
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	283
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	287
E. Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	291
F. Bidang Urusan Sosial	300
BAB V PENUTUP	305



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 disusun berdasarkan pada peraturan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Desember 2023 Nomor : 100.2.2.7/8697/OTDA perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2023 tentang perubahan rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
17. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

B. Data Geografis Wilayah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sidoarjo, secara astronomis terletak di antara 7,3°– 7,5° LS (Lintang Selatan) dan antara 112,5°– 112,9°BT (Bujur Timur). Sementara secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, dan Kabupaten Mojokerto di sebelah barat.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 719,34 km² ini terbagi menjadi 18 Kecamatan, 318 Desa, dan 28 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,53 persen terhadap luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Diikuti oleh Kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,01 persen terhadap luas wilayah kabupaten.

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota “Delta”, dikarenakan wilayahnya yang berada di antara dua sungai besar pecahan Kali Brantas, yakni Kali Surabaya disebelah utara dan Kali Porong disebelah selatan.



Peta Kecamatan di KabupatenSidoarjo



Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

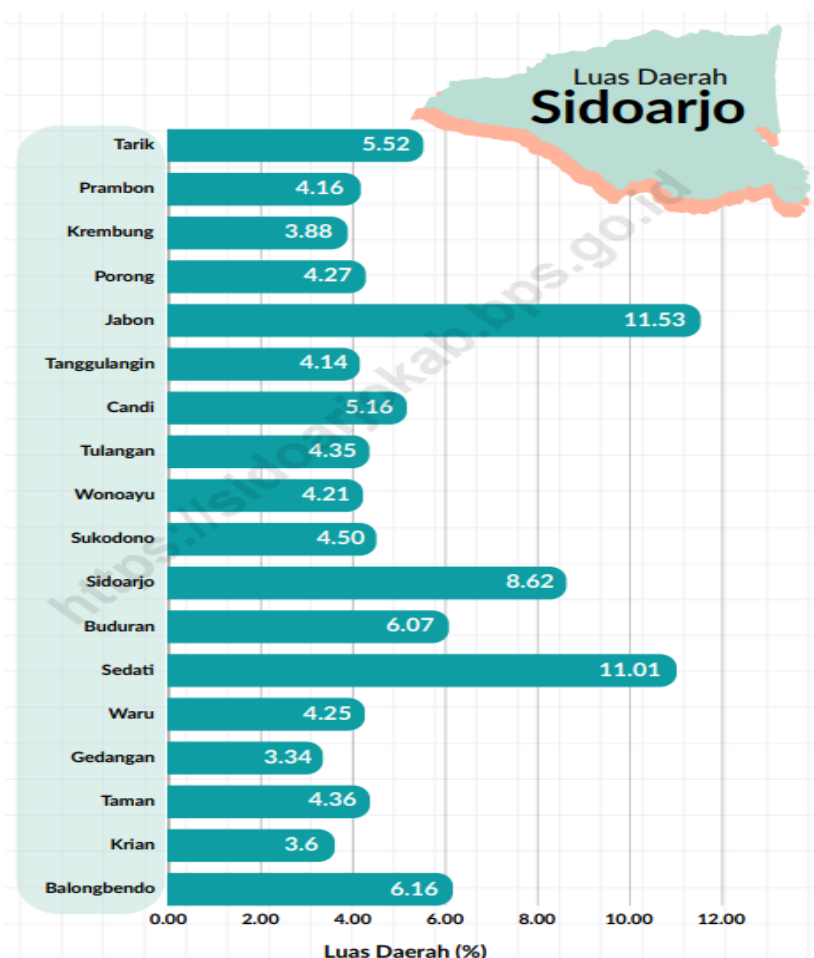
Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)
1	Tarik	36,06
2	Prambon	34,22
3	Krembung	29,55
4	Porong	29,82
5	Jabon	81,00
6	Tanggulangin	32,29
7	Candi	40,67
8	Tulangan	31,21
9	Wonoayu	33,92
10	Sukodono	32,68
11	Sidoarjo	62,56
12	Buduran	41,03
13	Sedati	79,43
14	Waru	30,32
15	Gedangan	24,06
16	Taman	31,54
17	Krian	32,50
18	Balongbendo	31,40
Jumlah		714,24

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024



Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2023



Sumber :Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada pada ketinggian 0-25 mdpl dan terbagi atas tiga kelas, yaitu:

- 0-3 meter, merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin/payau, berada di sebelah timur.
- 3-10 meter, merupakan daerah bagian tengah yang berair tawar.
- 10-25 meter, terletak di daerah bagian barat.

Sepanjang tahun 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu tertinggi di Kabupaten Sidoarjo mencapai 36,8oC, terjadi di bulan November dengan kelembaban rata rata 73,3%. Sementara suhu terendah terjadi di bulan September, sebesar 20,6oC dengan kelembaban rata-rata sebesar 71,3 persen.

Sementara itu, BMKG juga mencatat selama Januari-Desember 2023 jumlah hari hujan di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 130 hari hujan dengan jumlah terbanyak pada bulan Januari dan Februari masing-masing 27 hari hujan.



Curah hujan dan jumlah hari hujan sepanjang 2023 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Curah hujan tertinggi terjadi di Bulan Februari, sebesar 539,3 mm dengan hari hujan sebanyak 28 hari. Curah hujan turun secara signifikan di bulan Mei menjadi 84,7 mm dengan 7 hari hujan, namun kembali meningkat di bulan Desember, sebesar 215,0 mm dengan hari hujan sebanyak 13 hari.

Suhu dan Kelembapan per Bulan di Tahun 2023

Bulan	Suhu (°C)			Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	23,6	27,7	34,6	49,00	83,2	98,0
Februari	20,8	26,9	34,0	51,0	85,4	100,0
Maret	23,6	27,9	34,4	45,0	83,4	98,0
April	23,6	28,1	33,8	57,0	83,8	100,0
Mei	22,9	28,4	35,2	52,0	78,6	100,0
Juni	23,6	28,4	34,0	53,0	77,9	97,0
Juli	20,9	27,6	34,2	45,0	75,8	100,0
Agustus	21,2	27,6	34,7	50,0	74,3	95,0
September	20,6	28,0	34,6	43,0	71,3	100,0
Oktober	22,8	29,8	36,0	38,0	70,7	95,0
Nopember	22,0	30,4	36,8	42,0	73,3	97,0
Desember	24,4	29,5	35,6	50,0	79,0	98,0

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Kecepatan Angin dan Tekanan Udara per Bulan di Tahun 2023

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)		Tekanan Udara (mb)
	Rata-Rata	Maksimum	Rata-Rata
Januari	4,8	30,0	1.007,8
Februari	5,6	30,0	1.007,9
Maret	3,1	14,0	1.009,3
April	3,3	14,0	1.008,3
Mei	4,1	12,0	1.010,3
Juni	4,5	15,0	1.010,2
Juli	4,8	15,0	1.011,1
Agustus	5,7	15,0	1.012,0
September	5,6	15,0	1.011,1
Oktober	5,4	24,0	1.011,1
Nopember	3,4	15,0	1.009,1
Desember	3,1	15,0	1.009,1

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari
per Bulan di Tahun 2023

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (day)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	317,6	27,0	6,5

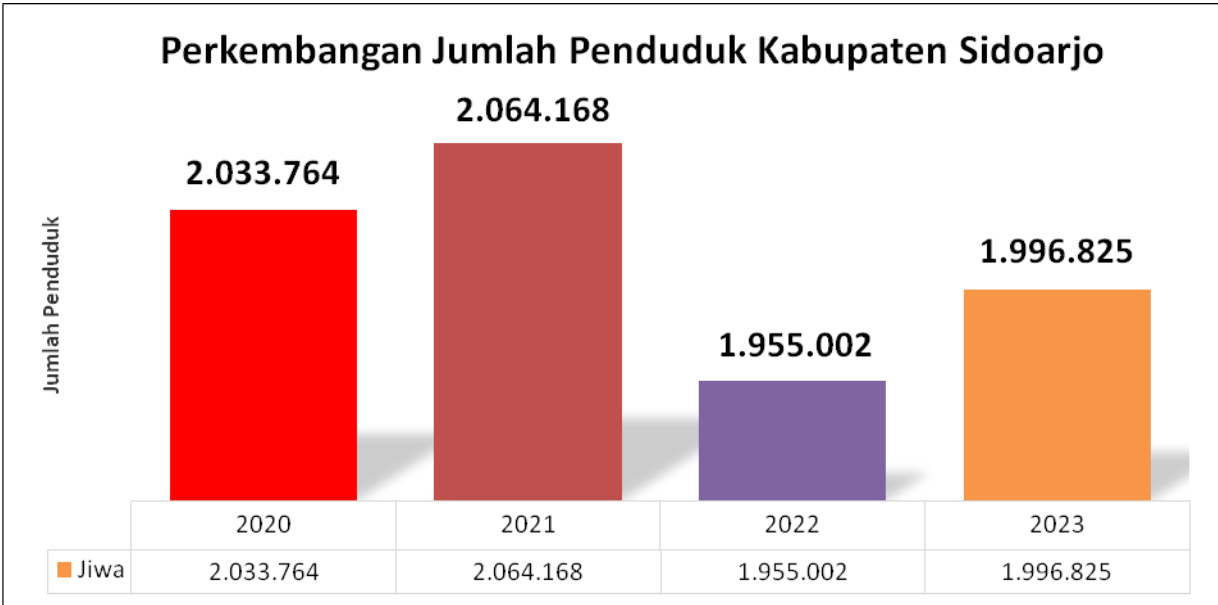


Februari	539,3	27,0	4,9
Maret	199,5	22,0	4,8
April	373,4	22,0	3,5
Mei	84,7	7,0	5,2
Juni	5,3	2,0	5,2
Juli	0,4	1,0	7,4
Agustus	--	--	8,2
September	--	--	8,1
Oktober	--	--	9,2
Nopember	13,8	6,0	9,1
Desember	222,5	16,0	9,3

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

C. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, berdasarkan laporan perkembangan penduduk di tahun 2023, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.996.825 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :



Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia Tahun 2023 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023

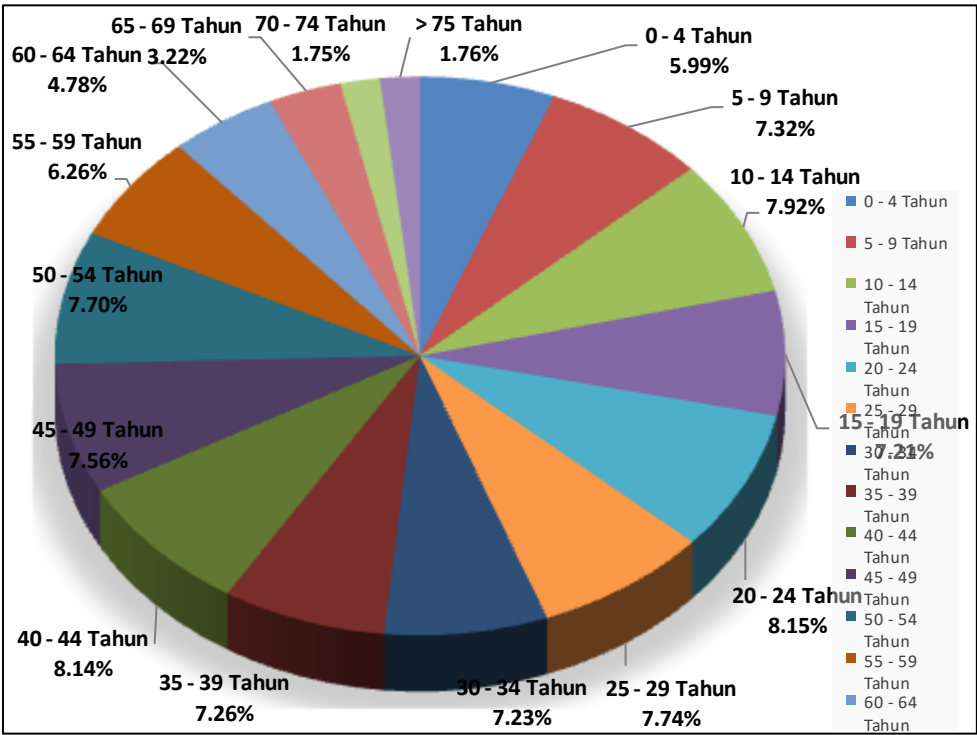
STRUKTUR USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
75 <	14.647	20.475	35.122



70 -74	17.232	17.792	35.024
65 -69	32.572	31.703	64.275
60 - 64	45.908	49.455	95.363
55 -59	60.405	64.519	124.924
50 -54	74.472	79.301	153.773
45 -49	72.806	78.136	150.942
40 -44	80.079	82.475	162.554
35 -39	73.154	71.794	144.948
30 -34	73.381	71.087	144.468
25 -29	78.666	75.926	154.592
20 -24	83.427	79.342	162.769
15 -19	74.180	69.818	143.998
10 – 148	81.512	76.637	158.149
05 - 09	75.542	70.698	146.240
00 - 04	62.084	57.600	119.684
JUMLAH	1.000.067	996.758	1.996.825

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2023



Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri



Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Sedangkan apabila dijabarkan berdasarkan Kecamatan, maka Kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak, dan yang terkecil adalah Kecamatan Jabon.

Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan / Desa / Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	TARIK	34.009	33.449	67.458
2	PRAMBON	39.650	38.810	78.460
3	KREMBUNG	34.209	34.193	68.402
4	PORONG	35.282	34.888	70.170
5	JABON	27.701	27.452	55.153
6	TANGGULANGIN	43.601	43.560	87.161
7	CANDI	76.901	77.021	153.922
8	SIDOARJO	98.027	99.729	197.756
9	TULANGAN	50.737	50.440	101.177
10	WONOAYU	42.245	41.519	83.764
11	KRIAN	65.942	64.470	130.412
12	BALONGBENDO	37.461	36.472	73.933
13	TAMAN	100.366	100.039	200.405
14	SUKODONO	61.383	60.571	121.954
15	BUDURAN	49.530	49.469	98.999
16	GEDANGAN	59.289	59.049	118.338
17	SEDATI	47.751	47.526	95.277
18	WARU	95.983	98.101	194.084
JUMLAH		1.000.067	996.758	1.996.825

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri



D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 318 Desa dan 28 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urbanarea*). Pada Tahun 2023 dilakukan penggabungan untuk Desa dan Kelurahan yang terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo, dan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa Dalam Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo, sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Gedang digabung menjadi Kelurahan Gedang;
- 2) Kelurahan Mindi dan Kelurahan Porong digabung menjadi Kelurahan Porong.
- 3) Desa Renokenongo digabung dengan Desa Glagaharum menjadi Desa Glagaharum Kecamatan Porong
- 4) Desa Besuki digabung dengan Desa Dukuhsari menjadi Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon
- 5) Desa Pejarakan digabung dengan Desa Kedungcangkring menjadi Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon
- 6) Desa Kedungbendo digabung dengan Desa Ketapang menjadi Desa Ketapang KecamatanTanggulangi

Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	12	3
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangi	18	-
8.	Jabon	13	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-



18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	318	28

Sumber Data : KabupatenSidoarjo Dalam Angka 2024

Grafik I.6

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Salah satu instrument penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkunganPemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 13.934 orang yang terdiri dari, sebagai berikut :

No.	Perangkat Daerah	Struktural	Fungsional Umum	Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai
1	Sekretariat Daerah	17	91	86	194
2	Sekretariat DPRD	5	42	9	56
3	Inspektorat	7	18	54	79
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17	389	7.700	8.106
5	Dinas Kesehatan	28	188	1.634	1.850
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	8	66	14	88
7	Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	8	30	10	48
8	Satuan Polisi Pamong Praja	7	21	59	87



9	Dinas Sosial	6	15	14	35
10	Dinas Tenaga Kerja	6	10	17	33
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	12	8	25
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	7	10	7	24
13	Dinas Pangan dan Pertanian	10	49	109	168
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7	227	15	249
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	26	20	51
16	Dinas Perhubungan	14	59	18	91
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	40	14	61
18	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5	24	3	32
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	15	10	30
20	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5	42	6	53
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	15	14	35
22	Dinas Perikanan	4	25	5	34
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6	130	18	154
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7	24	17	48
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	53	9	68
26	Badan Pelayanan Pajak Daerah	6	74	11	91
27	Badan Kepegawaian Daerah	7	34	20	61
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	2	21
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	52	32	90
30	Rumah Sakit Umum Daerah	25	109	1.036	1.170
31	Kecamatan Sidoarjo	38	41	2	81
32	Kecamatan Candi	5	16	1	22



33	Kecamatan Buduran	7	12	2	21
34	Kecamatan Gedangan	8	13	1	22
35	Kecamatan Sedati	7	14	1	22
36	Kecamatan Waru	4	16	2	22
37	Kecamatan Taman	22	29	2	53
38	Kecamatan Sukodono	7	11	2	20
39	Kecamatan Wonoayu	6	15	1	22
40	Kecamatan Krian	10	18	0	28
41	Kecamatan Balongbendo	4	18	1	23
42	Kecamatan Tarik	6	18	1	25
43	Kecamatan Tulangan	8	16	1	25
44	Kecamatan Prambon	10	18	1	29
45	Kecamatan Krembung	7	16	1	24
46	KecamatanTanggulangin	8	16	1	25
47	Kecamatan Jabon	5	11	1	17
48	Kecamatan Porong	12	20	1	33
49	Rumah Sakit Umum Sidoarjo Barat	13	22	251	286
50	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	2	0	0	2
	TOTAL	447	2.243	11.244	13.934

Sumber Data : Aplikasi Sistem Informasi ManajemenKepegawaian (SIMPEG)

F. Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Otonomi daerah yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menuntut semua daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi yang dapat dipergunakan untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Pagu pendapatan dapat didorong melalui penggalan potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah untuk merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat. Secara umum struktur pendapatan daerah setelah otonomi, sumber penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos pendapatan pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan, (3) Dana Alokasi Umum (DAU), (4) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (5) Bagi Hasil Pajak dan Batuan Keuangan dari Propinsi.

Secara umum peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan :

- 1) Intensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Ekstensifikasi pendapatan daerah yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru.
- 3) Optimalisasi penarikan pendapatan pajak dan retribusi dilakukan melalui pemanfaatan information and communication technology (ICT).
- 4) Proyeksi atas perhitungan pendapatan daerah harus berdasarkan pada pemetaan potensi dan kajian akademik.
- 5) Penyelesaian pajak dan retribusi terutang dioptimalkan melalui penagihan secara terus menerus dan disertai kajian mengenai cleansing data.

Sebagai upaya untuk mencapai target pendapatan daerah yang lebih baik maka perlu ditetapkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus



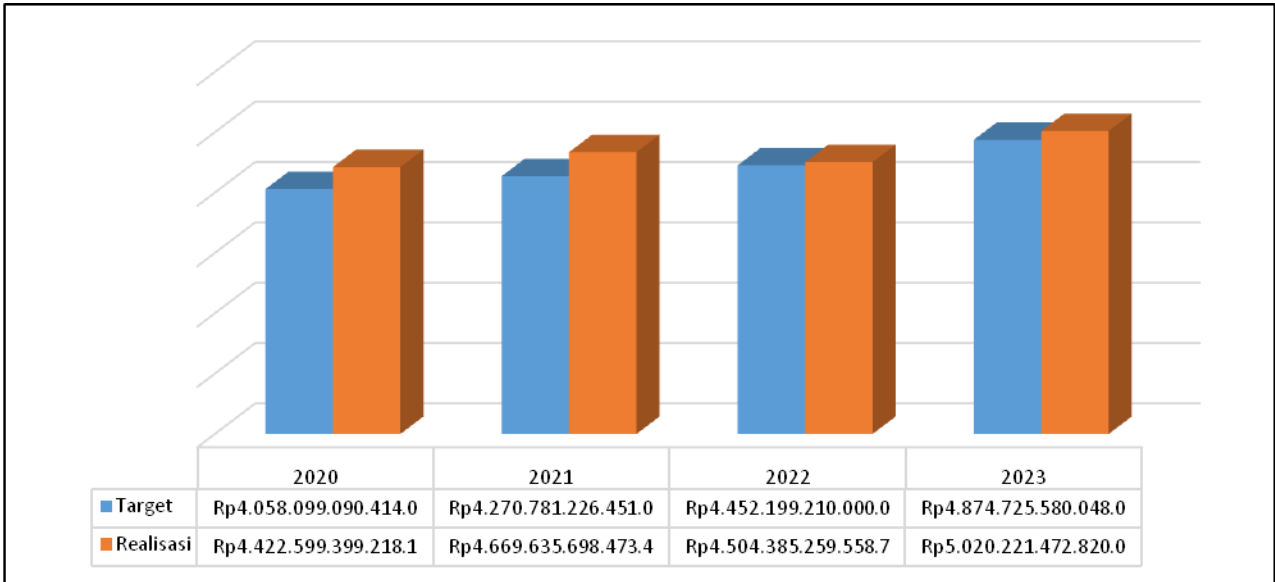
menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Sidoarjo.

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
	(Rp.)	(Rp.)	
2020	Rp. 4.058.099.090.414,00	Rp. 4.422.599.399.218,15	108,98%
2021	Rp. 4.270.781.226.451,00	Rp. 4.669.635.698.473,41	109,34%
2022	Rp. 4.452.199.210.000,00	Rp. 4.504.385.259.558,71	101,17%
2023	Rp. 4.874.725.580.048,00	Rp. 5.020.221.472.820,07	102,98%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2020 s.d 2022 Audited, sedangkan untuk Tahun 2023 Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2020 s.d 2022 Audited, sedangkan untuk Tahun 2023 Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.913.135.627.969,00	2.050.814.700.362,07	107,20
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.957.289.952.079,00	2.366.272.099.637,00	100,29
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	4.300.000.000,00	3.567.282.000,00	82,96
	JUMLAH PENDAPATAN	4.874.725.580.048,00	5.020.221.472.820,07	102.98

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024



Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.5.020.221.472.820,07atau 102,98% dari target / anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.4.874.725.580.048,00.

Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp.2.050.814.700.362,07atau tercapai sebesar 107,20% dari seluruh target PAD sebesar Rp.1.913.135.627.969,00.

Rincian realisasi dan target PAD tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH				
KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1.	Pajak Daerah	1.215.000.000.00000	1.302.626.605.440,26	107,21
1.1.2.	Retribusi Daerah	51.832.726.878,00	52.105.726.006,00	100,53
1.1.3.	Hasil PengelolaanKekayaan Daerah Yang Dipisahkan	39.759.992.614,00	39.759.992.614,50	100,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah	606.542.908.477,00	656.322.376.301,31	108,21
	JUMLAH	1.913.135.627.969,00	2.050.814.700.362,07	107,20

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

Target dan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
	(Rp.)	(Rp.)	
2020	Rp. 5.182.074.462.157,57	Rp. 4.441.673.370.394,65	85,71%
2021	Rp. 5.376.163.555.617,00	Rp. 4.936.099.885.354,76	91,81%
2022	Rp. 5.291.622.947.330,00	Rp. 4.849.419.407.073,06	91,64%
2023	Rp. 5.367.503.579.233,00	Rp. 5.001.778.673.487,58	93,19%

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2020 s.d 2022 Audited, sedangkan untuk Tahun 2023 Unaudited per tanggal 31 Januari 2024



b. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, sebagai upaya meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Pada jenis belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan multi-years dan atau model pembayaran dengan turn-keys, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

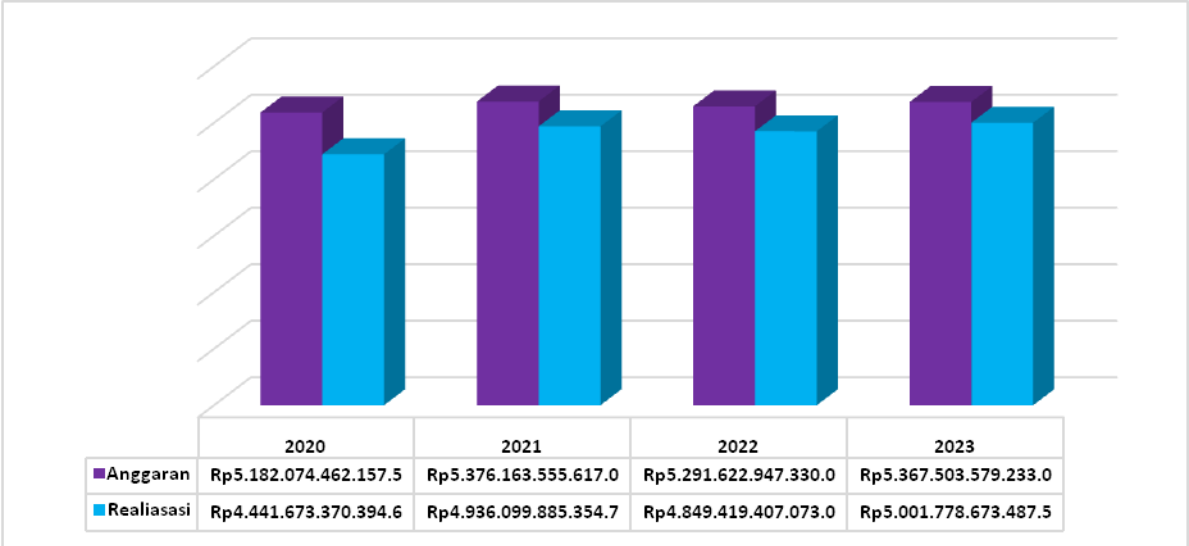
Kebijakan belanja untuk program dan kegiatan diarahkan untuk akselerasi pencapaian misi Kabupaten Sidoarjo sebagaimana berikut:

- 1) Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, antara lain belanja pegawai dan overhead cost di setiap Perangkat Daerah secara proporsional.
- 2) Belanja Daerah difokuskan pada urusan wajib pelayanan dasar dan 17 (tujuh belas) program prioritas yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian visi misi pembangunan kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026,
- 3) Kebijakan selektif dalam pembangunan infrastruktur, yang akan diprioritaskan pada pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.



- 4) Kebijakan matching program lintas Perangkat Daerah maupun dengan pihak swasta.

Perkembangan Belanja Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo, untuk Tahun 2020 s.d 2022 Audited, seangkan untuk Tahun 2022 Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

Target belanja daerah untuk tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.5.367.503.579.233,00, dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.5.001.778.673.487,58atau tercapai sebesar 93,19%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA DAERAH			
2.1.	BELANJA OPERASI	3.725.646.627.268,00	3.507.494.437.666,58	94,14
2.2.	BELANJA MODAL	846.634.465.375,00	715.198.635.441,00	84,48
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.970.200.000,00	9.610.233.290,00	60,18
2.4.	BELANJA TRANSFER	779.252.286.590,00	769.475.367.090,00	98,75
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.367.503.579.233,00	5.001.778.673.487,58	93,19

Sumber Data : Laporan Keuangan Kab. Sidoarjo Unaudited per tanggal 31 Januari 2024

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Jawa Timur. Isu Strategis merupakan acuan yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan RPJMD. Isu Strategis Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
 - a) Mewujudkan good governance melalui pengelolaan pemerintahan yang Tangkas, Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
 - b) Penguatan komitmen ASN, penyederhanaan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis *Information and Communication Technology* (ICT).
 - c) Pengembangan kualitas ASN secara merit system serta berkelanjutan.
 - d) Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 - e) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan investasi.
 - f) Meningkatkan kualitas tatakelola dan kemandirian Desa.
2. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Ekonomi, Pengembangan Investasi, Perluasan Lapangan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan.
 - a) Menciptakan kebijakan perekonomian yang kondusif bagi percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19, utama sektor informal dan usaha mikro,
 - b) Memperluas Lapangan Kerja melalui kemitraan dengan swasta dan penciptaan wirausaha.
 - c) Penguatan Sinergi Pentahelix (pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Lembaga Pendidikan dan media) dalam menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
 - d) Mengembangkan nilai tambah (value added) komoditas unggulan lokal yang halal dan mampu berdaya saing serta berkelanjutan.



- e) Mengembangkan sistem distribusi dan pemasaran produk halal lokal berbasis on line yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan konsumen.
 - f) Mendorong kemudahan investasi baru, berkembangnya ekonomi digital melalui start up bisnis dan industry kreatif.
 - g) Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memberikan support bagi ekonomi masyarakat.
 - h) Pengembangan pariwisata dan penunjang pariwisata perkotaan, yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi tumbuhkembangnya ekonomi lokal dan Usaha Mikro.
 - i) Pengembangan pertanian berbasis teknologi dan penguatan sistim ketahanan pangan daerah.
3. Pemantapan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Berkarakter. Pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development) mendasari isu ini, mengingat investasi pada sumberdaya manusia memiliki dampak positif yang besar dalam jangka Panjang pada seluruh aspek secara berkelanjutan. Berbagai variable yang dapat mengilustrasikan isu ini bagi kabupaten Sidoarjo antara lain;
- a. Mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan Pendidikan yang memiliki daya saing regional dan memiliki kharakter budi pekerti yang baik.
 - b. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta menurunkan angka stunting.
 - c. Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik di seluruh wilayah.
 - d. Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan dan tenaga kesehatan secara merata.
 - e. Pengelolaan potensi dan peningkatan peran pemuda yang mampu berperan dalam semua sektor pembangunan.
 - f. Cakupan layanan jaminan Pendidikan dan Kesehatan, kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara sistem bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.



- g. Prioritas implementasi pencapaian target SDGs pada indikator 1 sampai dengan nomor 9 dan dan nomor 11, yaitu menyangkut, kemiskinan, sanitasi lingkungan dan tata kota.
- h. Meningkatkan kestaraan dan kehidupan yang inklusif bagi disabilitas dan seluruh elemen masyarakat.
- 4. Penataan Kota, Implementasi Sistem Transportasi Terpadu dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
 - a. Penyediaan sarana prasarana umum antara lain; RTH, Tempat Olah Raga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, dan ruang publik lainnya.
 - b. Pengembangan transportasi massal bagi orang dan barang yang dapat mengatasi kemacetan.
 - c. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.
 - d. Pengembangan sistem sanitasi perkotaan dan perdesaan untuk mewujudkan 100% sanitasi,
 - e. Sistem pengelolaan persampahan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang efektif dan efisien serta berkelanjutan.
 - f. Pengembangan eco-energi untuk sarana prasarana publik.
- 5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar, Pengembangan Wilayah Berbasis Keterkaitan antar Daerah yang Mendukung Percepatan Sektor Strategis.
 - a. Pemantapan infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, Industri, perdagangan dan Jasa,
 - b. Optimalisasi kebijakan penataan ruang wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Sidoarjo guna menguatkan konektivitas pembangunan antar wilayah,
 - c. Integrasi pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung pemantapan Sektor Utama yaitu Perdagangan dan Industri,
 - d. Integrasi pengembangan wilayah, dan investasi untuk mendukung percepatan Sektor Strategis, yaitu pariwisata, pertanian modern, perikanan dan jasa.
 - e. Pengembangan jaringan air bersih dan manajemen pengelolaan air yang baik sebagai wujud ketahanan air yang berkelanjutan.
 - f. Percepatan pengembangan jaringan irigasi teknis pendukung sector pertanian dan perikanan.

6. Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat dan Harmoni Sosial yang berbasis Kesetaraan, Keamanan dan Ketentraman.
 - a. Peningkatan kapasitas dan mendorong kesadaran masyarakat untuk tanggap pencegahan dan mitigasi bencana.
 - b. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana penanganan bencana antara lain command center, jaringan pemadam kebakaran, pos tanggap darurat dll.
 - c. Penanganan terhadap dampak bencana geologi lumpur Sidoarjo, antara lain penurunan tanah, banjir dan dampak lain yang ditimbulkan.
 - d. Menumbuhkan budaya inklusif, ramah, perlindungan terhadap kaum disabilitas, antidiskrimasi SARA, gotong-royong, kebebasan politik dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal.
 - e. Mengarusutamakan kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak.
 - f. Membangun sistem keamanan yang efektif, mengedukasi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut.

1. Visi

Sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka terlebih dahulu dilakukan telaah terhadap visi RPJPD yang diemban Kabupaten Sidoarjo dalam jangka waktu 20 tahun yakni Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera dan Madani. Visi jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005-2025 tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari konteks lokal Sidoarjo, yang sangat dinamis, dan mengalami pergeseran-pergeseran pada beberapa sektor, oleh karena itu, penyusunan Visi Jangka Menengah, selain didasarkan pada Visi Jangka Panjang, juga tidak terlepas, atau memiliki irisan dengan konteks masa kini, atau merupakan cerminan dari kondisi masyarakat saat ini.



Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis,dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2005-2025,maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Sidoarjo dimasadepan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masadepan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakatyang demokrastis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunanyang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka cita-cita pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah :

**”TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU,
BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN”**

Agar rumusan Visi di atas dapat diimplementasikan lebih operasional,maka perlu dijabarkan pada pokok-pokok visi berikut penjelasannyasebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel

Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
<i>Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”</i>	<i>Sidoarjo Sejahtera</i>	Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (<i>growth</i>) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (<i>equality</i>). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi



		hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.
	Sidoarjo Maju	Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi “menjemput Perubahan”. Segala sumber daya pemerintahan dan sumber daya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna “terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya”. Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan ditingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.
	Sidoarjo Berkarakter	Unsur penting dari konsep pembangunan <i>People Centered Development</i> atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (<i>value</i>) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.
	Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (<i>sustainable development</i>). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026



Keempat pokok Visi di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam MisiPembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Misi pembangunan akan memperjelas dan mempertegas kemana pembangunan akan diprioritaskan dan diarahkan selama lima tahun mendatang.

2. Misi

Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas,berikut akan disajikan bagaimana keterkaitan antara Visi dengan MisiPembangunan Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun ke depan. Adapun keterkaitan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini :

Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”	Sidoarjo Sejahtera	Misi 2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi,Pertanian, Perikanan, Sektor Jasadan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
	Sidoarjo Maju	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha
	Sidoarjo Berkarakter	Misi 4 : Membangun Sumber DayaManusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan,Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya. Misi 5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.
	Pembangunan Berkelanjutan	Misi 3 : Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Pemetaan sebagaimana dilakukan pada tabel di atas, hanya pendekatan logis untuk memastikan keterkaitan antara Visi dengan Misi. Namun secara substansial keterkaitan tersebut meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Merujuk pada hasil pemetaan Misi berdasarkan pokok-pokok Visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat .

Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi

kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: *Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.*

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis Gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagikelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo

Misi 4: *Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.*

Pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (*humanresources*) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasarlainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.



Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai keagamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertibtentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

3. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan cara untuk mencapainya melalui Tujuan dan Sasaran. Tujuan adalah kinerja jangka menengah / lima tahunan, sedangkan Sasaran adalah kinerja tahunan. Adapun Tujuan dan Sasaran beserta indikator kinerjanya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Misi-1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Indeks Reformasi Birokrasi	Terselenggara nya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital.	Nilai SAKIP Kabupaten
				Opini atas Audit BPK
				Survey Eksternal Persepsi Korupsi
				Status Kinerja LPPD
				Nilai Indeks SPBE
				Indeks Inovasi Daerah
				Tingkat Maturitas SPIP
			Terselenggara nya Pelayanan Publik yang	Indeks Pelayanan Publik (IPP)



			Berkualitas dan Mendukung Kemudahan Berusaha.	
Misi-2 : Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro,koperasi, pertanian dan perikanan.	Pertumbuhan Ekonomi	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan.	Persentase Kontribusi PDRB sektor perdagangan
				Persentase kontribusi PDRB sektor industri
				Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dalam arti luas
				Pesentase pertumbuhan nilai investasi
		Indeks GINI	Berkembangnya Koperasi,Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	Persentase usaha mikro mandiri
				Persentase koperasi berkualitas
				Persentase Desa Mandiri
	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Terserapnya Tenaga Kerja untuk Mengatasi Pengangguran	Persentase tenaga kerja yang terserap di sembilan sektor
		Persentase penduduk miskin	Menurunnya Penduduk miskin	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan
Misi-3 : Membangun Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung	Indeks Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum



Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan	Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Merata	Indeks Infrastruktur Pendidikan
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana.	Indeks Infrastruktur Kesehatan
				Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
				Indeks Kualitas Tutuan Lahan
Misi-4 : Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
			Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Misi-5 : Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan	Indeks Kesalehan Sosial	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	Indeks Toleransi
			Terciptanya kondisi masyarakat yang aman,nyaman dan tentram	Indeks Pelestarian Budaya
				Indeks Rasa Aman



Kerukunan Sosial Antar Warga	Ketertiban,Keruk unan dan Ketentraman dalam masyarakat			
------------------------------------	--	--	--	--

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode tahun 2021-2026.

Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang Maju,Aman dan Sejahtera, maka disusun 17 (tujuh belas) Program Strategis yang merupakan komitmen Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Program Prioritas 1 : 100.000 Lapangan Kerja Baru
2. Program Prioritas 2 : BPJS Kesehatan Gratis Seluruh Warga
3. Program Prioritas 3 : Gratis Makanan Tiap Hari Warga Miskin
4. Program Prioritas 4 : 10.000 Beasiswa Kuliah
5. Program Prioritas 5 : Insentif Plus Guru Ngaji dan Guru Agama
6. Program Prioritas 6 : Rp. 5 Juta – 50 Juta Modal Usaha Mikro Perempuan
7. Program Prioritas 7 : Rp. 6 Juta Operasional Bagi RT
8. Program Prioritas 8 : 20.000 UMKM Naik Kelas
9. Program Prioritas 9 : Penataan Kota dan Transportasi Terpadu Urai Kemacetan
10. Program Prioritas 10 : Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu
11. Program Prioritas 11 : Tingkatkan Kesejahteraan GTT, Guru Swasta, dan Tenaga Honorer
12. Program Prioritas 12 : Youth Center, Bangun Pusa Kreativitas Anak Muda
13. Program Prioritas 13 : 2.000 Warung Rakyat Direnovasi
14. Program Prioritas 14 : Tingkatkan ADD Untuk Desa Sejahtera
15. Program Prioritas 15 : 24 Jam Pengaduan Rakyat Respon Cepat



16. Program Prioritas 16 : Reformasi Perijinan Untuk Bisnis Yang Kondusif

17. Program Prioritas 17 : Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, selain berpedoman pada Arah Kebijakan di tahun berkenaan dalam RPJMD sebagaimana disajikan diatas, maka penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2023 dan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Setelah dilakukan penyesuaian antara Arah Kebijakan RPJMD tahun 2023 dengan Tema RKP Tahun 2023 dan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan Tema RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pendidikan
 - a) Pembangunan RKB SD Negeri
 - b) Pembangunan RKB SMP Negeri
 - c) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD Negeri
 - d) Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SMP Negeri
 - e) Pembangunan Bumi Perkemahan
2. Kesehatan
 - a) Pembangunan RSUD Barat
 - b) Pembangunan Puskesmas Baru
 - c) Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk PBI Daerah
3. Infrastruktur
 - a) Pembangunan Frontage Road
 - b) Pelebaran Jalan Simpang Majapahit
 - c) Pengendalian Banjir (diluar Perpres 80/2019)
 - d) Gedung Pemerintahan Daerah yang representatif
 - e) Belanja Modal Infrastruktur Lainnya (PJU, Sanitasi, Jalan Lingkungan, Peningkatan Jalan Kabupaten, RTH / Taman Tematik, dan sebagainya)
4. Kewilayahan
 - a) PIWK
 - b) Pelayanan Kecamatan / Kelurahan
 - c) Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5. Sosial



- a) Pembangunan Liponsos
- b) Belanja Hibah
- c) Belanja Bansos
- d) Belanja Tidak Terduga
- 6. Kepemudaan dan Olahraga
 - a) Revitalisasi Kawasan GOR
 - b) Pembangunan Wisma Atlet

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1.3.1 Dasar Pertimbangan Penerapan SPM (Latar Belakang)

Dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 18, dijelaskan Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Standar Pelayanan Minimal diterapkan pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini kemudian dijabarkan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan SPM dan menjadi pokok-pokok acuan bagi pemerintah daerah dalam penerapan SPM.

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan



pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang *excellent*, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Seperti halnya dengan Instansi Pemerintah di Pusat dan di Daerah lainnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM



yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

1.3.2. DASAR PENERAPAN SPM

Peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
10. Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, yang diganti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.
18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

1.3.3 Kebijakan Umum

Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang



menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan Umum RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 merupakan kunci dari Strategi dan Arah Kebijakan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kebijakan Umum menggambarkan tentang bagaimana keterkaitan antara Strategi yang telah ditentukan dengan pilihan dan pelaksanaan programnya. Sehingga Gambaran umum memberikan petunjuk operasional mengenai bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan yang telah ditentukan akan diimplementasikan melalui berbagai program yang ada dalam RPJMD. Pilihan program unggulan serta program prioritas di masing-masing misi yang disinergikan dengan strategi agar lebih tepat/ terstruktur, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal empat perspektif sebagai berikut :

- a. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan yang didesain tidak hanya untuk masyarakat tertentu saja, namun lebih dari itu semua lapisan difasilitasi guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih berkeadilan. Pada sisi ini Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam pelayanan sosial serta penyediaan kebutuhan/hak dasar masyarakat.
- b. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan guna mengantisipasi kompleksitas beban kerja pemerintahan dalam merespon tuntutan internal organisasi maupun eksternal pelayanan kepada masyarakat (domestik dan internasional) dengan lebih baik. Arah ini ditujukan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan lebih fleksibel serta dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat sipil negara. Fleksibilitas pelayanan pemerintahan juga diarahkan kepada terselenggaranya sinkronisasi dan harmonisasi hubungan eksternal antara Pemerintah kabupaten dengan seluruh PD, dan pemerintahan desa.
- c. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan antara lain diarahkan pada optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi baik melalui upaya perbaikan Regulasi (administrasi), pengembangan Skill dan Manajemen Sumber Daya Manusia baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, dan optimalnya pemanfaatan teknologi



- informasi sebagai penunjang kinerja birokrasi, serta kontrol (masayarakat).
- d. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, dilakukan melalui optimalisasi desain Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah. Kebijakan Pendapatan daerah dilakukan antara lain melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil guna meningkatkan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan. Kebijakan Belanja daerah dioptimalkan untuk menambah porsi Belanja Langsung, serta secara simultan dilakukan upaya-upaya efisiensi anggaran guna mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah.

1.3.4 KEBIJAKAN PENERAPAN SPM

Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

A. Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
1	Pendidikan Dasar
2	Pendidikan Kesetaraan
3	Pendidikan Anak Usia Dini

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah



Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	2023
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2023
3	Pendidikan AnakUsia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2023

B. Bidang Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100%	2023



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100%	2023

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik



2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	PelayananDasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	100%	2023
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2023

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2023
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2023

E. Bidang Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentangperubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2	Pelayanan Informasi rawan bencana



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	2023
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2023
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2023
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2023
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	2023

F. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar



Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Sosial Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	100%	2023
2	Rehabilitasi sosial dasaranak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2023
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2023
4	Rehabilitasi sosial dasartuna sosial khususnya gelandangan dan	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang	100%	2023



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	pengemis diluar Panti	memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti		
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	100%	2023



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

II.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut

NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	LAJU KINERJA 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Laju Indeks Pembangunan Manusia	81.37	81.88	0,627
2	Angka Kemiskinan	Laju Angka Kemiskinan	5.36	5	7,2
3	Angka Pengangguran	Laju Angka Pengangguran	8.8	8.05	-8,523
4	Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7.53	6.16	-18,194
5	Pendapatan Per-Kapita	Laju Pendapatan Per-Kapita	125,43	127.38	1,555
6	Ketimpangan Pendapatan	Laju Kelimpangan Pendapatan	0.373	0.359	-3,753

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran usia harapan hidup, pendidikan melalui pengukuran angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. IPM Kabupaten Sidoarjo lebih baik dari capaian Jawa Timur dan Nasional. IPM Sidoarjo menduduki peringkat ke-4 (empat) dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Pencapaian IPM tertinggi di Jawa Timur diduduki oleh Surabaya kemudian disusul oleh Kota Malang dan Kota



Madiun. Realisasi kinerja IPM Sidoarjo tahun 2023 81,88 poin dari target 80,92 poin, capaian kinerja 101,19% dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

- Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*)

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)

- Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)
2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

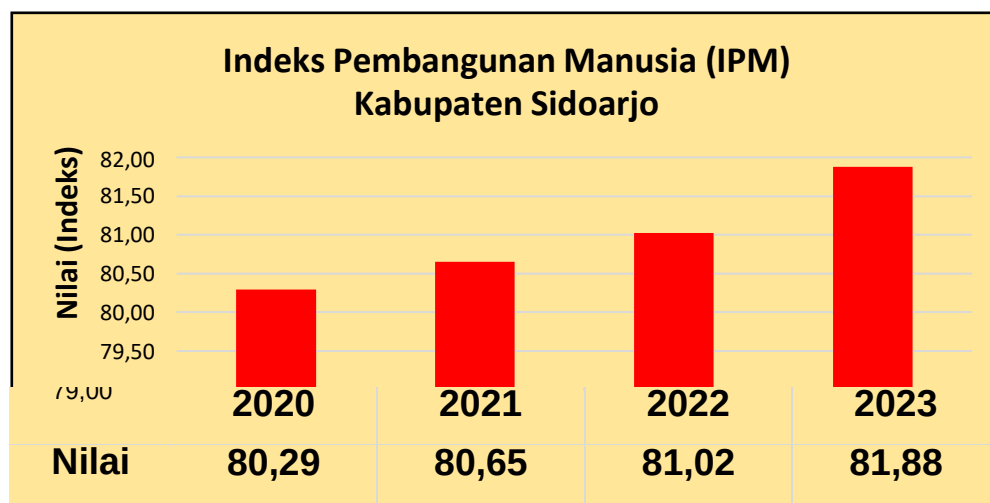
- Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDRB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 mencapai 81,88 dari target 80,91 atau mencapai target dengan capaian 101,20%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu 81,37%.

Apabila dibandingkan dengan seluruh Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Timur, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke-1 untuk Kabupaten dan peringkat ke-4 untuk Kabupaten dan Kota.

Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :



Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :



Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umur Panjang dan Hidup Sehat					
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,78	74,80	75,06	75,36
Pengetahuan					
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,93	14,94	14,95	14,97
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,50	10,72	10,77	10,78
Standar Hidup Layak					
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	14.458	14.578	14.808	15.311
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		80,64	81,01	81,37	81,88

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo
Dalam Angka 2024

2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

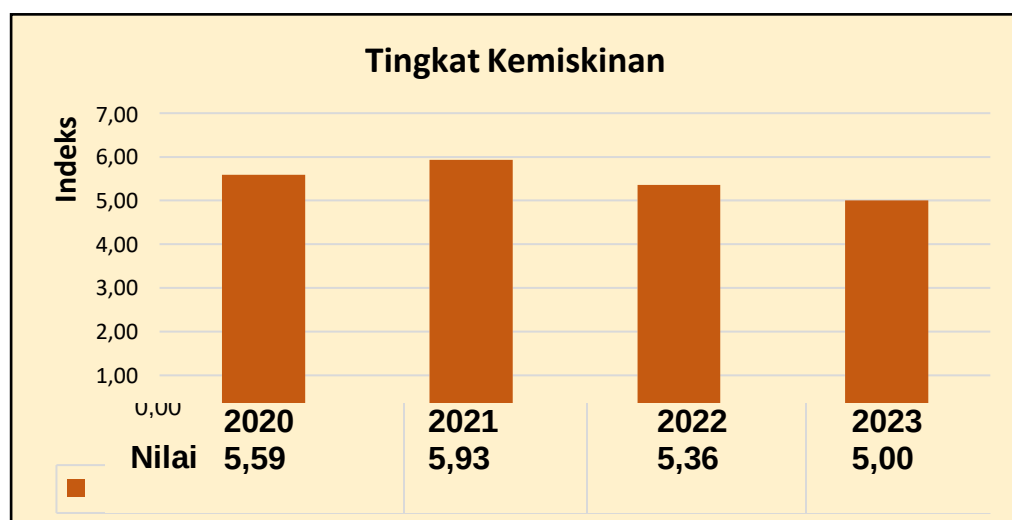
Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo selalu berada di bawah angka Nasional dan Jawa Timur. Persentase penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo secara agregasi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2023 Tingkat Kemiskinan mencapai 5,00 persen turun dari tahun 2022 yang masih berada pada angka 5,36%. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2023 yang sebesar 5,40% maka capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yang ditetapkan. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2023 mencapai 119,15 ribu jiwa.

Jumlah ini berkurang sebanyak 6,54 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 125,69 ribu jiwa. Garis Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada bulan Maret 2023 sebesar Rp 571.696 per



kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 48.483,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 9,27 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp 523.213,00. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sidoarjo Maret 2023 sebesar 0,72 mengalami penurunan sebesar -0.12 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 0,84.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sidoarjo Maret 2023 sebesar 0,16, mengalami penurunan sebesar -0,02 poin dibandingkan Maret 2022 yaitu 0,18. Perkembangan tingkat miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat sebagaimana grafik sebagai berikut :



Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan dari 5,36 persen pada bulan Maret 2022 menjadi 5,00 persen pada bulan Maret 2023, ini berarti penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan dan berkurang sebanyak 6.54 ribu jiwa dari 125.69 ribu jiwa pada Maret 2022 menjadi 119,15 ribu jiwa pada Maret 2023 selain Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo termasuk lumayan baik dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya.

3 . Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebesar 8,05 persen, turun 0,75 poin dibandingkan dengan



tahun 2022 yang masih berada pada angka 8,80 persen. Apabila diperbandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 10,09 persen, maka capaian tahun 2023 jauh melebihi target yang ditetapkan.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 berkurang 165,59 ribu orang menjadi sebanyak 1.176,48 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 69,62 persen, turun 3,25 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2022. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.081,72 ribu orang atau bertambah 142,30 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Sektor Pertanian mengalami peningkatan jumlah pekerja yaitu bertambah sebesar 4,17 ribu orang, sedangkan sektor lapangan kerja paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa. Sebanyak 674,39 ribu orang (62,34 persen) bekerja pada kegiatan formal atau turun 1,36 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki TPT tertinggi di Sidoarjo, yaitu sebesar 11,10 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,96 persen poin. Lulusan SMP mengalami penurunan TPT yang sangat drastis, yaitu sebesar 16,33 persen poin menjadi 7,57 persen.

Tabel 7. Capaian TPT Kabupaten Sidoarjo terhadap Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023

TPT	2020	2021	2022	2023
Nasional	7,07	6,49	5,86	5,32
Jawa Timur	5,84	5,74	5,49	4,88
Sidoarjo	10,97	10,87	8,80	8,05

Sumber : BPS, BPS Jawa Timur dan BPS Kabupaten Sidoarjo, 2023

Mencermati dari Tabel 7 di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkat secara drastis di tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 TPT sudah mulai melandai. Pada tahun 2023 TPT mengalami penurunan pada angka 8,05% dengan capaian terhadap target kinerja sekitar 125,34% dan kategori kinerja adalah “Sangat Tinggi”. Secara agregat angka TPT Kabupaten Sidoarjo masih tinggi dibandingkan angka TPT Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo untuk mengatasi tingginya TPT adalah menciptakan 100.000 lapangan kerja baru.

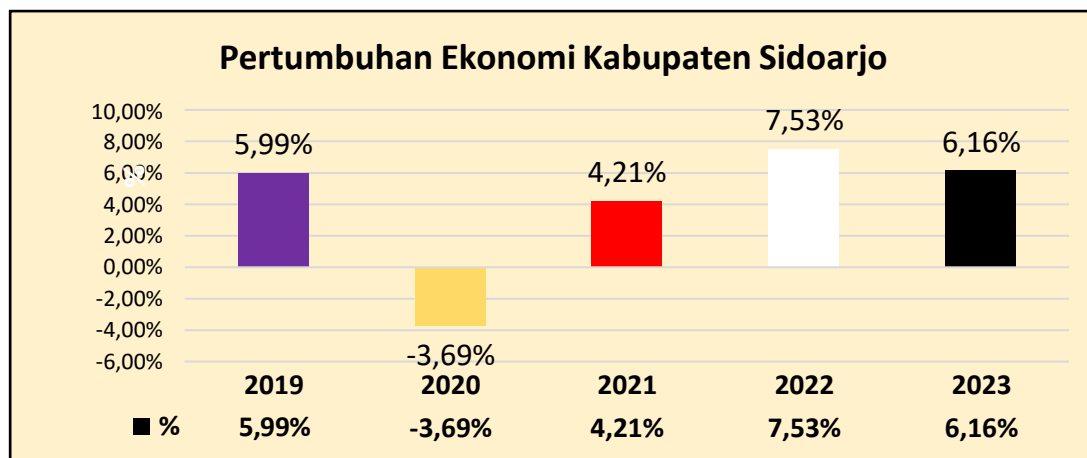
4. Pertumbuhan Ekonomi



Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK mengalami fase peningkatan setelah pemulihan pasca pandemi covid-19, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 ditargetkan sebesar 2,89, dan berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sidoarjo, angka pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 6,16. Apabila dibandingkan dengan target 2,89 maka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sudah jauh melebihi target yang ditentukan. Namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 7,53 maka mengalami penurunan 1,37 poin atau sekitar 18,19%.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo :



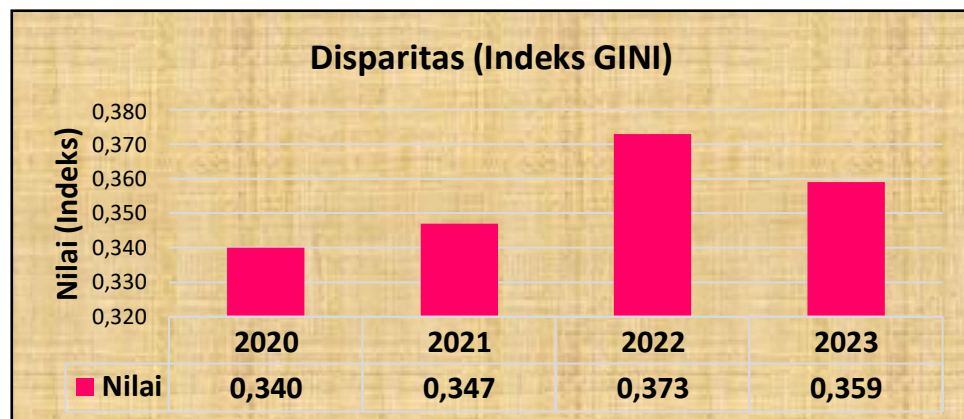
pemulihan ekonomi dan sosial diharapkan dapat menstimulasi perekonomian ke titik yang lebih baik. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 mulai membaik pada angka 4,21 persen dan tahun 2022 tumbuh sebesar 7,53%. Adapun target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 adalah sebesar 2,89. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan kebijakan – kebijakan strategis yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya : pemberian KURMA (Kartu Usaha Perempuan Mandiri), Renovasi Warung Rakyat, Fasilitas UMKM Naik Kelas, dan lain sebagainya.

5. Indeks Gini



Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa – apa.

Berikut perkembangan Disparitas (Indeks GINI) di Kabupaten Sidoarjo :



Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1, atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 tercapai 0,359 dari target 0,347 sehingga masih belum dapat mencapai target yang ditentukan. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan tahun 2022 maka capaian tahun 2023 lebih baik, yaitu menurun 0,014 angka atau sekitar 3,90%.

Penurunan Indeks GINI mencerminkan bahwa pemerataan pembangunan dan perekonomian belum merata untuk seluruh masyarakat Sidoarjo. Perlu penguatan kewilayahan, yaitu melalui partisipasi dari seluruh RT untuk mendukung percepatan pembangunan di masing – masing wilayahnya, salah satunya melalui Lomba RT.



II.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

II.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

II.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

1. URUSAN PENDIDIKAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	1.245		Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta) sebanyak 1.245 dengan rincian TK = 713, KB = 450, TPA = 13 SPS = 69
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	62.563		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak.62563
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20		Jumlah peserta didik PAUD Negeri yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak 20 peserta didik



		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	5.429		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) sebanyak 5429 pendidik dengan rincian TK = 2745 KB = 2254 TPA = 145 SPS = 285
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	5.053		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta) sebanyak 5053 pendidik
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	1.714		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sebanyak 1714, salah satu persyaratan untuk menjadi guru bersertifikat pendidik berijazah D-IV/S1
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau	544		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 dan ber sertifikat pendidik sebanyak 544 dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat



			sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah			pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah belum ada
		8	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	154		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) sebanyak 154 pendidik
		9	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	509		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi, SDN = 463 dan SMPN = 46 satuan pendidikan
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.170		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak 1170
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.342		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak 1342



		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.690		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak 1690
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.028		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak 1028
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3478		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak 3478
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.961		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak 1961



		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	464		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak 464
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	65		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak 65
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1.690		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak 1690
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1.028		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak 1028



		20	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	144.942	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak 144942 dengan rincian SDN = 110829 SDS = 34113
		21	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	76.365	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak 76365 dengan rincian SMPN = 42273 SMPS = 34092
		22	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	110.829	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak 110829
		23	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	42.273	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak 42273



		24	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	8.175		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak 8175
		25	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	4.025		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama Negeri dan swasta sebanyak 4025
		26	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	8.080		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar sebanyak 8080
		27	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	4.132		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak .4132
		28	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.170		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak 1170
		29	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	464		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak 464



		30	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1.690		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak 1690
		31	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.961		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak 1961
		32	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	65		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak 65
		33	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	1.028		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat sebanyak 1028



		34	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1.690		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak 1690
		35	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	8.175		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) sebanyak 8175
		36	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	8.080		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar sebanyak 8080
		37	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	1.028		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak 1028
		38	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4.025		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak 4025
		39	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	4.132		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak .4132
		40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	3.478		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebanyak 3478



		41	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	1.342		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) sebanyak 1342
		42	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	110.829		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak 110829
		43	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	42.273		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak 42273
		44	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	76.365		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak 76365 dengan rincian SMPN = 42273 SMPS = 34092
		45	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan Terakreditasi	509		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi, SDN = 463 dan SMPN = 46 satuan pendidikan



		46	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	144.942		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyak 144942 dengan rincian SDN = 110829 SDS = 34113
		47	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	18		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta) sebanyak 18
		48	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah sebanyakikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	5.021		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5021



		49	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	269		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan sebanyak 269
		50	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	168		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) sebanyak 168
		51	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	154		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) sebanyak 154
		52	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	136		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) sebanyak 136
		53	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	464		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebanyak 464



			Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1			Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 sebanyak 29
		54		29		

2. URUSAN KESEHATAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Kesehatan	55	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	31 RS		Tahun 2023, Kabupaten Sidoarjo memiliki 31 RS yang terdiri dari 24 RS umum dan 7 RS khusus
		56	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	KIE = 528 , tensimeter tidak dihitung karena sudah masuk pada tensi usia produktif, formulir pencatatan = 30		Jumlah KIE disesuaikan dengan jumlah posbindu, dan formulir pencatatan disesuaikan dengan jumlah puskesmas
		57	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter = 1777, Bidan = 1566, perawat = 4280, tenaga kesmas = 238		-



		58	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	BHP = 83.675, formulir pencatatan = 30, KIE = 528		BHP (Bahan Habis Pakai) disesuaikan dengan jumlah realisasi pada indikator outcome, formulir pencatatan disesuaikan dengan jumlah puskesmas, KIE disesuaikan dengan jumlah posbindu
		59	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter = 1777, Bidan = 1566, perawat = 4280, tenaga kesmas = 238		-
		60	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Buku pedoman = 30, KIT alat fiksasi = 30, formulir pencatatan = 4.939, KIE = 1849		Buku pedoman dan alat fiksasi disesuaikan dengan jumlah puskesmas, formulir pencatatan disesuaikan dengan jumlah realisasi outcome, KIE disesuaikan dengan jumlah posyandu
		61	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter = 1777, Bidan = 1566, perawat = 4280, tenaga kesmas = 238		-



		62	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	KIE = 1849, reagen ZN TB = 43.464, masker N95 = 43.464, pot dahak = 30, formulir pencatatan = 30		jumlah KIE disesuaikan jumlah posyandu, reagen ZN TB dan masker N95 disesuaikan dengan realisasi indikator outcome, formulir pencatatan disesuaikan dengan jumlah puskesmas
		63	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter = 1777, Bidan = 1566, perawat = 4280, tenaga kesmas = 238		-
		64	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	KIE = 1849, tes cepat HIV = 40.288 , BHP = 40.288 , alat tulis, rekam medis = 30		Jumlah KIE disesuaikan dengan jumlah posyandu, jumlah tes cepat HIV disesuaikan dengan jumlah realisasi indikator outcome, alat tulis rekam medis disesuaikan dengan jumlah puskesmas
		65	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter = 1777, Bidan = 1566, perawat = 4280, tenaga kesmas = 238		-



		66	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	29 RS		Jumlah RS di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2023 sebanyak 31, namun yang telah akreditasi sebanyak 29. Ada 2 RS yang belum terakreditasi
		67	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	38.485		Dukungan Logistik seperti : 1 . Vaksin Tetanus Difetri (Td) 2 . Tablet Tambah Darah 3 . Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin 4 . Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu disesuaikan dengan jumlah realisasi indikator outcome. Buku KIA = buku KIA ibu hamil
		68	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Dokter = 1777, Bidan = 1566, perawat = 4280		-
		69	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36.855		Jumlah dukungan logistik kesehatan



						yang tersedia sebanyak ... Dukungan Logistik seperti : 1 . Formulir Photograf 2 . Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu) disesuaikan dengan indikator outcome
		70	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Dokter = 1777, Bidan = 1566, perawat = 4280		-
		71	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Dokter = 1777, Bidan = 1566, perawat = 4280		-
		72	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36.394		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak ... Dukungan Logistik seperti : 1 . Vaksin Hepatitis BO 2 . Vitamin K1 Injeksi 3 . Salep/Tetes Mata Antibiotik 4 . Formulir Bayi Baru Lahir , 5. Formulir MTBM Buku KIA = Buku KIA ibu hamil, karena buku KIA dipakai mulai hamil sampai balita



						Dukungan Logistik seperti : 1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku 2 . Formulir DDTK 3 . Vitamin A Biru , Vitamin A Merah 4 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell , 5. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella 6 . Jarum Suntik dan BHP, Peralatan Anafilaktik disesuaikan jumlah indikator outcome Buku KIA = buku KIA ibu hamil
		73	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	138.636		
		74	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Dokter = 1777, Bidan = 1566, perawat = 4280		-



		75	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	303.126		1 . Buku Raport Kesehatan 2 . Buku Pemantauan Kesehatan 3 . Kuesioner Skrining Kesehatan 4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah disesuaikan dengan jumlah indikator outcome
		76	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Dokter = 1777, Bidan = 1566, perawat = 4280, tenaga kesmas = 238, ahli gizi = 196		-
		77	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	KIE = 528, alkes = 528, formulir pencatatan dan pelaporan = 30		jumlah KIE dan alkes disesuaikan dengan jumlah posbindu PTM, formulir pencatatan dan pelaporan disesuaikan dengan jumlah puskesmas



		78	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter = 1777, Bidan = 1566, perawat = 4280, tenaga kesmas = 238, ahli gizi = 196		-
		79	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	229.815		BHP (Bahan Habis Pakai) dan buku kesehatan lansia disesuaikan dengan jumlah realisasi indikator outcome
		80	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dokter = 1777, Bidan = 1566, perawat = 4280, tenaga kesmas = 238		-

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada		
		82	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1		PDAM Delta Tirta
		83	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada		JAKSTRADA Air Minum 2021
		84	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah	NIHIL		



			daerah lain.			
		85	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1		PDAM Delta Tirta
		86	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	ada		perbub 93 tahun 2017 tentang rencana pola tanam dan tata guna air irigasi pada musim hujan dan musim kemarau
		87	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0		tidak ada kawasan permukiman di sepanjang pantai
		88	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	ada		perbub 93 tahun 2017 tentang rencana pola tanam dan tata guna air irigasi pada musim hujan dan musim kemarau
		89	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	57 unit pompa		terdapat prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai sejumlah 57 Rumah Pompa
		90	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	558 Ha		luas kawasan rawan banjir di kab. sidoarjo pada tahun 2023 seluas 558 Ha
		91	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	380.851 m		panjang sungai pada daerah irigasi delta brantas sepanjang 380.851 m
		92	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0		tidak ada kawasan permukiman di sepanjang pantai



		93	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	57 unit pompa		terdapat prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai sejumlah 57 Rumah Pompa
		94	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0		tidak ada kawasan permukiman di sepanjang pantai
		95	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	ada		perbub 93 tahun 2017 tentang rencana pola tanam dan tata guna air irigasi pada musim hujan dan musim kemarau
		96	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	ada		perbub 93 tahun 2017 tentang rencana pola tanam dan tata guna air irigasi pada musim hujan dan musim kemarau
		97	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	558 Ha		luas kawasan rawan banjir di kab. sidoarjo pada tahun 2023 seluas 558 Ha
		98	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0		tidak ada kawasan permukiman di sepanjang pantai
		99	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	380.851 m		panjang sungai pada daerah irigasi delta brantas sepanjang 380.851 m
		100	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%		Nihil



		101	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	72.70%		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik adalah 72,70%
		102	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	67.90%		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik adalah
		103	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada		RISPAM 2018-2036, akan dilakukan penyusunan review RISPAM untuk penyesuaian rencana program
		104	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemeritah pusat dan pemerintah daerah lain	Nihil		
		105	Jumlah BUMD dan Atau UPTD Kab/Kota penyelenggara SPAM	1		PDAM Delta Tirta
		106	Jumlah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1		PDAM Delta Tirta
		107	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada		JAKSTRADA Air Minum 2021
		108	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	1176 Rumah		
		109	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	167 Rumah		terdapat 167 Rumah yang telah di faslistasi menggunakan SPALD-T
		110	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar	644.075		terdapat 644075 unit rumah yang telah difasilitasi SPALDS



			menggunakan SPALDS			
		111	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	3,84%		
		112	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	91,31%		
		113	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	2,97%		
		114	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	100.00%		
		115	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100.00%		
		116	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	100%		Terdapat 4 sarana pengangkutan
		117	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	4.92%		
		118	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	2811 unit bangunan		pada tahun 2023
		119	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja	2811 unit bangunan		capaian pada tahun 2023
		120	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	2811 unit bangunan		capaian pada tahun 2023
		121	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	91,31%		
		122	Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kab/Kota	2.015		2015 Unit Bnagunan Gedung



		123	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	1 Bangunan		
		124	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	1 Bangunan		
		125	Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	2.015 Unit		2015 Unit Bangunan Gedung
		126	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	4.95%		91 bangunan tersertifikasi layak fungsi dari 1837 bangunan ber sertifikat PBG
		127	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	1873		terbit sertifikat PBG
		128	Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada		Peraturan Bupati Nomor 037 Tahun 2022
		129	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada		SK Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun 2023
		130	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	19.896,02 m		panjang jalan yang direkonstruksi adalah sepanjang 19.896,02 m
		131	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	116,21 m		panjang jembatan yang diganti adalah sepanjang 116,21 m
		132	Panjang jembatan yang direhabilitasi			Nihil
		133	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	19.896,02 m		panjang jalan yang ditingkatkan adalah sepanjang 19.896,02 m



		134	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	984.833 km		keputusan bupati sidoarjo no : 188/701/404.1.3. 2/2015 tentang ruas jalan kabupaten sidoarjo
		135	Panjang jalan yang dibangun	8.109,04 m		panjang jalan yang dibangun adalah sepanjang 8.109,04 m
		136	Panjang Jembatan yang dibangun			Nihil
		137	Panjang jembatan yang dipelihara	142.412,5 0 m		
		138	Panjang jalan yang dipelihara	142.412,50 m		panjang jalan yang dipelihara adalah sepanjang 142.412,50 m
		139	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	215		terdapat 215 orang tenaga terlatih
		140	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Nihil		
		141	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Nihil		
		142	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	85 BUJK		
		143	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah	6		



		144	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	6 Informasi Pelatihan		
		145	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Nihil		
		146	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		
		147	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah kab/kota	192		sebanyak 192 peserta iersertifikasi sampai dengantahun 2023
		148	Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Tersedia		sipjaki, aplikasi kementerian
		149	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0		
		150	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	85 BUJK		
		151	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Nihil		



		152	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Nihil		
		153	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	192		terdapat 192 tenaga operator yang persertifikat
		154	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	tersedia		sipjaki
		155	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	192		sebanyak 192 peserta tiersertifikasi sampai dengan tahun 2023
		156	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada		
		157	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Nihil		
		158	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kab/Kota	Nihil		



		159	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Nihil		
		160	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	tersedia		
		161	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Nihil		
		162	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	5.861		
		163	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Nihil		



4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Perumahan Rakyat	164	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	163		163 unit rumah mendapatkan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah terdampak bencana
		165	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	163		Terdapat 163 Rumah Tangga yang menjadi korban Bencana alam
		166	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Nihil		Tidak terdapat luasan dan lahan yang disiapkan untuk pencadangan relokasi
		167	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Nihil		Tidak terdapat unit rumah yang disewakan untuk menjadi tempat tinggal sementara korban bencana
		168	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Nihil		Tidak terdapat rumah terdampak bencana yang dibangun baru/ direlokasi, dikarenakan rumah yang terdampak hanya rusak ringan dan sedang



		169	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	163		Terdapat 163 Rumah Tangga / Kepala Keluarga yang terfasilitasi untuk di rehabilitasi
		170	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	644.075		
		171	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	163		Sebanyak 163 rumah sudah di berikan rehabilitasi
		172	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Nihil		tidak terdapat Rumah korban bencana yang dibangun kembali, karena rata-rata rumah yang terdampak hanya rusak ringan dan sedang
		173	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil		tidak terdapat program pemerintah yang difasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan
		174	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil		tidak terdapat program pemerintah yang difasilitasi layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan



						SPM
		175	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0,9654		0,9654
		176	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil		tidak terdapat penyediaan rumah tidak layak huni, hanya ada program renovasi RTLH
		177	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil		tidak terdapat program pemerintah yang memerlukan penggantian rugi aset properti di tahun 2023
		178	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Nihil		tidak terdapat penyediaan rumah tidak layak huni, hanya ada program renovasi RTLH
		179	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	123,11 Ha		berdasarkan SK Bupati No 331 Tahun 2021 luasa kawasan kumuh seluas 276,62 Ha, sampai akhir tahun 2023 telah dilakukan penanganan seluas 123,11 Ha



		180	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	276,62		berdasarkan SK Bupati No 331 Tahun 2021, sampai akhir tahun 2023 telah dilakukan penanganan seluas 123,11 Ha
		181	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	116 unit		116 unit Rehab Rumah Tidak Layak Huni
		182	Jumlah rumah pembangunan baru	18 perumahan		terdapat 18 perumahan yang mengajukan pizin pembangunan di tahun 2023
		183	Rasio rumah dan KK	66.26%		rasio rumah di kabupaten sidoarjo sebanyak 66.26
		184	Jumlah rumah di kab/kota	753367 unit		jumlah rumah di kabupaten sidoarjo pada tahun 2023 adalah 753367 unit
		185	Jumlah rumah tidak layak huni	24 unit		sisa unit RTLH di Kabupaten sidoarjo sebanyak 24 unit Rumah
		186	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0		
		187	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	116 unit		dilakukan rehab Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 116 unit RTLH pada tahun 2023 sesuai SK Bupati 2023



		188	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	753367 unit		seluruh rumah yang telah mempunyai jalan lingkungan, dari kondisi makadam sampai dengan perkerasan aspal
		189	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	444555 rumah		capaian 98,81% jika dibandingkan dengan target RPJMD yaitu 449.896 SR
		190	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	85		
		191	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	194471		capaian 43,23% jika dibandingkan dengan target RPJMD yaitu 449.896 unit rumah
		192	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	85		
		193	Jumlah pengembang yang teregistrasi	85		
		194	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	109292		seluruh perumahan yang telah mendapatkan ijin bangun dipastikan telah terfasilitasi PSU (dapat dilihat pada gambar siteplan perumahan)



		195	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	109292		seluruh perumahan yang telah mendapatkan ijin bangun dipastikan telah terfasilitasi PSU (dapat dilihat pada gambar siteplan perumahan)
		196	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	257		seluruh perumahan yang telah mendapatkan ijin bangun dipastikan telah terfasilitasi PSU (dapat dilihat pada gambar siteplan perumahan)



5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIA N	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	197	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	9178		Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat
		198	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani			Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Pelanggaran yang dimaksud adalah segala perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seorang, badan hukum dan



						atau perkumpulan yang dilarang di dalam ketentuan perda Diselesaikan adalah tuntasnya penanganan pelanggaran dengan tindakan non yustisial berupa pemberian sanksi administratif seperti teguran, peringatan, pencabutan ijin, pembongkaran dan/atau tindakan yustisial berupa pengajuan ke pengadilan sesuai ketentuan perda.
		199	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6		PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



		200	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	23	Standar Operasional Prosedur adalah suatu alur/cara kerja yang sudah ter-standardisasi, Standar Operasional Prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk (bersifat : mengikat dan direktif). Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur (langkah-langkah) tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan, Visi dan Misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda.
		201	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	2	Peraturan Daerah Kabupaten adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dengan persetujuan bersama Bupati



		202	Tersedianya sarana prasarana minimal	1291		Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
		203	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100.00%		
		204	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100.00%		Dokumen Pengukuran IRB dan IKD Tahun 2023
		205	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100.00%		Disusun pada tahun 2021
		206	Persentase warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	0.01%		Jumlah warga terdampak banjir = 393 KK Jumlah warga terdampak puting beliung = 708 Telah diberikan bantuan logistik berupa jas hujan, sepatu boot dan terpal sebanyak 196 buah yang berasal dari BTT dan bantuan BPBD Provinsi Jawa Timur



		207	Persentase jumlah aparaturnegara yang ikut pelatihan	0.30%		Realisasi Tahun 2023 : 6.210 orang, dengan rincian : 539 orang aparaturnegara dan 5.671 masyarakat.
		208	Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0.05%		Dihitung dari : jumlah layanan langsung yaitu : 549 layanan pengaduan kejadian kebakaran, 69 layanan pengaduan kejadian bencana, 464 layanan pengaduan kejadian yang membutuhkan penyelamatan (rescue) – Jumlah tersebut belum termasuk layanan tidak langsung meliputi permintaan data, layanan informasi dan dokumentasi kebencanaan baik secara langsung maupun media sosial
		209	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100.00%		Dokumen Renkon Bencana Banjir, disusun pada tahun 2022, bekerja sama dengan dunia usaha (PT. Pertamina)
		210	Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	0.27%		Realisasi Tahun 2023 : 5.671 orang



		211	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100.00%		Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kecamatan Tanggulangin sesuai Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/85/438.1.1.3/2023 Tanggal 1 Februari 2023
		212	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100.00%		Jumlah petugas yang aktif dalam kegiatan Keposkoan BPBD Tahun 2023
		213	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	%		Nihil, Tidak ada kejadian KLB
		214	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100.00%		7 orang Korban Laka Air, 464 orang untuk penanganan penyelamatan / rescue, 163 korban terdampak angin kencang yang diberi bantuan material, 549 penanganan kebakaran, 1.185 korban terdampak bencana
		215	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	6		1. Kelurahan Magersari (Pos Damkar Kota) 2. Desa Banjarkemantren (Pos Damkar Buduran) 3. Desa Tropodo (Pos Damkar Waru) 4. Desa Krajan (Pos Damkar Krian) 5. Kelurahan Juwetkenongo (Pos Damkar Porong) 6. Desa Bligo (Pos Damkar Candi)



		216	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	6		Pos Damkar Kota, Pos Damkar Buduran, Pos Damkar Waru, Pos Damkar Candi, Pos Damkar Krian, Pos Damkar Porong
		217	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	2		terdapat 2 kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) F1 Pemadam Kebakaran. 1 kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan biaya pribadi dari peserta, sedangkan 1 kegiatan dilaksanakan menggunakan pendanaan APBD
		218	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	181		Terdiri dari pos pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, mobil operasional, peralatan pemadam, APD, alat komunikasi
		219	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	464 kejadian		Evakuasi Hewan : 401 penyelamatan Laka Air : 2 kejadian Penyelamatan percobaan bunuh diri : 1 kejadian Rescue lain (penyelamatan benda, dll) : 14 kejadian Pembersihan Pohon tumbang : 4



		220	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	105		Sesuai data relawan di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD
		221	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	236		Bertugas secara bergantian (shift) di 6 (enam) pos damkar
		222	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	145		dari total 246 orang, 145 orang sudah bersertifikasi

6. URUSAN SOSIAL

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	Sosial	223	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	191		Minimnya informasi keluarga dan Anggaran Pemulangan Klien
		224	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2		Tersedia 2 Unit kendaraan roda empat yang akses khusus layanan layanan kedaruratan
		225	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	5		5 Pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan social



		226	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	1		1 Kali bimbingan untuk penguatan keluarga/orang tua dalam merawat penyandang disabilitas dan agar memanfaatkan bantuan sosial untuk kebutuhan disabilitas.
		227	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	4		4 Orang tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah
		228	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1		Telah dibentuk 1 tim reaksi cepat pada tahun 2023
		229	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	3		Tersedia 3 unit alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter
		230	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	1		Penyediaan paket kesehatan digunakan untuk seluruh klien di shelter atau rumah singgah sesuai dengan kebutuhan
		231	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1		Tersedia 1 rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki
		232	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	23		23 Orang telah mendapatkan layanan rujukan
		233	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	81		81 Orang telah memanfaatkan paket sandang



		234	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakaman sesuai standar gizi	4510		4510 Orang Telah Menerima Paket Permakanan
		235	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	92394		92394 Orang telah mendapatkan layanan
		236	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	105		105 Orang telah mendapatkan dan memanfaatkan alat bantu
		237	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	369		369 Orang telah memanfaatkan paket perbelakan kesehatan
		238	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	369		369 Orang telah menerima bimbingan fisik, mental, dan sosia
		239	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	92394		92394 Orang atau yang ada dalam DTKS memiliki akses layanan kesehatan dan pendidikan
		240	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	8		Terdapat 8 unit layanan data dan pengaduan yang dimiliki
		241	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	77		Pengajuan Pendaftaran NIK dan KIA



		242	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	369		369 Orang mendapatkan layanan penelusuran keluarga
		243	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	92394		92394 Orang telah terdata untuk menerima layanan
		244	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0		Tidak ada korban bencana yang mendapatkan bantuan sandang selama tahun 2023
		245	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0		Belum ada tempat pengungsi yang disediakan
		246	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		Tidak ada korban bencana yang mendapatkan bantuan paket permakanan khusus kelompok rentan selama tahun 2023, penanganan kelompok rentan selama tahun 2023 diberikan kepada orang terlantar yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebagai sarana untuk perpulangan bukan dalam bentuk permakanan



		247	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		Tidak ada korban bencana di Tahun 2023 yang membutuhkan pendampingan psikososial
		248	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	50 Orang		50 Orang relawan sosial TAGANA yang telah mendapatkan pembinaan peningkatan kapasitas dan sosialisasi simulasi penanganan bencana
		249	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	3399		3399 Orang korban bencana mendapat bantuan makanan selama terjadinya bencana

7. URUSAN TENAGA KERJA

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Tenaga Kerja	250	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1		Dokumen RTKD yang telah disusun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo
		251	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	8909.08%		Berdasar Data pada Proyeksi RTKD 2023 dan Realisasi BRS 2023
		252	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	413		Sesuai dengan inputan perusahaan pada aplikasi WLKP
		253	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	100.00%		Jumlah kegiatan pelatihan berbasis



						kompetensi yang dilaksanakan pada tahun 2023
		254	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	76.06%		sesuai data CPMI yang terdaftar di aplikasi siapkerja.kemna ker.com
		255	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	100.00%		Sesuai CPMI yang bersertifikat BNSP di sistem aplikasi siapkerja.kemna ker.go.id
		256	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	53.21%		Berdasarkan instruktur bersertifikat kompetensi
		257	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	17.90%		Berdasarkan jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan
		258	Persentase LPK yang terakreditasi	14.56%		Berdasarkan LPK yang terakreditasi
		259	Persentase LPK yang memiliki perizinan	99.03%		Berdasarkan LPK yang memiliki perizinan
		260	Jumlah penganggur yang dilatih	0.07%		Penganggur yang dilatih berdasarkan data peserta pelatihan tahun 2023
		261	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100.00%		Berdasarkan jumlah peserta yang lulus pelatihan dibagi jumlah peserta yang dilatih pada tahun 2023
		262	Persentase penyerapan lulusan	59.26%		Berdasarkan data peserta



						pelatihan yang sudah bekerja dibagi jumlah lulusan pelatihan pada tahun 2023
		263	Lulusan bersertifikat kompetensi	84.26%		Berdasarkan jumlah peserta yang lulus uji kompetensi dibagi jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pada tahun 2023
		264	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	75.76%		Data yang diambil berdasarkan data perusahaan kecil tahun 2021 dan data perusahaan yang mengikuti bimtek pengukuran produktivitas dikarenakan pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada kegiatan untuk bimtek pengukuran produktivitas.
		265	Data tingkat produktivitas total	1125.96%		Data berdasarkan data BRS 2022 karena data 2023 belum rilis (pertumbuhan ekonomi (7.53%) - (pertumbuhan modal (44.13%) + pertumbuhan tenaga kerja (-1162.56%))
		266	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	78.63%		Berdasarkan data WLKP, total perusahaan berstatus sudah lapor sejumlah



						9666, setelah di verifikasi jumlah perusahaan yang memiliki pekerja 10 orang atau lebih sebanyak 847 dan perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan sejumlah 666.
		267	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0		Tidak ada perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan yang dicatatkan ke Disnaker Kab. Sidoarjo
		268	Jumlah perselisihan PHK	46		Dari jumlah perselisihan yang teregister oleh Dinas adalah sebanyak 68 kasus, dengan perselisihan PHK sebanyak 46 kasus



		269	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	1293	- Jumlah PHK yang dilaporkan oleh perusahaan ke Disnaker Kab. Sidoarjo dan yang tercatat ke dalam Perselisihan PHK - Laporan PHK yang diajukan oleh perusahaan ke Disnaker Kab. Sidoarjo digunakan untuk pengajuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga pekerja yang ter-PHK dapat klaim manfaat program tersebut
		270	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	14	- Kehadiran pihak perusahaan atau yang mewakili tidak diberikan kuasa penuh untuk mengambil keputusan - Hak penyelesaian ada di pihak yang berperkara



		271	Lembag Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	1	LKS Tripartit organisasi yang melibatkan unsur perusahaan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pemerintah. Tugasnya adalah memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Bupati dalam menciptakan kebijakan Ketenagakerjaan
		272	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	25.00%	Penguatan fasilitasi penyelesaian oleh Dinas sehingga pihak-pihak dapat dipertemukan kesepakatan dalam PB
		273	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	39.02%	Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), jumlah perusahaan yang memiliki PKB di tahun 2023 adalah sebanyak 192 dan berdasarkan data yang telah diregister di Disnaker Kab. Sidoarjo, jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SP berjumlah 492



		274	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB diperusahaan	Jumlah konfederasi dan federasi SP/SB = 24, SP/SB di perusahaan = 492, Jumlah anggota SP/SB di perusahaan = 86.709		Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat dari berbagai sektor usaha
		275	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100.00%		JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMILIKI STRUKTUR DAN SKALA UPAH ADALAH 858. ANGKA TERSEBUT MERUPAKAN PENJUMLAHAN DARI PERUSAHAAN YANG MEMILIKI PP (666) DAN PKB (192). Struktur dan Skala Upah harus dilampirkan oleh Perusahaan pada saat pengesahan PP dan pendaftaran PKB, sehingga perusahaan yang memiliki PP dan PKB pasti sudah menyusun Struktur dan Skala Upah.



		276	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	101.61%	Berdasarkan data yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, jumlah badan usaha yang telah terdaftar sebagai peserta adalah sejumlah 9822 perusahaan dan jumlah perusahaan tahun 2023 berdasarkan WLKP adalah sejumlah 9666
		277	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0.58%	- Jumlah perusahaan yang berselisih sejumlah 56 adalah jumlah perselisihan yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo - Jumlah perusahaan pada tahun 2023 berdasarkan data WLKP tahun 2023
		278	Jumlah mogok kerja	18	Banyak perusahaan yang mengalami kondisi resesi ekonomi sehingga banyak perusahaan yang tidak mampu melaksanakan hak normatif karyawan
		279	Jumlah penutupan perusahaan	215	Data yang teregister dalam kepesertaan BPJS Kesehatan



		280	Jumlah perselisihan kepentingan	4		Dari jumlah perselisihan yang teregister oleh Dinas adalah sebanyak 68 kasus, dengan perselisihan kepentingan sebanyak 4 kasus
		281	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	254		sesuai dengan lowongan yang masuk melalui IPK Online dengan Rekap Jumlah Lowongan sebanyak 254 jabatan, dengan total kebutuhan 1126 orang
		282	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	355		sesuai rekap data di aplikasi siapkerja.kemna ker.go.id
		283	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	100.00%		Sesuai Data Kepulangan di aplikasi SISKOTKLN
		284	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	76.06%		Berdasarkan Data CPMI baik yang memiliki sertifikat Uji Kompetensi BNSP maupun tidak memiliki sertifikat pada aplikasi siapkerja.kemna ker.go.id
		285	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	%		Sub Kegiatan Pemberdayaan PMI Purna belum dapat dianggarkan tahun 2023 dan baru teranggarkan di tahun 2024



		286	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	%		Sidoarjo Bukan daerah Kantong PMI
		287	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	54541		Berdasarkan Data Pencari Kerja yang terdiri dari data AK1/Jobfair/Job Matching, Peserta Pelatihan, Pendaftar Lowongan PKWT, Calon Pekerja Migran Indonesia yang belum diberangkatkan
		288	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	75		sesuai pendaftaran tanda daftar BKK
		289	Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	261		Tenaga kerja disabilitas yang ditempatkan di perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo
		290	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3		Sesuai dengan pegawai yang telah diangkat dalam jabatan Fungsional Pengantar Kerja dibuktikan dengan SK
		291	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	4		LPTKS yang Berada di Kabupaten Sidoarjo
		292	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	38910		Jumlah perjanjian kerja sebesar 38.910 adalah berdasarkan data yang teregister di Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo



		293	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Onlien (SISNAKER)	797		Sesuai Data Penempatan Melalui Informasi Pasar Kerja Online tahun 2023
		294	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100.00%		CPMI yang sudah mengajukan rekom telah mengetahui alur pemberangkatan legal

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	295	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	298 Lembaga/instansi		Jumlah Lembaga / Instansi yang mendapatkan sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
		296	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	99 Program / 135 Kegiatan		Jumlah Program/Kegiatan yang sudah dilakukan analisis gender



		297	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	4 Media	Berikut ini 4 Media yang selalu mensupport Dinas P3AKB selama pelaksanaan kegiatan yakni : 1. Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo 2. Bhirawa 3. Jawa Pos 4. Radio Sidoarjo 3.jawa pos 4.radio sidoarjo 3.radio sidoarjo 4. jawa pos 3. Radio Sidoarjo 4. Jawa Pos
		298	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal(standar pelayanan minimal yang dimaksud seperti apa, dan dasar regulasinya)	406 Lembaga	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal sebanyak 406 lembaga, yakni : 1. UPTD PPA Sidoarjo 2. Unit PPA Polresta Sidoarjo 3. Dinas Sosial 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5. Dinas Kesehatan 6. Kejaksaan Negeri 7. Pengadilan Agama 8. Pengadilan Negeri 9. Kemenag 10. Satpol PP 11. RSUD 12. Kecamatan Sidoarjo 13. Kecamatan Buduran 14. Kecamatan Tanggulangin 15. Kecamatan Porong 16. Kecamatan Jabon 17. Kecamatan Krembung 18. Kecamatan Prambon 19. Kecamatan Tulangan 20. Kecamatan Tarik 21. Kecamatan



						Balongbendo 22. Kecamatan Krian 23. Kecamatan Wonoayu 24. Kecamatan Sukodono 25. Kecamatan Taman 26. Kecamatan Waru 27. Kecamatan Sedati 28. Kecamatan Gedangan 29. Kecamatan Sidoarjo 30. Muslimat 31. Fatayat 32. Al Firdaus 33. Al Multazam 34. Hidayatul Ummah Sidoarjo 35. LKSA Baitun Ar Rahman Ar Rahim 36. LKSA Nurur Rohman 37. LKSA Sabilillah An- Nahdliyah 38. LKSA Sabilul Muttaqin 39. Panti Asuhan Al- Kahfi 40. Panti Asuhan As-Salam 41. Panti Asuhan Baabur Rahmah 42. Panti Asuhan Babul Kirom 43. Panti Asuhan Laksamana Moeljadi 44. Panti Asuhan Masyithoh 45. Panti Asuhan Ulin Nuha Putri 46. Panti Asuhan Yatim Aisiyyah Balongbendo 47. Roisus Shobur 48. Yayasan H. Mansoer 49. Yayasan Mizan Amal 50. Yayasan Peduli Anak Yatim 51. Yayasan Pendidikan Yatim Piatu Al Habibah 52. Yayasan Rumah dan Taman Panti Anak Yatim Aisiyyah Sepanjang 53. Yayasan Panti Auliyaa 54. Sebanyak 353
--	--	--	--	--	--	--



						Desa/Kelurahan se Kabupaten Sidoarjo
		299	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100.00%		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani pada tahun 2023 yakni : Kasus korban kekerasan terhadap anak yang ditangani UPTD PPA sebanyak 137 kasus dan yang ditangani PPA Polresta Sidoarjo sebanyak 85 kasus, jadi total sebanyak 222 kasus



						Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan sebanyak 42 lembaga yang terdiri dari : 1. Forum Anak Kecamatan Sidoarjo 2. Forum Anak Kecamatan Buduran 3. Forum Anak Kecamatan Candi 4. Forum Anak Kecamatan Tanggulangin 5. Forum Anak Kecamatan Porong 6. Forum Anak Kecamatan Jabon 7. Forum Anak Kecamatan Krembung 8. Forum Anak Kecamatan Prambon 9. Forum Anak Kecamatan Tulangan 10. Forum Anak Kecamatan Tarik 11. Forum Anak Kecamatan Balongbendo 12. Forum Anak Kecamatan Krian 13. Forum Anak Kecamatan Wonoayu 14. Forum Anak Kecamatan Sukodono 15. Forum Anak Kecamatan Wonoayu 16. Forum Anak Kecamatan Waru 17. Forum Anak Kecamatan Sedati 18. Forum Anak Kecamatan Gedangan 19. Forum Anak Kabupaten Sidoarjo 20. Fasilitator FAS Kabupaten Sidoarjo 21. Komunitas Gubuk Ekspresi 42. Pengawas TK dan Guru PAUD Kecamatan Buduran
		300	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	42 Lembaga		



		301	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1 Lembaga	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota) sebanyak 1, yakni UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Dimana UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo untuk pelayanan anak pada tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 184.779.000,00
		302	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2 Organisasi/ Lembaga	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan sebanyak 2 lembaga yang terdiri dari : 1. Lembaga LP2A Keluarga Muslimat 2. Aisyyah Family Care (AFC)



		303	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	30 Kader Perempuan yang Berasal dari 30 Lembaga	1. Ketua PUSPA Kabupaten Sidoarjo 2. Ketua TP-PKK Kabupaten Sidoarjo 3. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Sidoarjo 4. Ketua HWK 5. Ketua Fatayat NU 6. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 7. Ketua Jalasenastri 8. Ketua Pia Ardhya Garini 9. Ketua Bhayangkari 10. Ketua Tiara Kusuma 11. Ketua Muslimat NU 12. Ketua Harpi Melati 13. Ketua PERWARI 14. Ketua Aisyiyah 15. Ketua Nasiatul Aisyiyah 16. Ketua Adhyaka Dharma Karini 17. Ketua GOW 18. Ketua KPPG 19. Ketua IBI 20. Ketua IWAPI 21. Ketua Dharma Yukti Karini 22. Ketua WKRI 23. Ketua WHDI (Wanita Hindu Dharma) 24. Ketua Perwasi 25. Ketua GOP TKI 26. Ketua HWDI 27. Ketua Sahabat Perempuan 28. Ketua Gubug Ekspresi 29. Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia 30. Ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia
--	--	-----	--	---	--



						Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan sebanyak 30 Lembaga, yakni : 1. PUSPA Kabupaten Sidoarjo 2. TP. PKK Kabupaten Sidoarjo 3. Dharma Wanita Kabupaten Sidoarjo 4. HWK 5. Fatayat NU 6. Persit Kartika Chandra Kirana 7. Jalasenastri 8. PIA Ardhya Garini 9. Bhayangkari 10. Tiara Kusuma 11. Muslimat NU 12. Harpi Melati 13. PERWARI 14. Aisyiyah 15. Nasiatul Aisyiyah 16. Adhyaka Dharma Karini 17. GOW 18. KPPG 19. IBI 20. IWAPI 21. Dharma Yukti Karini 22. WKRI 23. WHDI (Wanita Hindu Dharma) 24. HWDI 25. Perwasi 26. GOP TKI 27. Sahabat Perempuan 28. Gubug Ekspresi 29. Wanita Katholik Republik Indonesia 30. Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia
		304	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	30 Lembaga		



		305	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1 Lembaga	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD kab/kota) sebanyak 1, yakni UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Dimana UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo untuk pelayanan anak pada tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp.136.337.235,00
		306	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	7 Kebijakan	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi yakni sebanyak 7 Kebijakan yang terdiri dari : 1. Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 97 Tahun 2018 tentang



						perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 5. Surat Edaran tentang Peningkatan Kepedulian terhadap Upaya Perlindungan Anak 6. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/83/438.113/2019 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak 7. Surat keputusan APSAI Pusat tentang Pengesahan Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Sidoarjo
--	--	--	--	--	--	--



		307	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	5 Lembaga	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi yakni sebanyak 5 lembaga, yang terdiri dari : 1. UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo 2. PPA Polresta Sidoarjo 3. dinas sosial 4,kemenag 5.pengadilan agama 3.kemenag kab. sidoarjo 4.pengadilan agama kab. sidoarjo 3. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo 4. Kemenag Kabupaten Sidoarjo 5. Pengadilan Agama Sidoarjo
		308	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100.00%	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani pada tahun 2023 yakni : Kasus korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani UPTD PPA sebanyak 83 kasus dan yang ditangani PPA Polresta Sidoarjo sebanyak 105 kasus, jadi total sebanyak 188 kasus

9. URUSAN PANGAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Pangan	309	tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	34 Lumbung Aktif		Terdapat 34 lumbung pangan di 18 kecamatan di kabupaten Sidoarjo



		310	tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	5.451,30 Ton Beras		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya Tahun 2023 pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo berupa Beras sebesar 5.451,30 Ton Beras
		311	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	belum tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal ,		belum ada data tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal , sehingga Kabupaten Sidoarjo masih mengacu pada aturan pusat (Bapanas no. 7 tahun 2023)
		312	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	115 Orang		IKK Output Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang (berupa penanaman Hidroponik dan Pekarangan Pangan Lestari) terdapat 115 Orang, dengan rincian Kecamatan Sidoarjo sebanyak 80 Orang, Kecamatan Waru sebanyak 20 Orang dan Kecamatan Taman sebanyak 15 Orang
		313	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 Peta ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023		Peta ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2023



		314	Tertanganinya kerawanan pangan	Penyaluran pangan pokok untuk penduduk rentan pangan		Tertanganinya Kerawanan Pangan Tahun 2023 pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo berupa : Bantuan Daging Ayam per orang : 1 Ekor Daging Ayam dan Bantuan Telur per orang : 10 Butir Telur dengan total 60.897 ekor daging ayam dan 608.970 telur ayam
		315	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	5.451,30 Ton Beras (Penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan pangan pada 18 Kecamatan)		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan sebesar 5.451,30 Ton Beras
		316	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	88,14%		Pengawasan keamanan pangan segar di Kabupaten Sidoarjo mencapai 88,14% pada Tahun 2022

10. URUSAN PERTANAHAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Pertanahan	317	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	92.75%		Jumlah permohonan rekomendasi PKKPR Berusaha dalam 1 tahun sejumlah 138 permohonan, yang diterbitkan sejumlah 126, dan yang dicabut sebanyak 2



		318	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	100.00%		Nihil (tidak ada redistribusi landreform di tahun 2023)
		319	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	100.00%		Nihil (tidak ada redistribusi landreform di tahun 2023)
		320	Dokumen Izin membuka tanah	100.00%		Nihil (tidak ada izin membuka tanah di Kabupaten Sidoarjo)
		321	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	258.67%		Jumlah permohonan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) UMK dan Non UMK



11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Lingkungan Hidup	322	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a.Â Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b.Â Indeks tutupan hutan(ITH) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Air 54,37 ; Indeks Kualitas Udara 81,98 ; Indeks Kualitas Lahan 24,42	Indeks Kualitas Air 54,37 ; Indeks Kualitas Udara 81,98 ; Indeks Kualitas Lahan 24,42	1) Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas dan aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai (terutama pencemar tinggi dari sumber tidak tentu yakni aktivitas domestik masyarakat) sehingga kualitas air badan air tidak dapat diprediksi dan tiap tahunnya menunjukkan nilai Indeks Kualitas Air yang fluktuatif 2) Peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan yang kurang memperhatikan pengelolaan terhadap pemenuhan baku mutu udara emisi dan udara ambien sesuai standar teknis pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 3) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam menyediakan RTH sesuai ketentuan di lokasi kegiatan (terutama penghijauan berupa tanaman pelindung yang bertajuk dengan ketinggian minimal 2 meter)



					Jumlah Kendaraan Angkutan Sampah Tahun 2023 sebanyak 76 Unit dengan rincian sebagai berikut : Suzuki Mini Dump sebanyak 9 Unit , Dump Truck sebanyak 41 Unit , Arm Roll sebanyak 26 Unit. Capaian Kinerja Tahun 2023 Berat sampah yang ditangani DLHK Sidoarjo : 999 ton / hari ; Berat sampah yang terkelola di wilayah Kabupaten Sidoarjo : 1300 ton / hari ; Berat timbulan sampah : 1300 ton / hari	- Pengelolaan sampah di sumber belum dilaksanakan secara maksimal. - Belum semua Desa / Kelurahan mempunyai TPS 3 R untuk mengurangi sampah dari sumber. - Belum semua Desa / Kelurahan menganggarkan pengadaaan / pemeliharaan sarpras untuk mengelola sampah di TPS3 R
		323	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Tersedia informasi angkutan sampah, volume timbulan sampah, jumlah sampah masuk di TPA, Jumlah TPS 3 R dan Jumlah pengelolaa n sampah di Kecamatan		



		324	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100.00%	Pengaduan yang masuk pada tahun 2023 = 49 dan telah ditindaklanju ti sebanyak 49 Pengaduan	1. Adanya pengaduan dengan data lokasi yang kurang lengkap dan tidak ada data pelapor sehingga sulit menemukan lokasi pencemaran lingkungan ; 2. Kurang kepedulian penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan ; 3. Adanya pengaduan yang dilatarbelakangi oleh masalah-masalah kecemburuan sosial/konflik antar warga
		325	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	%	Capaian NIHIL dikarenakan Sidoarjo Tidak Memiliki Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Capaian NIHIL dikarenakan Sidoarjo Tidak Memiliki Masyarakat Hukum Adat (MHA)



		326	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0.06%	Jumlah PPLHD yang ada di Kabupaten Sidoarjo sd Tahun 2023 : 2 Pejabat ; Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota Tahun 2010 sd 2023 : 3561	1. Terdapat persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi ASN untuk diangkat sebagai PPLHD sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang PPLH dan PPLHD 2. Kurangnya SDM untuk mengikuti diklat pengawasan lingkungan hidup yang diadakan oleh Kementerian/Provinsi
		327	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	%	Capaian NIHIL dikarenakan Sidoarjo Tidak Memiliki Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Capaian NIHIL dikarenakan Sidoarjo Tidak Memiliki Masyarakat Hukum Adat (MHA)



						a. Masih dalam proses penyesuaian permohonan izin sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan turunannya (termasuk Surat Edaran pelaksanaannya); b. Permohonan Izin PPLH dan PUU LH yang masuk cukup banyak daripada yang diterbitkan dikarenakan beberapa permohonan masih dalam proses belum diselesaikan oleh Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan, beberapa permohonan ditolak karena beralih kewenangan penilaian atau hal lainnya dan beberapa harus melakukan pengajuan permohonan ulang.
		328	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	96.01%	Izin Lingkungan , Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2010 sd 2023 = 3561	



		329	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	100.00%	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat Tahun 2023 : 130 Lembaga (Sekolah dan Desa/ Kelurahan) ; Target Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat Tahun 2023 : 130 Lembaga (Sekolah dan Desa/ Kelurahan)	1. Terbatasnya anggaran terkait pelaksanaan sosialisasi 2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup 3. Tidak meratanya pengetahuan terkait pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat daerah perkotaan dan masyarakat daerah pedesaan di Kabupaten Sidoarjo
--	--	-----	---	---------	--	--

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	330	Penyajian data kependudukan	100.00%		
		331	Penerbitan akta kematian	100.00%		
		332	Penerbitan akta perkawinan	100.00%		
		333	Penerbitan akta perceraian	100.00%		



13. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	334	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	267 x 50% = 133.5		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun adalah 267 x 50% = 133.5
		335	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Jumlah stakeholder dan mitra kerja sebanyak 7		Stakeholders yang berupa lembaga/instansi/institusi pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK dan kelompok komunitas perannya cukup vital dan tidak bisa diabaikan. Bahkan perusahaan, koperasi dan kelompok tani juga berperan dalam mendukung program KKBPK.
		336	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Rencana penyusunan Raperda GDPK masih dalam proses penganggaran tahun 2025 Naskah akademik GDPK		Arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan
		337	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	100.00%		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK



						(Advokasi dan KIE) sebesar 100%
		338	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	ASFR Propinsi 31.34 dan Kabupaten 10, PUS Umur 15-49 tahun yang berstatus kawin ikut KB 53.09 pada tahun 2022		Salah satu faktor yang mempengaruhi status kesehatan anak adalah status umur saat hamil dan bersalin pada seorang ibu.
		339	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	69.07%		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan sebesar 69.07%
		340	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	70.59%		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 70.56%
		341	Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	97.92%		Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP sebesar 97.92%
		342	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	370 KELOMPOK		Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif sebanyak 370 kelompok
		343	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Desa Pekauman Kecamatan Sidoarjo sebanyak 171 Kb Aktif		Desa Pekauman Kecamatan Sidoarjo sebanyak 171 Kb Aktif
		344	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	56.94%		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 56,94%



14. URUSAN PERHUBUNGAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Perhubungan	345	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten atau kota	70.51%	Presentase IKK pada pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan Jumlah Alat Perlengkapan Jalan yang sudah terpenuhi hingga tahun 2023 adalah 70,51 %	Minimnya ketersediaan anggaran sehingga masih banyak alat perlengkapan jalan membutuhkan pemeliharaan, perawatan, dan pengadaan baru.



					Dinas Perhubungan tidak menetapkan tarif pada lintasan penyeberangan di kab Sidoarjo di karenakan lintas dua wilayah operasinya kewenangan Dishub Propinsi. Jadi Dishub Kab hanya memberikan sosialisasi dan pengawasan dan tidak mengeluarkan perijinan	angkutan sungai yang ada di sidoarjo tidak berijin semua karena untuk mendirikan dermaga harus mendapatkan rekomendasi dari balai besar wilayah sungai berantas
		346	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0.00%		
		347	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	43.40%	Persentase IKK Terminal tipe C tercapai 43,40%, dikarenakan sarana dan prasarana masih banyak yang perlu di cukupi.	Minimnya ketersediaan anggaran



		348	Terlaksananya pelayanan uji berkala	104.52%	tercapai	tidak ada hambatan
		349	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	70.51%	Presentase IKK pada pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan Jumlah Alat Perlengkapan Jalan yang sudah terpenuhi hingga tahun 2023 adalah 70,51 %	Minimnya ketersediaan anggaran sehingga masih banyak alat perlengkapan jalan membutuhkan pemeliharaan, perawatan, dan pengadaan baru.

15. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Komunikasi dan Informatika	350	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100.00%		Berita Acara Monev Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		351	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	YA		PORTAL SIDOARJO



		352	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100.00%		KONEKSI FO OPD BACKBONE 2023
		353	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	85.42%		Sebagian perangkat daerah telah mengimplementasikan inovasi dalam mendukung penyelenggaraan Smart City di Kabupaten Sidoarjo
		354	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	82.72%		LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK DAN LAYANAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK



		355	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	49.38%	Prioritas pendaftaran system elektronik diutamakan untuk layanan Publik berbasis elektronik dikarenakan sifat penggunaan atau pemanfaatan layanan Publik yang massif yaitu digunakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo serta untuk melindungi hak cipta dari pihak yang tidak berkepentingan sehingga direkomendasikan untuk setiap layanan Publik berbasis elektronik terdaftar di layanan PSE Kementerian Kominfo
		356	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	28.79%	Jumlah Layanan Publik dan Layanan Administrasi yang terintegrasi dengan SPLP adalah Layanan LPPD
		357	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	91.67%	Penetapan Aplikasi Umum masih berlaku secara Nasional, belum diterapkan di Instansi Pemerintah Daerah https://www.sidoarjo.go.id/layanan-terpadu/08



		358	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo		Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 69 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo
		359	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	34.48%		ASN Pengelola TIK Tersertifikat
		360	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	100.00%		- Seluruh Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah Kabupaten Sidorjo - Setiap Perangkat Daerah memiliki satu Layanan yang berbasis elektronik
		361	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100.00%		perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar https://www.sidoarjo.go.id/layanan-terpadu/05



		362	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100.00%		- Seluruh Perangkat Daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data Kabupaten Sidorjo - Setiap Perangkat Daerah memiliki satu Layanan yang berbasis elektronik
		363	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100.00%		- Seluruh Perangkat Daerah telah memanfaatkan Pusat Data Kabupaten Sidorjo - Setiap Perangkat Daerah memiliki satu Layanan yang berbasis elektronik
		364	Persentase data yang dapat berbagi pakai	74.07%		data yang dapat berbagi pakai



		365	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	94.12%		Sebagian layanan SPBE telah memanfaatkan sertifikat elektronik dan terdaftar di Portal Sistem Elektronik (pse.layanan.go.id) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Pasal 47 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.
		366	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	56.25%		Layanan Publik yang diselenggarakan secara online
		367	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	37,50%		Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP



		368	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	72,73%		Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) yang diambil dari sumber media sosial
		369	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	83.33%		KIM,PWI,SATGAS ,MEDSOS,KARAN G TARUNA,PPKBD

16. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	Koperasi, usaha kecil dan menengah	370	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	64.93%		Masih terdapat beberapa koperasi yang menghadirkan pengurus yang berbeda dalam satu diklat (3 hari)
		371	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	99.37%	-	Jumlah pengawas koperasi terbatas
		372	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	66.19%		Masih banyak pengurus yang belum menyadari pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi anggota.



		373	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	-	Persyaratan yang harus dilengkapi koperasi untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan sangat detail dan koperasi pada umumnya tidak mempunyai aset yang dijadikan sebagai agunan
		374	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	46.13%	-	Masih banyak koperasi yang belum melengkapi administrasi kelembagaan koperasi seperti ART, SOP-SOM, Persus
		375	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17.38%		Masih terdapat koperasi yang belum memisahkan antara usaha simpan pinjam dan usaha lainnya
		376	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	31.70%		Peserta tidak hadir dalam pelaksanaan kegiatan karena pekerjaan lain
		377	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	77.09%	-	Pembuatan dan perpanjangan menggunakan NPWP, sedangkan koperasi banyak yang belum mempunyai NPWP koperasi



		378	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Persyaratan yang harus dilengkapi koperasi untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan sangat detail dan koperasi pada umumnya tidak mempunyai aset yang dijadikan sebagai agunan
--	--	-----	---	---	---



						Kegiatan fasilitasi terkendala dengan adanya Moratorium dan diterbitkannya regulasi baru. Moratorium pertama sesuai SE dari Kementrian Koperasi dan UKM no 11 tahun 2022 tentang moratorium perizinan usaha simpan pinjam pada tanggal 17 november 2022 yang kemudian diperpanjang dengan moratorium kedua sesuai SE Kementrian Koperasi dan UKM No. 3 tahun 20223 tentang moratorium pelaksanaan perizinan usaha simpan pinjam pada tanggal 15 Mei 2023 dan kemudian adanya regulasi baru peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republic Indonesia No. 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi yang didalamnya terdapat perubahan syarat untuk mengajukan perizinan
		379	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		



						Kegiatan fasilitasi terkendala dengan adanya Moratorium dan diterbitkannya regulasi baru. Moratorium pertama sesuai SE dari Kementrian Koperasi dan UKM no 11 tahun 2022 tentang moratorium perizinan usaha simpan pinjam pada tanggal 17 november 2022 yang kemudian diperpanjang dengan moratorium kedua sesuai SE Kementrian Koperasi dan UKM No. 3 tahun 20223 tentang moratorium pelaksanaan perizinan usaha simpan pinjam pada tanggal 15 Mei 2023 dan kemudian adanya regulasi baru peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republic Indonesia No. 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi yang didalamnya terdapat perubahan syarat untuk mengajukan perizinan
		380	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%		



		381	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4.27%		Masih sedikit anggota koperasi yang belum memanfaatkan IT untuk pemasaran produk yang dimiliki
		382	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4.27%		Masih sedikit jumlah koperasi yang mempunyai unit usaha retail yang dapat bekerjasama dengan perusahaan besar retail atau distributor
		383	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	7.09%	-	Pelaku UM usahanya masih berskala kecil kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ada di perjanjian bermitra
		384	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	55.27%		Tidak ada
		385	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	27.74%		Terbatasnya anggaran
		386	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system only data system (ODS)	0.00%	-	Tidak ada akses masuk ODS
		387	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	65.17%		Tidak ada
		388	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga	57.60%	-	Tidak ada klasifikasi peserta sesuai kebutuhan



			pendampingan			
		389	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	23.64%	-	Pelaku UM belum memahami teknologi untuk pemasaran usahanya

17. URUSAN PENANAMAN MODAL

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	Penanaman Modal	390	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	Jumlah informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam 1 tahun 2023 sebanyak 771 kali		Rekapitulasi informasi layanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha triwulan 1-4 di tahun 2023
		391	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam 1 tahun 2023 sebanyak 1.245 kali		Rekapitulasi konsultasi layanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha triwulan 1-4 di tahun 2023



		392	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk melakukan kegiatan tersebut.		seminar bisnis/business forum, one on one meeting 'Indonesia East Java K-Smart City Roadshow, "Percepatan Investasi Di Sektor Renewable Energi Dalam Mendukung Transisi Energi yang Berkelanjutan", "East Java Investment Opportunity Forum 2023"
		393	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Pada tahun 2023 jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan sebanyak 2034 izin.		Penerbitan perizinan dan non perizinan pada tahun 2023 sebanyak 2034 izin.
		394	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	17 Orang		Pembinaan aparatur penanaman modal sampai dengan tahun 2023 sebanyak 17 orang, hal ini disebabkan kuota diklat ditentukan oleh BKPM.
		395	Laporan realisasi penanaman modal	Rp13.681.823.120.000		Realisasi investasi hingga TW IV
		396	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan penerimaan misi dilakukan 2 kali dalam setahun		1. . Indonesia East Java K-Smart City Roadshow 2. Penerimaan Calon Investor dari Jerman dan Belanda



						Fasilitas/insentif kemudahan penanaman modal bisa berupa SOP Pelayanan Perizinan, penyediaan data dan sistem informasi peluang penanaman modal, bimbingan pelaksanaan pelaporan kegiatan penanaman modal, fasilitasi koordinasi penjajagan penanaman modal dengan pihak lain, fasilitasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan fasilitasi kemitraan antar dunia usaha.
		397	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 Dokumen		
		398	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	2 Dokumen		-Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanaman Modal - Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal



		399	Kegiatan pameran penanaman modal	4 Kali	Memperingati Hari Koperasi ke-76 Tahun 2023 "Talk Show Sidoarjo Cooperative Business Forum (SCBF)" Indonesia East Java K-Smart City Roadshow, Percepatan Investasi Di Sektor Renewable Energi Dalam Mendukung Transisi Energi yang Berkelanjutan East Java Investment Opportunity Forum 2023".
		400	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	12 Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif	Laporan bulanan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal.
		401	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan sebanyak 48 dan jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan, pendampingan dan pelatihan LKPM Online bagi PMA dan PMDN adalah 181 perusahaan	Perusahaan yang mendapatkan pengawasan dalam satu tahun pada tahun 2023 sebanyak 48 dan perusahaan yang mendapatkan pembinaan, pendampingan dan pelatihan LKPM Online bagi PMA dan PMDN adalah 181 perusahaan selama tahun 2023.



18. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Kepemudaan dan Olahraga	402	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	414		Data Pelatihan Dari Disporapar dan Dinas Koperasi
		403	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	435		Data dari Dinas Koperasi
		404	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	202		Data dari pelatihan di Disporapar, untuk data tambahan masih menunggu dari bankesbangpol
		405	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	52		Data pemuda yang mendapat pelatihan akademi kepemimpinan
		406	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	339		Data Pelatih dari Lembaga Olahraga KONI, KORMI DAN NPC di Kabupaten Sidoarjo
		407	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1		1. Pekan Olahraga Provinsi VIII Provinsi Jawa Timur



19. URUSAN STATISTIK

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	Statistik	408	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	52 buku		52 kompilasi produk administrasi mendapatkan rekomendasi dari BPS (Halaman 10-13)
		409	Tersedianya buku profil daerah	Ada		Buku Sidoarjo Dalam Angka Tahun 2023 merupakan kumpulan data-data sektoral secara komprehensif.
		410	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100.00%		Metadata variabel yang diajukan oleh OPD di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 252 variabel https://satudata.sidoarjokab.go.id/
		411	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 buku		Penyusunan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 (triwulan I)
		412	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100.00%		Metadata statistik kegiatan yang dihasilkan oleh 49 OPD di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023 sebanyak 83 metadata kegiatan. https://satudata.sidoarjokab.go.id/



		413	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	3 buku		Buku saku statistik sektoral Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, penetapan daftar data Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, Daftar Data Statistik Sektoral Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023
		414	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	20 buku		20 kegiatan survey yang dilakukan oleh OPD di Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan rekomendasi dari BPS (Halaman 12)

20. URUSAN PERSANDIAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20	Persandian	415	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	50.66%		Data Daftar Website dan Aplikasi di OPD Kab. Sidoarjo Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah



		416	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	73.03%		Data Daftar Website dan Aplikasi di OPD Kab. Sidoarjo Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah
		417	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Nihil		SURAT PERNYATAAN KEPALA DINAS
		418	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100.00%		Peraturan BSSN No. 10 Tahun 2019 BAB III pasal 24 ayat 3 a. Jaring Komunikasi Sandi antar perangkat daerah; b. Jaring Komunikasi Sandi internal perangkat daerah; dan c. Jaring Komunikasi Sandi pimpinan daerah



21. URUSAN KEBUDAYAAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Kebudayaan	419	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	160 orang		Jumlah SDM ditingkatkan kompetensinya sebanyak 160 orang pada kegiatan Pembinaan Pengetahuan Tradisional dan Adat Istiadat
		420	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	NIHIL		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran Cagar Budaya Tahun 2023 NIHIL dikarenakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hanya sebatas menerima pendaftaran
		421	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	NIHIL		Penyelenggaraan kegiatan Museum yang melibatkan Masyarakat Tahun 2023 NIHIL dikarenakan kegiatan tersebut berada dan dilaksanakan oleh Provinsi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XI Provinsi Jawa Timur)



		422	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	11 objek	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan sebanyak 11 objek cagar budaya, yaitu : 1. Pamotan 1, 2. Candi Pamotan 2, 3. Candi Lemah Dhuwur, 4. Candi Medalem, 5. Candi Dermo, 6. Candi Tawangalun, 7. Prasasti Kamalagyan, 8. Makam Adipati Terung, 9. makam Sono, 10. PG Toelengan, 11. Griya Bupati
		423	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	NIHIL	Peningkatan kompetensi SDM Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2023 NIHIL dikarenakan kewenangan berada pada Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XI Provinsi Jawa Timur
		424	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	NIHIL	Output Pemetaan SDM Cagar Budaya dan Permuseuman Tahun 2023 NIHIL dikarenakan kegiatan tersebut berada dan dilaksanakan oleh Provinsi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XI Provinsi Jawa Timur)



		425	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	NIHIL	Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya Tahun 2023 NIHIL dikarenakan kegiatan tersebut be-rada dan dilaksanakan oleh Provinsi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Balai Peles-tarian Kebudayaan Wil. XI Provinsi Jawa Timur)
		426	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	NIHIL	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum Tahun 2023 NI-HIL dikarenakan kegiatan tersebut berada dan dilaksanakan oleh Provinsi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XI Provinsi Jawa Timur)
		427	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	NIHIL	Peningkatan Akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum Tahun 2023 NIHIL dikarenakan kegiatan tersebut berada dan dilaksanakan oleh Provinsi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XI Provinsi Jawa Timur)



		428	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	NIHIL		Peningkatan Akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum Tahun 2023 NIHIL dikarenakan kegiatan tersebut berada dan dilaksanakan oleh Provinsi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XI Provinsi Jawa Timur)
		429	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	NIHIL		Pengelolaan, Pengamanan , pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum Tahun 2023 NI-HIL dikarenakan kegiatan tersebut berada dan dilaksanakan oleh Provinsi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XI Provinsi Jawa Timur)
		430	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	NIHIL		
		431	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	11 Objek		Jumlah objek PK (disebarluaskan+d ikaji+dikayakan keberagamannya) sebanyak 11 objek



		432	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	8 objek	Jumlah objek Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan sebanyak 8 objek, 1. Tradisi lisan, 2. Pengetahuan Tradisional, 3. Adat Istiadat, 4. Manuskrip, 5. Seni, 6. Cagar Budaya, 7. Ritual, 8. Bahasa Daerah
		433	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	NIHIL	Layanan Perizinan Membawa Cagar Budaya Provinsi ke luar Provinsi dengan Dukungan Data Tahun 2023 NIHIL dikarenakan kegiatan layanan perizinan membawa cagar budaya ke luar dae-rah Kabupaten/Kota tidak pernah / belum ada pengajuan.
		434	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	107	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) sebanyak 107
		435	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemuaran)	NIHIL	Perlindungan Cagar Budaya Kabupaten/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemu-garan) Tahun 2023 NIHIL dikarenakan kegiatan tersebut berada dan dilaksanakan oleh Provinsi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XI Provinsi Jawa



						Timur)
		436	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan sebanyak 1 objek		Jumlah cagar budaya dimanfaatkan sebanyak 1 objek yaitu Candi Pari
		437	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Pembentukan tim Pendaftaran Cagar Budaya sebanyak 1 Tim		Pembentukan tim Pendaftaran Cagar Budaya sebanyak 1 Tim
		438	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	NIHIL		Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Tahun 2023 NIHIL dikarenakan kegiatan tersebut berada dan dilaksanakan oleh Provinsi (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wil. XI Provinsi Jawa Timur)

22. URUSAN PERPUSTAKAAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	Perpustakaan	439	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	154.54%		
		440	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1241 Kegiatan		
		441	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpusatakaan	19.75%		
		442	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.06%		



		443	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	194.21%		
		444	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0		
		445	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	938 eksemplar		
		446	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		

23. URUSAN KEARSIPAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	Kearsipan	447	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100.00%		Presentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip tercapai 100%
		448	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100.00%		Presentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip tercapai 100%
		449	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	100.00%		Presentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN tercapai 100%
		450	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100.00%		Presentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik tercapai 100%
		451	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	100%		Jumlah daftar arsip in-aktif usul musnah terdapat 250 berkas, maka pemusnahan arsip yang sesuai NSPK : $250 \text{ Berkas} / 250 \text{ Berkas} \times 100\% = 100\%$



		452	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	100%	Telah dilakukan Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi pada tahun 2021 dan 2022, maka penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi : $(2933+2194) / 5127 \times 100\% = 100\%$
		453	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	100%	Terdapat 2 SOP dalam pelayanan kearsipan yaitu SOP Penyajian Arsip dan SOP Peminjaman Arsip, maka Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK sebanyak 100% $(2 \text{ SOP} / 2 \text{ SOP} \times 100\% = 100\%)$



		454	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100%	Jumlah daftar pencarian statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK terdapat 6 Berkas, maka pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK : $6 \text{ Berkas} / 6 \text{ Berkas} \times 100\% = 100\%$
		455	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0%	Belum dilaksanakan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK : $0 \text{ Berkas} / 0 \text{ Berkas} \times 100\% = 0\%$



		456	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	104%	Jumlah autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten / kota yang sesuai NSPK terdapat 156 Berkas, maka autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten / kota yang sesuai NSPK : 156 Berkas / 150 Berkas x 100% = 104%
--	--	-----	--	------	--

24. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	Pemberdayaan masyarakat dan desa	457	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa tahun sebelumnya	0		
		458	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0		
		459	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0		
		460	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0		
		461	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi	0		



			jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			
		462	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	12953		
		463	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0		
		464	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	234		

25. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30	Kelautan dan Perikanan	465	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota yang diterbitkan	1790 Bidang Usaha		Pada tahun ini pencatatan ijin usaha perikanan tidak dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Sendiri, Melainkan dilaksanakan Satu Pintu Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo. Melalui Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB)
		466	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100.00%		Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki TPI (Tempat Pelelangan Ikan) melainkan hanya tempat pendaratan dan penjualan ikan (Depo Pasar Ikan)



		467	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan	500 Peserta Pelatihan	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pemberdayaan sebanyak 500 peserta yang terbagi pada 13 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Dibandingkan dengan tahun 2022, pada tahun ini mengalami kenaikan
		468	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	0 ekor	Jumlah benih tawar dan payau sebanyak 0 ekor diarenakan di Kabuapten Sidoarjo tidak menghasilkan benih ikan sendiri melainkan mendatangkan dari luar daerah
		469	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	20 RTP	Data rekapitulasi RTP nelayan yang melaksanakan diversivifikasi usaha di bidang perikanan sejumlah 20 RTP

26. URUSAN PARIWISATA

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	Pariwisata	470	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	15793		Data wisatawan gabungan dari hotel, restoran dan destinasi
		471	Persentase tenaga kerja di sektor parwisata yang disertifikasi	30.32%		Data Jumlah Tenaga Kerja dari Dinas Tenaga Kerja
		472	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	9.40%		Data pembekalan sektor pariwisata dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata



		473	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0		Tidak ada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat baik dari Disporapar maupun CSR
		474	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	3		
		475	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	77		UMKM Industri Kreatif Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo
		476	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	695		Jumlah infrastruktur tersedia meliputi infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas pariwisata
		477	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	8136		Data Dari Dinas Perizinan
		478	Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	0		Masih belum pernah mengikuti maupun menyelenggarakan event luar negeri
		479	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	39		Obyek Wisata yang di monitoring oleh Disporapar

27. URUSAN PERTANIAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32	Pertanian	480	Penerbitan izin usaha pertanian	934 bidang usaha		Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian sebanyak 934 bidang usaha



		481	Persentase prasarana yang digunakan	100.00%		Persentase prasarana yang digunakan adalah sebesar 100%
		482	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100.00%		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota sebesar 100 %
		483	Prasaran pertanian yang digunakan	10 Unit gedung Kantor		Jumlah prasarana pertanian yang digunakan sebanyak 10 unit
		484	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	16 Unit Alat Mesin Pertanian (Alsintan)		Hibah dalam bentuk alsintan dengan sumber dana dari APBN TA. 2023
		485	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100.00%		Telah dilaksanakannya vaksinasi terhadap hewan ternak di 18 Kecamatan

28. URUSAN KEHUTANAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33	Kehutanan	486	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	bukan kewenangan		
		487	Pemulihan ekosistem pada Tahura	bukan kewenangan		
		488	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	bukan kewenangan		
		489	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Bukan kewenangan		

29. URUSAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	Energi dan Sumber Daya Mineral	490	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Bukan kewenangan		



30. URUSAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
35	Perdagangan	491	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	100.00%		Tidak ada pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Kabupaten Sidoarjo selama Tahun 2023
		492	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c)	100.00%		Tidak ada pengajuan permohonan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) untuk waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri sehingga tidak ada STPW untuk waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan.
		493	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	100.00%		
		494	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) c)	100.00%		
		495	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%		
		496	Persentase penerbitan TDG	100.00%		
		497	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0.00%		.



		498	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. b. Toko Swalayan	100.00%		Rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko Swalayan selama tahun 2023 sebanyak 16 rekomendasi
		499	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin: a. Pusat Perbelanjaan b.	100.00%		Rekomendasi Izin Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan selama tahun 2023 sebanyak 1 (satu) izin yaitu Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Sun City Mall Sidoarjo (Perpanjangan)
		500	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) b) c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	100.00%		Tidak ada pengajuan permohonan STPW untuk waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri sehingga tidak ada STPW untuk waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan
		501	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100.00%		IKK ini tidak dapat terisi karena Kabupaten Sidoarjo tidak ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA sesuai Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
		502	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	94%		
		503	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	100%		



		504	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100%		
--	--	-----	---	------	--	--

31. URUSAN PERINDUSTRIAN

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36	Perindustrian	505	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0%		Tidak ada pengajuan permohonan izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) sehingga tidak ada izin yang dipantau dan dianalisis maupun izin yang dikeluarkan
		506	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	50%		
		507	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100%		
		508	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0%		Tidak ada pengajuan permohonan Izin Perluasan Industri (IPUI) sehingga tidak ada izin yang dipantau dan dianalisis maupun izin yang dikeluarkan.



			Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	7.52%		
		509				

32. URUSAN TRANSMIGRASI

NO	URUSAN	NO	IKK OUTPUT	CAPAIAN	Sumber Data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37	Transmigrasi	510	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	bukan kewenangan		
		511	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	bukan kewenangan		
		512	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	bukan kewenangan		

II.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

1. URUSAN PENDIDIKAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100%	PD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,75 %	PD	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,89 %	PD	



		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	99,59%	PD	
--	--	--	--------	----	--

2. URUSAN KESEHATAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,5%	PD	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	PD	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	PD	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	PD	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	PD	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	PD	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	PD	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	PD	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	PD	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	PD	



		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	PD	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	PD	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	PD	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	PD	

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	85,66 %	PD	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab Sidoarjo mencapai 85,66%
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0 %	PD	Sidoarjo tidak memiliki kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi sehingga rasionya adalah nol
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	97,55 %	PD	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi mencapai 97,55%



		Presentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100	PD	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,81 %	PD	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100,00 %	PD	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	97,35 %	PD	Panjang Jalan Mantap tahun 2023 mencapai 97,35%
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	89.30%	PD	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	PD	

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	PD	
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	PD	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten tidak ada
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	80,38%	PD	



		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,0032%	PD	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	PD	

5. URUSAN KETENTRAMAN,KETERTIBAN,UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00 %	PD	Tidak ada hambatan yang berarti, menambah intensitas pembinaan dan penyuluhan dalam upaya penegakan perda dan perkada. masing masing personil dapat memanfaatkan tugas dan fungsi kinerjanya serta melaksanakan komunikasi secara intens bersama OPD terkait kegiatan yang dilaksanakan.
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00 %	PD	Tidak ada kendala atau hambatan berarti, Penambahan Intensitas Pembinaan dan Penyuluhan dalam upaya penegakan tibumtranmas dan Peningkatan kualitas SDM PPNS dengan pelatihan dan



					Bimtek serta koordinasi dengan PPNS yang ada di Kabupaten Sidoarjo menjadi langkah efektif untuk menunjang target yang telah ditetapkan.
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	PD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	PD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	PD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	PD	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13,36 menit	PD	

6. URUSAN SOSIAL

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	PD	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	PD	



7. URUSAN TENAGA KERJA

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%		
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	62.39%		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	148.791.533		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	79.79%		
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	67.99%		

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	72.38%		
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota (IKK Negatif)	100%		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) (IKK Negatif)	18.86		



9. URUSAN PANGAN

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0.52%	PD	

10. URUSAN PERTANAHAN

No	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	PD	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	PD	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%	PD	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	PD	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	PD	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	PD	

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	59,99		
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	100%		



		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	10.17%		
--	--	--	--------	--	--

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	99.89%		
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	51.72%		
		Kepemilikan akta kelahiran	98.20%		
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	77.78%		

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100	PD	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	5,26 %	PD	



14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,84	PD	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,59%	PD	
		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,42%	PD	

15. URUSAN PERHUBUNGAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0.8	PD	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,54	PD	

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	PD	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	PD	



		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	PD	
--	--	--	------	----	--

17. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	72.83%	PD	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	93,19%	PD	

18. URUSAN PENANAMAN MODAL

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	-2,87%	PD	

19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	57 %	PD	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	10,39 %	PD	
		Peningkatan prestasi olahraga	93	PD	



20. URUSAN STATISTIK

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	PD	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	PD	

21. URUSAN PERSANDIAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	83.79%	PD	

22. URUSAN KEBUDAYAAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Kebudayaan	Terlestariannya Cagar Budaya	100 %	PD	

23. URUSAN PERPUSTAKAAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	67,28	PD	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	57,03	PD	



24. URUSAN KEARSIPAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100%	PD	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	84%	PD	

25. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	99.17%	PD	

26. URUSAN PARIWISATA

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	86.19%	PD	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	68.13%	PD	
		Tingkat Hunian Akomodasi	58.21%	PD	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3.54%	PD	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	6.94%	PD	



27. URUSAN PERTANIAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	674.48078	PD	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-61.89%	PD	

28. URUSAN KEHUTANAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	Kehutanan		NIHIL	PD	BUKAN KEWENANGAN

29. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		NIHIL	PD	BUKAN KEWENANGAN

30. URUSAN PERDAGANGAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100 %	PD	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	84.79%	PD	



		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100 %	PD	
--	--	---	-------	----	--

31. URUSAN PERINDUSTRIAN

No. (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Capaian (4)	Sumber data (5)	KET (6)
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	0.83%	PD	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	115.54 %	PD	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	PD	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	PD	



		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0%	PD	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	PD	

32. URUSAN TRANSMIGRASI

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32	TRANSMIGRASI		NIHIL	PD	BUKAN KEWENANGAN

II.2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	8.56%	PD	
		Rasio PAD	40.85%	PD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP level 3	PD	



		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP level 3	PD	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	61.68%	PD	
		Opini Laporan Keuangan	10 WTP	PD	

2. URUSAN PENGADAAN

No. (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Capaian (4)	Sumber data (5)	KET (6)
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	PD	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	1811.21%	PD	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	67.84%	PD	
		Prosentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Ne dan geri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	9.69%	PD	



3. URUSAN KEPEGAWAIAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	59.15%	PD	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	27.25%	PD	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	79.44%	PD	

4. URUSAN MANAJEMEN KEUANGAN

No.	Urusan	IKK Outcome	Capaian	Sumber data	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	4.008 %	PD	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	5.98 %	PD	
		Assets Management	4	PD	



		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	10.20%	PD	
--	--	--	--------	----	--

5. URUSAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK

No. (1)	Urusan (2)	IKK Outcome (3)	Capaian (4)	Sumber data (5)	KET (6)
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	93.37%		
		Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah	100.00%		



II.2.4. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.

Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capain kinerjanya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang



digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 90,01%	Sangat Baik
2	80,01% s.d 90%	Baik
3	70,01% s.d 80%	Cukup
4	Kurang dari 75 %	Kurang

Sumber : PERBUP NO.06 TAHUN 2021

Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Sidoarjo Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Sidoarjo merupakan kinerja tahun ke-3 pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Secara rata-rata capaian seluruh kinerja tujuan atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah 117,78%, sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah sebesar 103,20%, yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun data detail hasil pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
	MISI 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha					
	TUJUAN 1	:	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha				
	Indikator Kinerja		Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	BB (70,1)	BB (75,38)	107,53 % MENPAN RB
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintah	1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A (81)	BB (77,5)	95,68 % MENPAN RB



	an yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital	2	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	100%	BPK
		3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,81	85,63 (3,42)*	89,76 %	KPK
		4	Status Kinerja LPPD	Kategori	Sangat Tinggi (4,3)	Tinggi (3,78)	87,90 %	BPKP
		5	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,45	3,11	90,14 %	MENPAN RB
		6	Indeks Inovasi Daerah	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%	MENPAN RB
		7	Tingkat Maturitas SPIP	Kategori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100%	BPK
2	Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	A-	A-	100%	MENPAN RB
	MISI 2	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan						
	TUJUAN 2	:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Percepatan Industri dan Perdagangan serta Mendorong Potensi Lokal melalui Pengembangan Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian dan Perikanan					
	Indikator Kinerja :	1	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	2,89	6,16	213,15 %	BPS
		2	Indeks Gini	Indeks	0,347	0,359	96,54 %	BPS



3.	Berkembangnya Perdagangan, Industri, Investasi, Pertanian dan Perikanan	1.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,22	16,08	99,14 %	BPS
		2.	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	52,81	52,11	98,67 %	BPS
		3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	2,82	1,67	59,22 %	BPS
		4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1,25	-(2,87)	44,00 %	BKPM
4.	Berkembangnya Koperasi, Usaha Mikro dan Kemandirian Desa	1.	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	1,98	2,06	104,04 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		2.	Persentase Koperasi Berkualitas	%	24,69	24,96	101,09 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		3.	Persentase Desa Mandiri	%	13,98	47,80	341,92 %	KEMENDES
	TUJUAN 3	:	Terciptanya Lapangan Kerja yang berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan					
	Indikator Kinerja	1.	Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	%	10,09	8,05	126,15 %	BPS
		2.	Persentase Penduduk Miskin	%	5,4	5,00	107,41 %	BPS
5.	Terserapnya Tenaga Kerja untuk		Persentase Tenaga Kerja	%	89,91	91,95	102,27 %	BPS



	Mengatasi Penganggu ran		Yang Terserap di sembilan sektor					
6.	Menurunnya Penduduk Miskin		Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	94,60	95,00	100,42 %	BPS
	MISI 3	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan						
	TUJUAN 4	:	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan					
	Indikator Kinerja	1 .	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,772	0,843	109,20 %	BPS
		2 .	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	59,81	58,99	98,63 %	BPS
7.	Tersedianya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	1 .	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,760	0,823	108,29 %	BAPPEDA
		2 .	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	86,60	95,60	110,39 %	BAPPEDA
		3 .	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	72,32	80,91	111,88 %	BAPPEDA
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Terhadap Bencana	1 .	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,54	54,32	105,39 %	DLHK
		2 .	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,16	81,98	96,27 %	DLHK
		3 .	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,12	24,42	90,04 %	DLHK
		4	Indeks	Indeks	92,53	98,12	93,96	BNPB



		.	Resiko Bencana	s			%	
	MISI 4	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya						
	TUJUAN 5	:	Terwujudnya Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Merata serta Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lainnya					
	Indikator Kinerja	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,92	81,88	101,19 %	BPS
9.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,41	14,97	97,14 %	BPS
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,23	10,78	95,99 %	BPS
10.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,19	75,36	100,23 %	BPS
11.	Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam masyarakat	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,95	94,68*)	99,72 %	BPS
	MISI 5	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.						
	TUJUAN 6	:	Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat					
	Indikator Kinerja	1	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	85,00	85,15	100,18 %	Bappeda
12.	Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat	1	Indeks Toleransi	Indeks	80,22	83,29	103,83 %	Bappeda
		2	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	63,58	90,92	143%	Bappeda



13.	Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram	1	Indeks Rasa Aman	Indeks	78,97	81,86	103,66 %	Bappeda
-----	--	---	------------------	--------	-------	-------	----------	---------

Keterangan :

*) : Realisasi menggunakan realisasi tahun 2022

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 pencapaian terhadap 6 (enam) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan, diketahui 5 (lima) indikator dalam katagori Sangat Berhasil, 2 (dua) indikator dalam katagori Berhasil dan terdapat 2 (dua) indikator yang belum dirilis hasilnya. Jika dirata-rata capaian kinerja tujuan tercapai 118,88% atau Sangat Berhasil. Sedangkan pencapaian terhadap 13 (tiga belas) sasaran dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 12 (dua belas) indikator sasaran dinilai Sangat Berhasil, 12 (dua belas) indikator katagori Berhasil, 1 (satu) indikator dalam katagori Cukup dan 6 (enam) indikator yang belum dirilis hasilnya oleh Kementrian atau lembaga terkait. Berdasarkan hasil penilain diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dirata-rata capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 106,93% atau dalam katagori Sangat Berhasil. Jika dilihat dari ketercapaian tujuan dan sasaran dengan 9 Indikator Kinerja dan 31 indikator sasaran telah diperoleh nilai rata-rata sebesar 112%, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Sangat Berhasil.

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDING DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Berikut adalah penjabaran terkait capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 terdapat 9 IKU yang menjadi tolak ukur keberhasilan utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 3. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2020	2021	2022	2023			Keterangan
						Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	B	B	B	BB (70,1)	BB (75,38)	107,53	Sangat Baik



2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-3,69	4,21	7,53	2,89	6,16	213,15	Sangat Baik
3	Indeks Gini	Poin	0,34	0,34 7	0,37 3	0,347	0,359	96,54	Sangat Baik
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,97	10,8 7	8,80	10,09	8,05	126,15	Sangat Baik
5	Tingkat Kemiskinan	%	5,59	5,93	5,36	5,40	5,00	107,41	Sangat Baik
6	Indeks Infrastruktur	Poin	0,747	0,79 3	0,79 2	0,772	0,843	109,20	Sangat Baik
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	59,78	59,8 1	57,5 4	59,81	58,99	98,63	Sangat Baik
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	80,29	80,6 5	81,0 2	80,92	81,88	101,19	Sangat Baik
9	Indeks Kesalehan Sosial	Poin	N/A	82,0 3	84,2 3	85	85,15	100,18	Sangat Baik

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas, untuk 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja kabupaten Sidoarjo tahun 2023, sebagai berikut :

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 7 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 target: dan;
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sedangkan penjabaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKD) berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026 IKD yang menjadi tolak ukur keberhasilan Program Perangkat Daerah pada tahun anggaran 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Keterangan
1	Nilai SAKIP	Katagori	A	BB	95,68	Sangat Baik



	Kabupaten		(81)	(77,5)		
2	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Baik
3	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,81	85,63 (3,42)*	89,76	Belun Release
4	Status Kinerja LPPD	Katagori	Sangat Tinggi (4,3)	Tinggi (3,78)	87,90	Baik
5	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,45	3,11	90,14	Sangat Baik
6	Indeks Inovasi Daerah	Katagori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Baik
7	Tingkat Maturitas SPIP	Katagori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100	Sangat Baik
8	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Katagori	A- (Sangat Baik)	A- (Sangat Baik)	100	Sangat Baik
9	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	16,22	16,08	99,14	Sangat Baik
10	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Industri	%	52,81	50,11	94,89	Sangat Baik
11	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dalam arti luas.	%	2,82	1,67	59,22	Kurang
12	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	1,25	-(2,87)	44,00	Kurang
13	Persentase Usaha Mikro Mandiri	%	1,98	2,06	104,04	Sangat Baik



14	Persentase Koperasi Berkualitas	%	24,69	24,96	101,09	Sangat Baik
15	Persentase Desa Mandiri	%	13,98	47,80	341,92	Sangat Baik
16	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap di sembilan sektor	%	89,91	91,95	102,27	Sangat Baik
17	Persentase penduduk diatas Garis Kemiskinan (GK)	%	94,60	95,00	100,42	Sangat Baik
18	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	0,760	0,823	108,29	Sangat Baik
19	Indeks Infrastruktur Pendidikan	Indeks	86,60	95,60	110,39	Sangat Baik
20	Indeks Infrastruktur Kesehatan	Indeks	72,32	80,91	111,88	Sangat Baik
21	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,54	54,32	105,39	Sangat Baik
22	Indeks Kualitas Udara	Indeks	85,16	81,98	96,27	Sangat Baik
23	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	27,12	24,42	90,04	Sangat Baik
24	Indeks Resiko Bencana	Indeks	92,53	98,12	93,96	Sangat Baik
25	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,41	14,97	97,14	Sangat Baik
26	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,23	10,78	95,99	Sangat Baik
27	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,19	75,36	100,23	Sangat Baik
28	Indeks	Indeks	94,95	94,68*)	99,72	Belum



	Pembangunan Gender (IPG)					Release
29	Indeks Toleransi	Indeks	80,22	83,29	103,83	Sangat Baik
30	Indeks Pelestarian Budaya	Indeks	63,58	90,92	143	Sangat Baik
31	Indeks Rasa Aman	Indeks	78,97	81,86	103,66	Sangat Baik

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026

Sedangkan untuk capaian 31 Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 13 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 4 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 12 target: dan;
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 2 target. karena belum dirilis oleh kementerian dan lembaga terkait, oleh karena itu angka yang ada pada table dengan symbol *) merupakan realisasi tahun 2022.

D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA YANG TELAH DICAPAI)

- Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai good and clean governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan kebijakan terbaru untuk peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi, yaitu penguatan dampak dari implementasi Reformasi Birokrasi, melalui Reformasi Birokrasi Berdampak, sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.

Sebagaimana peraturan dimaksud, Reformasi Birokrasi dibagi menjadi 2 (dua) komponen penilaian, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi General, yang terbagi menjadi sub komponen penilaian, sebagai berikut :
 - a) Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
 - b) Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
 - c) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 - d) Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
 - e) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - f) Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - g) Tingkat Digitalisasi Arsip
 - h) Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
 - i) Indeks Kualitas Kebijakan
 - j) Indeks Reformasi Hukum
 - k) Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - l) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang / Jasa
 - m) Indeks Sistem Merit
 - n) Indeks Pelayanan Publik
 - o) Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
 - p) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - q) Opini BPK
 - r) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
 - s) Indeks BerAKHLAK
 - t) Survei Penilaian Integritas
 - u) Survey Kepuasan Masyarakat
2. Reformasi Birokrasi Tematik, yang terbagi menjadi beberapa tematik sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional, sebagai berikut :
 - a) Pengentasan Kemiskinan
 - b) Peningkatan Investasi
 - c) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, dengan fokus Penanganan Stunting
 - d) Pengendalian Inflasi



e) Penggunaan Produk Dalam Negeri

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dari Kementerian PAN dan RB, komponen penilaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3 Perolehan Nilai RB tahun 2023

Komponen	Nilai
RB General	65,86
RB Tematik	9,52
Total Nilai (Index RB)	75,38

Sumber : website kemenPAN-RB <https://www.portalrb.id>

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 telah tercapai memperoleh predikat BB (Sangat Baik) dengan Nilai 75,38 dari yang ditargetkan BB (Sangat Baik). Capaian dimaksud terus meningkat, hingga tahun 2022 masih berada pada kategori B dan pada tahun 2023 mencapai BB. Adapun perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020 – 2023 sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3. 1 Tren Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2023



Sumber data : LHE RB Kementerian PAN & RB 2020-2023

Dari realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



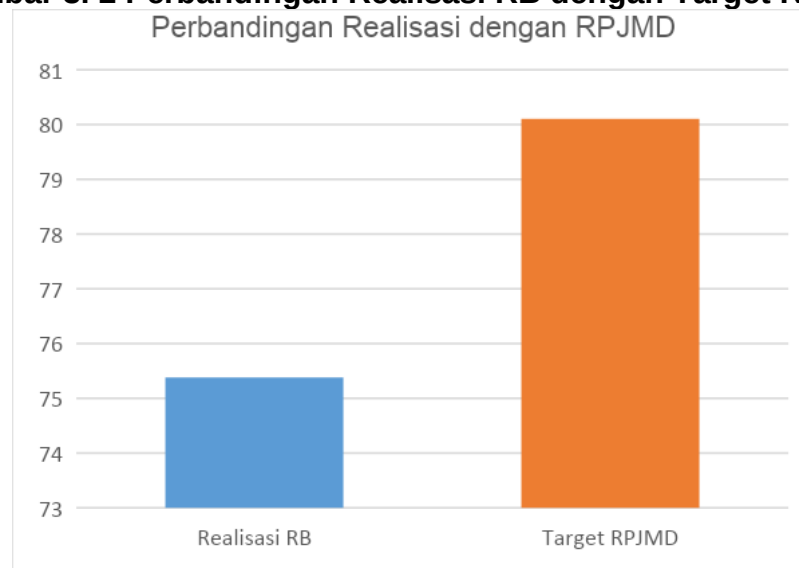
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	BB (75,38)	A (80,1)	94,1

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026

Dari tabel diatas diketahui target akhir RPJMD tahun 2026 adalah A atau 80,1 sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 75,38 (BB) sehingga persentase capaian nya adalah 94,1%. Dengan demikian untuk mencapai target akhir RPJMD, masih dibutuhkan nilai sebesar 4,72 dalam kurun waktu 3 tahun. Berikut adalah grafik pencapaian Reformasi Birokrasi dibandingkan dengan target RPJMD

Gambar 3. 2 Perbandingan Realisasi RB dengan Target RPJMD



Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026

Beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain:

1. **Kurangnya kepemimpinan yang kuat.**

Kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat penting dalam mendorong implementasi reformasi birokrasi.

2. **Keterbatasan sumber daya.**

Implementasi reformasi birokrasi membutuhkan sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia, teknologi, maupun keuangan.



3. Budaya dan sikap pegawai yang resisten terhadap perubahan.

Pegawai yang enggan berubah dan tidak mendukung reformasi birokrasi dapat membuat implementasi reformasi birokrasi terhambat.

4. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja dan instansi.

Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan banyak unit kerja maupun instansi pemerintah yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.

5. Masalah hukum dan regulasi.

Reformasi birokrasi seringkali melibatkan perubahan pada regulasi dan peraturan. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan RB kedepan, beberapa hal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain sebagai berikut :

1. Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tematik Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023;
2. Menyusun rencana aksi pembagian peran pada Unit Kerja/Perangkat Daerah untuk masing-masing tema sesuai Road Map Reformasi Birokrasi;
3. Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis secara daring maupun luring, baik itu melalui zoom meeting maupun pendampingan secara langsung berupa desk ataupun asistensi terkait implementasi RB pada Unit Kerja/Perangkat Daerah;
4. Mendorong peningkatan kinerja Perangkat Daerah dengan memasukkan nilai SAKIP, IPP, ZI dan RB sebagai komponen penilaian kinerja perangkat daerah untuk digunakan salah satu komponen pemberian *reward and punishment* sebagaimana Perbup Sidoarjo Nomor 106 Tahun 2022;
5. Mengintensifkan koordinasi antar unit kerja/perangkat daerah maupun dengan instansi pemerintah lainnya, sebagai upaya percepatan pelaksanaan RB.

Dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan pertama tersebut yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha telah didukung oleh 2 Sasaran Strategis, sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas dan Berbasis Digital;
2. Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.



A.1 Sasaran I : Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas dan Berbasis Digital.

Tabel 3. 5 Indikator Kinerja Sasaran I

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
1.	Nilai SAKIP Kabupaten	Katagori	A (81)	BB (77,5)	95,68	MENPAN RB
2.	Opini Atas Laporan BPK	Opini	WTP	WTP	100	BPK
3.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	Angka	3,81	85,63 (3,42)*)	89,76	KPK
4.	Status Kinerja LPPD	Katagori	Sangat Tinggi (4,3)	Tinggi (3,78)	87,90	BPKP
5.	Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	3,45	3,11	90,14	MENPAN RB
6.	Indeks Inovasi Daerah	Katagori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	MENPAN RB
7.	Tingkat Maturitas SPIP	Katagori	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100	BPK

*) : Realisasi merupakan realisasi tahun 2022

A.1.1 Indikator Kinerja I : Nilai SAKIP Kabupaten

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana evaluasi tersebut meliputi 4 (empat) komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berikut adalah hasil Evaluasi SAKIP oleh Kementrian PAN RB Tahun 2023 :

Tabel 3. 6 Capaian Nilai SAKIP Tahun 2023

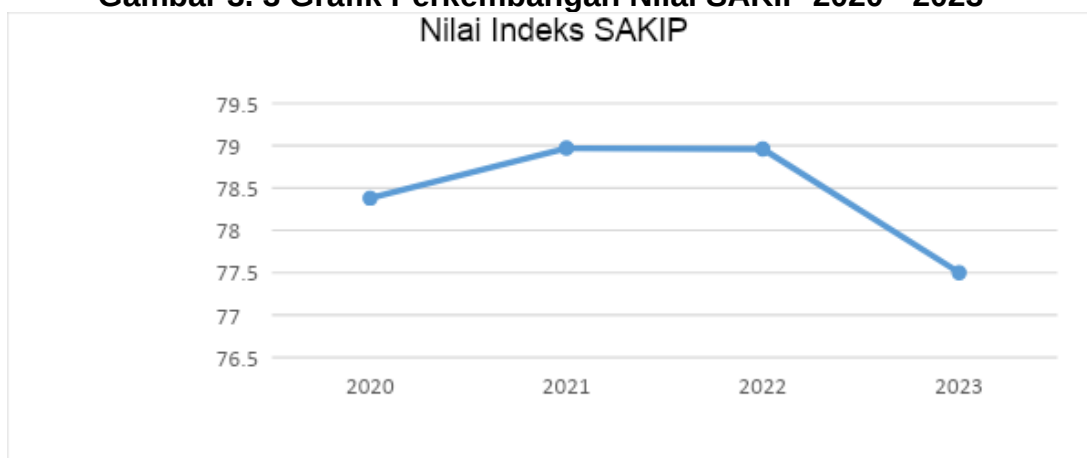
Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	26,31	26,31
b. Pengukuran Kinerja	30	23,81	23,18
c. Pelaporan Kinerja	15	12,34	11,45
d. Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50	16,56
Nilai Hasil Evaluasi	100	78,96	77,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber : LHE SAKIP Kementrian PAN & RB Tahun 2023



Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebenarnya telah menerapkan Akuntabilitas Kinerja sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi. Adapun Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2023 didapatkan sebanyak 1 perangkat Daerah yang mendapatkan katagori AA, 24 Perangkat Daerah yang mendapatkan katagori A, 23 Perangkat Daerah dengan predikat BB, dan 1 Perangkat Daerah dengan katagori B. Adapun perkembangan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020 – 2023 sebagaimana grafik berikut :

Gambar 3. 3 Grafik Perkembangan Nilai SAKIP 2020 - 2023
Nilai Indeks SAKIP



Sumber data : LHE SAKIP Kementerian PAN & RB 2020-2023

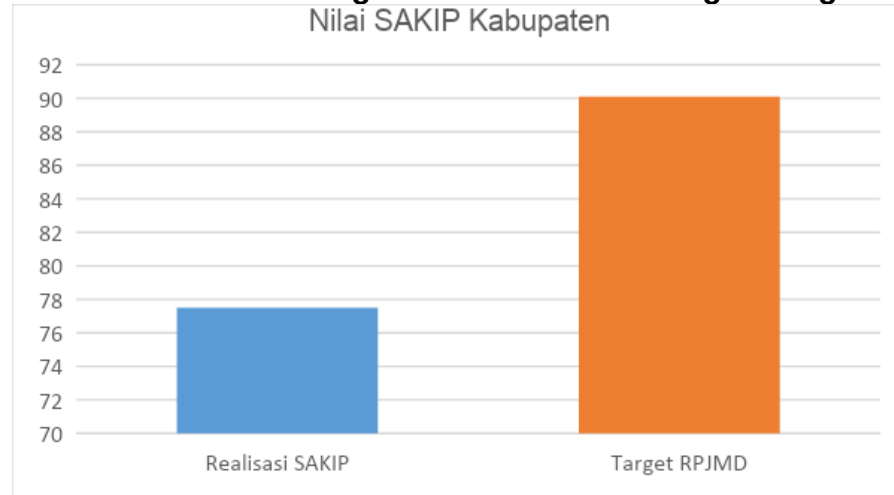
Dari realisasi tahun 2023 jika dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD, maka capaian pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Nilai SAKIP Kabupaten	BB (77,5)	AA (90,1)	86,01

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026

Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD



Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026

Berdasarkan perbandingan nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo serta dengan target akhir RPJMD di tahun 2026, Kabupaten Sidoarjo harus dapat meningkatkan nilai SAKIP. Adapun beberapa faktor kendala yang menjadi penghambat peningkatan nilai SAKIP Tahun 2023 antara lain :

1. Kurangnya komitmen pimpinan
2. Belum adanya integrasi data kinerja dalam mendukung mekanisme manajemen kinerja serta mengukur kinerja individu
3. Belum Optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan satgas SPIP ke seluruh perangkat daerah
4. Belum optimalnya aplikasi e-monev untuk evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan.

Demi mendukung peningkatan kualitas SAKIP di Tahun 2024 maka perlu adanya upaya yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo yaitu :

1. Menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP tahun 2023 dengan mengkoordinasikan dan menyusun rencana aksi atas rekomendasi dimaksud;
2. Melakukan bimbingan dan pendampingan pelaksanaan SAKIP pada pejabat perencanaan Perangkat Daerah;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang sudah dibuat setiap tribulan;
4. Melakukan reviu penjenjangan kinerja yang sudah ada disesuaikan dengan Permen PANRB Nomor 89 Tahun 2021;
5. Upgrading aplikasi PAKSI sebagai aplikasi e-SAKIP di Kabupaten Sidoarjo, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan SAKIP;



- Memasukkan nilai SAKIP Perangkat Daerah sebagai salah satu nilai kinerja perangkat daerah yang berpengaruh pada besaran pemberian TPP (Perbup Sidoarjo nomor 106 Tahun 2022);
- Memberikan reward dan punishment bagi Perangkat Daerah atas nilai SAKIP yang dicapai.

A.1.2 Indikator Kinerja II : Opini Atas Laporan BPK

Opini atas audit BPK untuk Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Tahun 2022 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dalam kurun waktu 10 tahun Kabupaten Sidoarjo selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan konsistensi dan komitmen dalam mengelola keuangan yaitu Laporan Keuangan (LK) telah tersaji secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku umum. Berikut adalah hasil Perolehan Opini BPK pada tahun 2023:

Tabel 3.8 Perolehan Nilai Opini BPK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Opini Atas Laporan BPK	WTP	WTP	100

Sumber data : Laporan Hasil Penilaian oleh BPK Tahun 2023

Berdasarkan hasil Laporan BPK Tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa Opini atas Audit BPK sudah berhasil, begitu juga dengan capaian yang sudah memenuhi Target Akhir RPJMD. Penjelasan capaian dengan perbandingan Target Ahir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Opini Atas Laporan BPK	WTP	WTP	100

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026



Gambar 3.4 Grafik Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD



Sumber data : Laporan Hasil Penilaian oleh BPK Tahun 2023

Tren capaian Opini atas Audit BPK Tahun 2020-2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10 Capaian Opini BPK tahun 2020- 2023

Tahun	Opini atas Audit BPK
2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026

Berdasarkan tren Hasil Penilaian Opini BPK Tahun 2020-2023 dan, Kabupaten Sidoarjo harus mempertahankan predikat WTP.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam mempertahankan predikat WTP :

1. Bimtek dan asistensi pengelolaan dan penatausahaan laporan keuangan secara berkala kepada seluruh pengelola keuangan pada seluruh OPD dan Desa/Kelurahan
2. Bimtek dan asistensi penatausahaan aset daerah secara berkala
3. Kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi lainnya terhadap pengelolaan keuangan.

A.1.3 Indikator Kinerja III : Survey Eksternal Persepsi Korupsi

Tujuan survei persepsi korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

Sampai dengan bulan Maret Tahun 2024, Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi Kabupaten Sidoarjo masih belum release. Maka data penilaian yang



digunakan adalah data Kapabilitas Nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi Kabupaten Sidoarjo tahun 2022, sesuai dengan tabel dibawah:

Tabel 3.11 Perolehan Nilai Survei Eksternal Persepsi Korupsi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,81	3,42*	89,76

Sumber data : Laporan Hasil Survei oleh KPK Tahun 2022

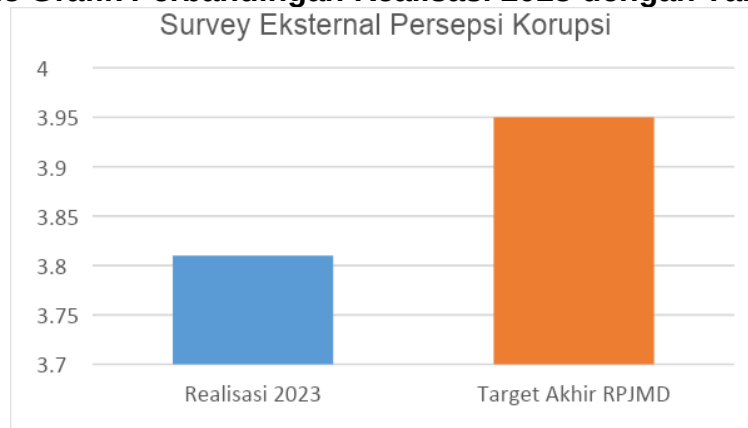
Hasil Survey Eksternal Persepsi Korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 mendapatkan nilai 85,63 atau (dikoversi **3,42**) dari yang target 2022 sebesar **3,81**, sehingga tercapai **89,76** persen, artinya nilai Survey Eksternal Persepsi Korupsi Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 masih belum tercapai sebagaimana target yang ditetapkan. begitu juga dengan ketercapaian Target Akhir RPJMD. Penjelasan capaian dengan perbandingan Target Ahir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,81	3,95	86,58

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026

Gambar 3.5 Grafik Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD

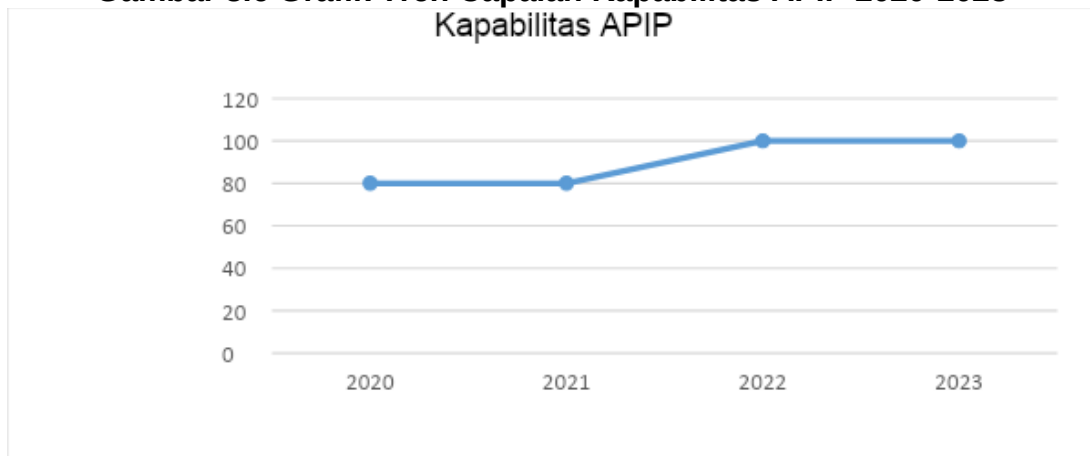


Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo

Jika dilihat dari capaian Survey Eksternal Persepsi Korupsi dengan nilai **3,81** yaitu masuk dalam **level 3 (Integrated)** yang mencerminkan bahwa Survey Eksternal Persepsi Korupsi Kabupaten Sidoarjo sudah mampu melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Berikut Tren capaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sidoarjo adalah sebagaimana grafik berikut:



Gambar 3.6 Grafik Tren Capaian Kapabilitas APIP 2020-2023
Kapabilitas APIP



Sumber data : Laporan Hasil Survei oleh KPK Tahun 2022

Berdasarkan ketercapaian Hasil Survey Eksternal Persepsi Korupsi pada tahun 2023, Kabupaten Sidoarjo harus dapat meningkatkan nilai Survei.

Berikut kami jabarkan beberapa upaya yang telah dilakukan agar dapat meningkatkan kapabilitas APIP yaitu :

1. Penguatan peran setda sebagai fungsi koordinasi dan kebijakan sebagaimana merujuk pada permendagri nomor 56 tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kaupaten atau Kota, dan Perbup nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja secretariat daerah kabupaten sidoarjo bahwa LPPD menjadi target kinerja setda, Target kinerja masing – masing asisten sesuai fungsi koordinasi dan diteruskan menjadi sasaran kinerja kepala bagian sesuai fungsi koordinasi
2. Sekretariat LPPD bagian pemerintahan melakukan sosialisasi, pendampingan dibantu oleh masing – masing bagian di sekretariat daerah
3. Dilakukan evaluasi berkala dalam perbaikan pencapaian LPPD

A.1.4 Indikator Kinerja IV : Status Kinerja LPPD

Dalam menilai kinerja kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun. Berikut kami jabarkan hasil capaian Kinerja LPPD tahun 2022 :

Tabel 3.13 Perolehan Hasil LPPD

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Status Kinerja LPPD	4,3	3,78	87,90

Sumber data : Laporan Hasil LPPD oleh BPKP Tahun 2022



Hasil Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilakukan oleh BPKP, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 mendapatkan nilai **3,78** dari yang target 2022 sebesar **4,3**, sehingga tercapai **87,90** persen, artinya Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 masih belum tercapai sebagaimana target yang ditetapkan, tetapi mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun 2022. Berikut kami jabarkan tabel perbandingan kenaikan Hasil LPPD tahun 2022 – 2023

Tabel 3.14 Perolehan hasil LPPD 2022 - 2023

Tahun	Kepmendagri	Nilai	Status Kinerja	Peringkat
2022 (Kinerja Tahun 2021)	Nomor : 100.2.1.3-1109 Tahun 2023	3,6100	Tinggi	Ke-5 Nasional
2023 (Kinerja Tahun 2022)	Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023	3,7800	Tinggi	Ke-2 Nasional

Sumber data : Laporan Hasil LPPD oleh BPKP Tahun 2022

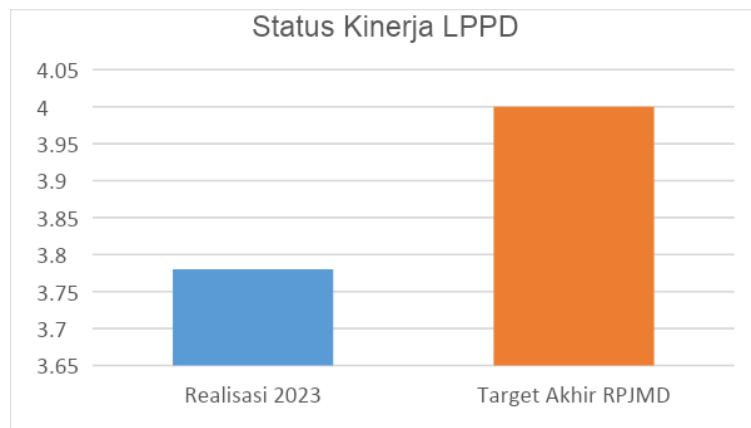
Sedangkan ketercapaian dengan Target Akhir RPJMD. Penjelasan capaian dengan perbandingan Target Akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Status Kinerja LPPD	3,78	4,00	9,45

Sumber data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021 – 2026

Gambar 3.7 Grafik Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD



Sumber data : Laporan Hasil Penilaian oleh BPKP Tahun 2023



Berdasarkan ketercapaian Hasil Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2022, Kabupaten Sidoarjo harus dapat meningkatkan hasil laporan LPPD.

Upaya yang telah dilakukan dalam menunjang peningkatan Hasil Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) antara lain :

1. Penguatan peran setda sebagai fungsi koordinasi dan kebijakan sebagaimana merujuk pada permendagri nomor 56 tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota, dan Perbup nomor 48 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat daerah kabupaten sidoarjo bahwa LPPD menjadi target kinerja setda, Target kinerja masing – masing asisten sesuai fungsi koordinasi dan diteruskan menjadi sasaran kinerja kepala bagian sesuai fungsi koordinasi
2. Sekretariat LPPD bagian pemerintahan melakukan sosialisasi, pendampingan dibantu oleh masing – masing bagian di sekretariat daerah
3. Dilakukan evaluasi berkala dalam perbaikan pencapaian LPPD

A.1.5 Indikator Kinerja V : Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) ingin mendorong ketiga unsur tersebut agar lebih terintegrasi dan efisien, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, Keandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah Kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pada Tahun 2023 Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan kategori menjadi B(Baik), berikut kami jabarkan realisasi Indeks SPBE 2023 :



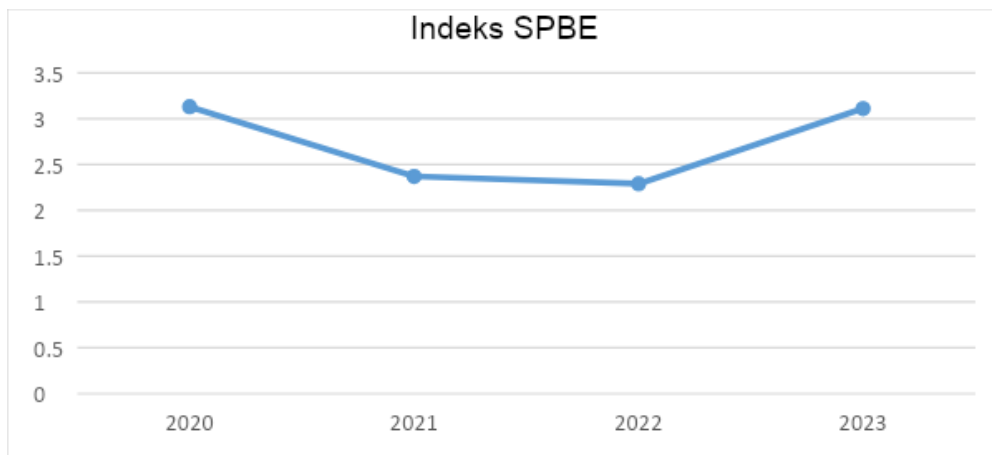
Tabel 3.15 Nilai Indeks SPBE 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,45	3,11	90,14

Sumber data : Laporan Hasil LPPD oleh KemenPAN&RB Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai **3,11** dari target **3,45** sehingga belum memenuhi target, namun apabila dibandingkan dengan capain tahun 2022 yaitu **2,29** maka terdapat peningkatan yang sangat tinggi yaitu 0,82 poin atau sekitar 35,81%. Berikut perkembangan nilai SPBE Kabupaten Sidoarjo:

Gambar 3.8 Grafik Tren Nilai Indeks SPBE



Sumber Data : LHE SPBE KEMENPANRB

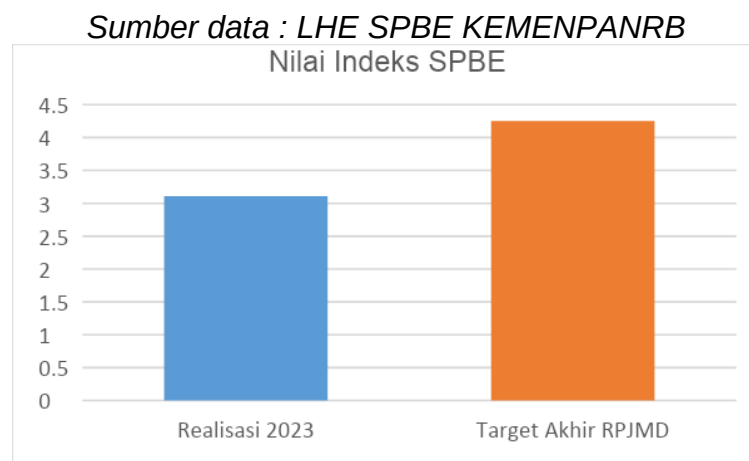
Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa nilai indeks SPBE mnegalami peningkatan signifikan, begitu juga ketercapaian realisasi dengan Target Akhir RPJMD sebesar 4,25 dapat disimpulkan bahwa realisasi 2023 Penjabaran detail dapat dilihat pada tabel dibawah:

Tabel 3.16 Perbandingan realisasi dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,45	4,25	73,18

Sumber Data : RPJMD Kabupaten 2021-2025

Gambar 3.9 Grafik Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD



Melihat grafik diatas realisasi 2023 masih dibawah dari target akhir RPJMD, sehingga harus dilakukan upaya agar penerapan SPBE di Kabupaten Sidoarjo dapat meningkat, yaitu:

1. Menyusun draft Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Sidoarjo direncanakan pada program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023. Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Melaksanakan harmonisasi internal untuk seluruh pemangku terkait khususnya Tim Koordinasi SPBE dan Tim Asesor Internal SPBE Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun data dukung seluruh indikator sesuai dengan ketentuan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Jika sudah ada rincian terhadap capaian masing-masing indikator, akan segera dilakukan pemenuhan dan optimalisasi data dukung seluruh indikator kepada pemangku terkait.

A.1.6 Indikator Kinerja VI : Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruaran didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatanya.

Pada Tahun 2023 Indeks Inovasi Daerah ditargetkan mendapat predikat Sangat Inovatif dan berdasarkan hasil penilaian indeks inovasi daerah tahun 2023,



Kabupaten Sidoarjo mendapatkan kategori Sangat Inovatif. Berikut adalah data realisasi indeks inovasi daerah tahun 2023:

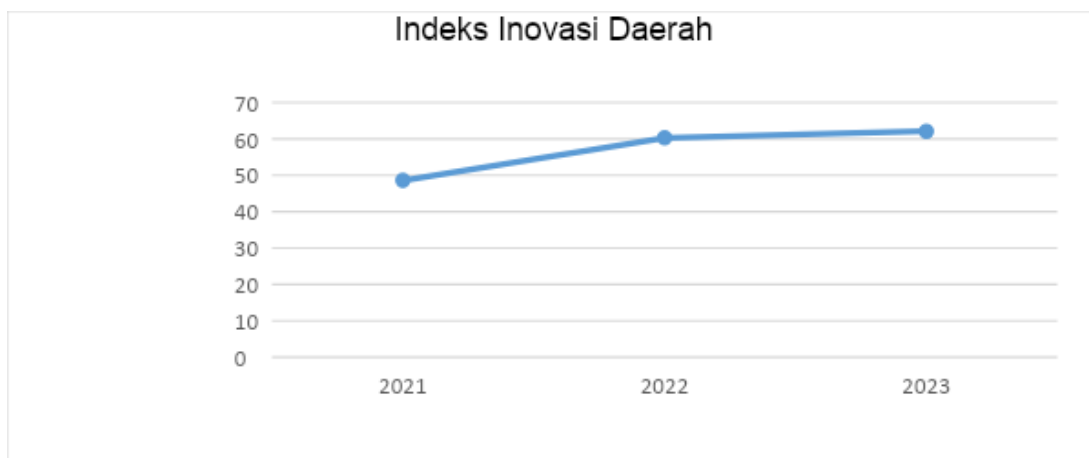
Tabel 3.17 Nilai Indeks Inovasi Daerah 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100

Sumber data : Laporan Hasil IID oleh KemenPAN&RB Tahun 2023

Indeks Inovasi Daerah tiap tahun realisasinya meningkat, dapat dilihat tren kenaikan dari tahun 2021 sampai 2023 seperti pada grafik dibawah :

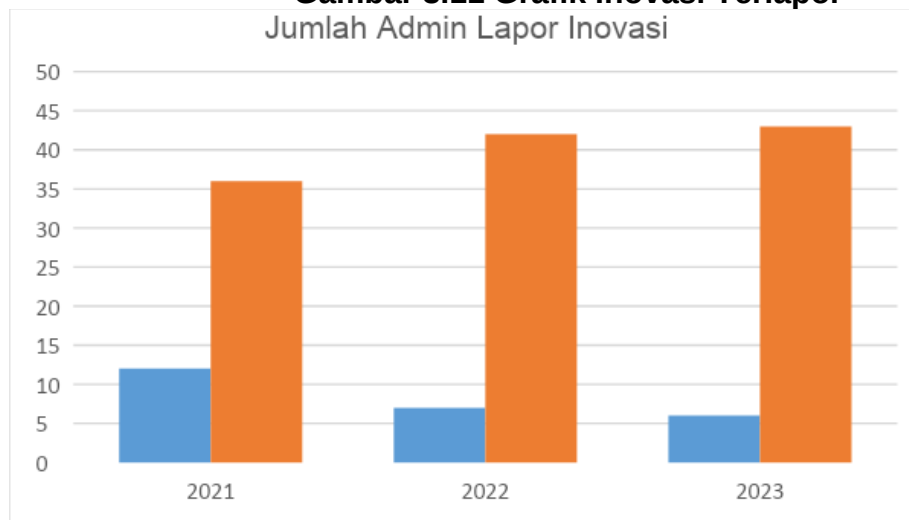
Gambar 3.10 Grafik Kenaikan IID Tahun 2021-2023



Sumber data : Laporan Hasil IID oleh KemenPAN&RB Tahun 2023

Meskipun capaian IID Kabupaten Sidoarjo Th 2023 meningkat, tetapi secara nasional peringkatnya turun dari peringkat 23 (2022) menjadi peringkat 27 (2023). Dikarenakan perkembangan jumlah partisipasi admin perangkat daerah dalam melaporkan inovasi pad aunit kerja masing – masing. Berikut adalah grafik jumlah admin yang melaporkan inovasi dari tahun 2021-2023 :

Gambar 3.11 Grafik Inovasi Terlapor



Sumber data : Laporan Hasil IID oleh KemenPAN&RB Tahun 2023



Melihat grafik diatas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi PD dalam pelaporan inovasi meningkat setiap tahun dari 75% (2021), menjadi 85,71% (2022), dan 87,76% (2023). Serta capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2023 sangat berhasil dan sudah melampaui target akhir RPJMD. Berikut adalah penjabaran perbandingan Realisasi IID Tahun 2023 dengan Target AKhir RPJMD :

Perbandingan Realisasi IID 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Inovasi Daerah (IID)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100

Sumber data : Dokumen RPJMD 2021-2025

Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD

Sumber data : Laporan Penilaian IID



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2023 sudah sesuai dengan target akhir RPJMD, akan tetapi masih perlu adanya optimalisasi pelaporan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2024, antara lain:

1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Inovasi;
2. Mengoptimalkan Partipasi PD
Perbup 31/2023 mengamanatkan bahwa 1 PD 1 inovasi tiap tahun;
3. Meningkatkan Partisipasi Inovator
 - Mengintegrasikan dan mengkolaborasi inovasi yang berkaitan dalam menunjang sasaran strategis daerah dengan tetap menjaga keberlanjutan inovasi daerah
 - Mereplikasi inovasi yang ada di perangkat daerah untuk berbagi pakai dengan perangkat daerah lainnya. Contoh : Inovasi Kopi Pahit



direplikasi oleh seluruh Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.Menjaga Keberlanjutan Inovasi

4. Meningkatkan Partisipasi Inovator
5. Dilakukan kompetisi inovasi daerah setiap tahun
6. Memperkuat kelembagaan yang menangani inovasi yang semula ditangani oleh fungsional ahli muda diusulkan dalam bentuk bidang yang tergabung dalam bappeda dengan mengkolaborasikan menjadi BAPERIDA kabupaten sidoarjo sebagaimana persetujuan dari BRIN dengan Tindak Lanjut Proses RAPERBUP kelembagaan di bagian hukum.

A.1.7 Indikator Kinerja VII : Tingkat Maturitas SPIP

Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control*.

Realisasi SPIP Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100

Sumber data : Laporan Hasil SPIP oleh BPK Tahun 2023

Tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi atas maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP dengan nilai **3,15** yang berarti bahwa capaian telah mencapai target. Capaian level 3 (terdefinisi) dimaksud mencerminkan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah mampu mengelola kinerja dan merumuskan sasaran kinerja beserta indikator dan target dengan baik, serta mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif. Pengendalian telah dibangun dengan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko pada seluruh kegiatan organisasi, namun belum pada sasaran strategis PD maupun Sasaran Strategis Pemerintah Daerah, serta belum pada risiko kecurangan.

Dapat dilihat dari capaian SPIP sejak tahun 2021 – 2023 bahwa SPIP Kabupaten Sidoarjo telah mencapai Level 3 (terdefinisi)

Nilai SPIP 2021 - 2023

Tahun	Opini atas Audit BPK
2021	Level 3 (terdefinisi)
2022	Level 3 (terdefinisi)



2023	Level 3 (terdefinisi)
------	-----------------------

Sumber data : Laporan Hasil SPIP oleh BPK Tahun 2021-2023

Begitu juga dengan ketercapaiannya dengan Target Akhir RPJMD yang akan dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 Terdefinisi	Level 3 Terdefinisi	100

Sumber data : Dokumen RPJMD 2021 - 2025

Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD

Sumber data : Laporan Hasil SPIP oleh BPK Tahun 2023



Jika melihat dari capaian SPIP Tahun 2023 dan perbandingan dengan Target akhir RPJMD yang telah memenuhi target, dapat disimpulkan bahwa capaian SPIP Kabupaten Sidoarjo **Berhasil**. Untuk mencapai level 4 dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), organisasi perlu melakukan upaya yang lebih lanjut dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern mereka. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini termasuk:

1. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPIP yang telah ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan area peningkatan. Kemudian, terapkan perbaikan yang diperlukan dan pastikan ada mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas perbaikan tersebut secara berkala.
2. Penguatan Manajemen Risiko: Memperkuat manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara proaktif. Ini termasuk mengembangkan kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan



manajemen risiko, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses ini.

3. Penggunaan Teknologi Informasi: Mengintegrasikan teknologi informasi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi dan kehandalan SPIP. Sistem informasi manajemen risiko, sistem pelaporan keuangan terintegrasi, dan sistem otomatisasi proses bisnis lainnya dapat membantu memperkuat SPIP.
4. Peningkatan Kepatuhan: Memastikan bahwa organisasi mematuhi semua regulasi, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Ini mencakup memperkuat pemahaman staf tentang tanggung jawab mereka, memberikan pelatihan secara teratur, dan memastikan kepatuhan secara konsisten dievaluasi dan dipantau.
5. Peningkatan Komunikasi dan Keterlibatan Stakeholder: Meningkatkan komunikasi dan keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan terkait SPIP, termasuk manajemen senior, staf, dan auditor. Ini dapat mencakup penyelenggaraan pertemuan rutin, pelatihan, dan memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
6. Pengembangan Budaya Etika dan Integritas: Mendorong budaya organisasi yang didasarkan pada etika dan integritas yang tinggi. Ini termasuk mempromosikan kesadaran akan pentingnya kepatuhan, menghargai perilaku yang etis, dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran.

A.2 Sasaran II: Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha.

Indikator Kinerja Sasaran II

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Sumber Data
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Katagori	A-	A-	100	KEMENPAN RB

Sumber Data : Hasil Penilaian IPP Kementrian PAN&RB

A.2.1 Indikator Kinerja I : Indeks Pelayanan Publik (IPP)

dengan pendampingan intensif terhadap lokus yang ditunjuk oleh Kemenpan selaku role model untuk pemenuhan PEKPP Nasional. Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2023 mendapatkan nilai 4,43 atau kategori A- (Sangat Baik).

Kabupaten Sidoarjo juga melakukan PEKPP Mandiri pada instansional dengan memperdomani Permenpan RB nomor 29 tahun 2022 tentang PEKPP dan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPP.



PEKPP mandiri dilakukan terhadap 110 UPP yang dinilai pada komitmen tata kelola, pesentasi dan wawancara Kepala UPP, Survey kualitas pelayanan pada UPP. Untuk mempersiapkan lokus yang sewaktu – waktu ditunjuk kemenpan untuk dievaluasi nasional.

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tanggal 21 Desember 2023 Nomor : 188/639/438.1.1.3/2023, berikut rekap hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 :

**Rekap Hasil Penilaian Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2023**

No	Unit Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah	Katagori	Keterangan
1.	Role Model	3	A	Pelayanan Prima
2.	Perangkat Derah (Dinas)	13	A-	Sangat Baik
		1	B	Baik
		5	B-	Baik (Dengan Catatan)
3.	Perangkat Daerah Penunjang (Badan, Sekretariat dan Inspektorat)	6	A-	Sangat Baik
		2	B	Baik
		1	B-	Baik (Dengan Catatan)
4.	Kecamatan	8	A-	Sangat Baik
		6	B	Baik
		4	B-	Baik (Dengan Catatan)
5.	Puskesmas	1	A	Pelayanan Prima
		20	A-	Sangat Baik
		7	B	Baik
		2	B-	Baik (Dengan Catatan)
6.	Kelurahan	2	A-	Sangat Baik
		3	B	Baik
		16	B-	Baik (Dengan Catatan)
		6	C	Cukup
		1	-	Pembinaan
7.	BUMD	1	B	Baik
		2	-	Pembinaan

Sumber Data : SK Bupati tentang Penilaian IPP PD Tahun 2023

Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo untuk

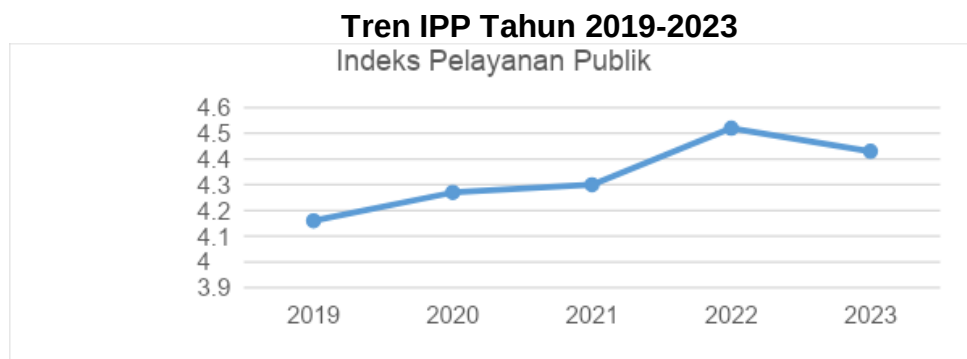


tahun 2023 mendapatkan nilai **4,43** atau kategori **A- (Sangat Baik)**. Penjabaran terkait realisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Realisasi IPP Tahun 2023			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A-	A-(Sangat Baik)	100

Sumber data : Laporan Hasil IPP KemenPAN&RB 2023

Jika dilihat dari tabel capaian diatas maka IPP Tahun 2023 sudah **Tercapai**, jika melihat perolehan IPP sejak tahun 2019 mengalami peningkatan yang dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Sumber data : Laporan Hasil IPP oleh KemenPAN&RB Tahun 2023

Jika dilihat dari tren capaian IPP dari 5 tahun terakhir yang mengalami peningkatan, bisa disimpulkan bahwa IPP Tahun 2025 dapat melampaui target akhir RPJMD, berikut penjabaran perbandingan realisasi 2023 dengan target akhir RPJMD:

Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD			
Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A-	A-	100

Sumber data : Laporan Hasil IPP KemenPAN&RB 2023

Berikut upaya – upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) :

1. Memberikan pelatihan kepada staf pelayanan publik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal, manajemen waktu, dan penanganan konflik. Pendidikan terkait prinsip-prinsip pelayanan pelanggan juga perlu diperkuat.
2. Meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik dengan menyediakan informasi yang jelas tentang proses, standar pelayanan, dan hak-



hak pelanggan. Selain itu, penting juga untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk menjamin pelayanan yang berkualitas.

3. Mendorong budaya pelayanan yang proaktif dan responsif di kalangan staf pelayanan publik. Ini melibatkan pemberian penghargaan atas pelayanan yang baik, serta pembinaan sikap empati dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat.

D. ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran sesuai visi misi Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023, telah didukung dengan anggaran sebesar Rp. **6.683.181.703.425,00** dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.428.624.553.179,00	1.364.279.158.575,00	95,50
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	746.634.195.082,00	712.667.617.291,00	95,45
	Program Pengelolaan Pendidikan	681.651.090.897,00	651.275.009.034,00	95,54
	Program Pengembangan Kebudayaan	38.722.200,00	38.572.250,00	99,61
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	297.600.000,00	295.015.000,00	99,13
	Program Pengendalian Perijinan	2.945.000,00	2.945.000,00	100,00
2	DINAS KESEHATAN	372.931.615.958,00	348.315.176.112,00	93,40
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	194.267.740.140,00	191.347.725.493,00	98,50
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	165.623.038.781,00	145.235.065.049,00	87,69
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.450.119.602,00	10.205.189.588,00	89,13
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	215.162.914,00	191.901.186,00	89,19
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.375.554.521,00	1.335.294.796,00	97,07
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	1.364.036.063.815,00	1.215.613.746.415,00	89,12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	667.288.701.730,00	595.733.498.408,00	89,28
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	21.335.552.000,00	20.805.571.150,00	97,52
4	RUMAH SAKIT SIDOARJO BARAT	124.737.626.551,00	117.247.204.843,00	94,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.214.412.904,00	32.767.758.785,00	88,05
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	82.743.877.285,00	79.800.205.434,00	96,44
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.779.336.362,00	4.679.240.624,00	97,91



5	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	389.763.719.451,00	331.458.951.633,00	85,04
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.157.327.818,00	19.144.843.657,00	90,49
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15.015.509.714,00	13.976.471.881,00	93,08
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	58.215.308.394,00	53.554.533.285,00	91,99
	Program Penyelenggaraan Jalan	295.375.573.525,00	244.783.102.810,00	82,87
6	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	356.530.420.683,00	324.153.357.621,24	90,92
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.850.774.383,00	11.007.396.233,00	92,88
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	51.782.872.477,00	40.618.767.910,00	78,44
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.384.036.121,00	2.325.637.562,00	97,55
	Program Pengembangan Permukiman	27.240.249.684,00	24.199.897.360,00	88,84
	Program Penataan Bangunan Gedung	3.383.903.561,00	2.780.572.822,00	82,17
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	300.000.000,00	293.777.000,00	97,93
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.759.368.414,00	1.423.743.924,00	80,92
	Program Pengembangan Perumahan	2.790.380.180,00	2.410.573.508,00	86,39
	Program Kawasan Permukiman	99.950.000,00	69.375.000,00	69,41
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.464.725.000,00	2.421.625.000,00	98,25
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)	11.452.085.093,00	10.779.231.511,00	94,12
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	175.000,00	175.000,00	100,00
	Pogram Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	85.219.432,00	75.065.536,00	88,08
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	240.936.681.338,00	225.747.519.255,24	93,70
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.612.907.916,00	15.774.982.085,00	94,96
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Keterlibatan Umum	12.588.368.453,00	12.084.594.198,00	96,00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	22.413.047.244,00	21.254.675.506,12	94,83
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.652.911.325,00	11.930.519.548,12	94,29
	Program Penanggulangan Bencana	1.989.217.012,00	1.761.466.949,00	88,55
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	7.770.918.907,00	7.562.689.009,00	97,32
9	DINAS SOSIAL	47.971.977.806,00	45.750.161.761,00	95,37
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.419.844.879,00	6.969.407.596,00	93,93
	Program Pemberdayaan Sosial	2.442.137.500,00	2.424.591.875,00	99,28
	Program Rehabilitasi Sosial	8.462.361.195,00	8.013.272.618,00	94,69



	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	29.034.872.719,00	27.752.909.526,00	95,58
	Program Penanganan Bencana	406.514.970,00	384.279.450,00	94,53
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	206.246.543,00	205.700.696,00	99,74
10	DINAS TENAGA KERJA	17.821.218.941,00	15.198.574.510,00	85,28
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.032.875.328,00	7.622.780.101,00	94,89
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	92.775.000,00	92.475.000,00	99,68
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	5.679.625.102,00	4.590.184.669,00	80,82
	Program Penempatan Tenaga Kerja	774.786.474,00	710.184.000,00	91,66
	Program Hubungan Industrial	3.234.632.037,00	2.176.425.740,00	67,29
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	6.525.000,00	6.525.000,00	100,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	35.322.916.987,00	33.481.119.418,00	94,79
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.363.609.232,00	6.623.403.094,00	89,95
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	54.229.320,00	47.622.300,00	87,82
	Program Perlindungan Perempuan	357.650.165,00	328.471.683,00	91,84
	Program Pemenuhan Hak Anak	118.699.900,00	116.724.900,00	98,34
	Program Perlindungan Khusus Anak	267.775.000,00	244.796.250,00	91,42
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	26.332.099.810,00	25.310.224.131,00	96,12
	Program Pembinaan Keluarga Sejahtera	83.013.600,00	81.425.000,00	98,09
	Program Pengendalian Kependudukan	745.839.960,00	728.452.060,00	97,67
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	45.183.463.066,00	43.471.007.803,00	96,21
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.772.424.061,00	29.903.390.310,00	97,18
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.328.616.490,00	1.314.443.550,00	98,93
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	108.305.155,00	106.554.400,00	98,38
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.891.683.805,00	3.725.296.590,00	95,72
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.310.873.231,00	1.297.386.340,00	98,97
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.730.515.639,00	4.699.910.738,00	99,35
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	444.909.774,00	423.010.231,00	95,08
	Program Penyuluhan Pertanian	2.596.134.911,00	2.001.015.644,00	77,08
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	134.599.355.712,00	112.034.935.744,00	83,24
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80.469.857.082,00	62.145.876.700,00	77,23
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.402.159.657,00	2.221.547.782,00	92,48



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	39.875.536.383,00	36.788.253.433,00	92,26
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	114.676.982,00	112.269.216,00	97,90
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	154.663.032,00	153.009.136,00	98,93
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	149.570.248,00	149.461.404,00	99,93
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	274.504.701,00	184.806.618,00	67,32
	Program Pengelolaan Persampahan	11.158.387.627,00	10.279.711.455,00	92,13
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	13.951.421.368,00	13.356.172.684,00	95,73
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.769.506.575,00	12.302.160.234,00	96,34
	Program Pendaftaran Penduduk	312.503.756,00	271.861.600,00	86,99
	Program Pencatatan Sipil	276.324.997,00	248.479.500,00	89,92
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	593.086.040,00	533.671.350,00	89,98
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18.986.113.185,00	17.706.453.402,00	93,26
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.657.036.943,00	6.098.024.184,00	91,60
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	9.378.788.000,00	8.888.808.480,00	94,78
	Program Penataan Desa	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	71.783.960,00	71.583.600,00	99,72
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.859.504.282,00	2.629.037.138,00	91,94
16	DINAS PERHUBUNGAN	130.419.020.375,00	120.709.531.834,00	92,56
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.683.178.881,00	16.680.899.514,00	94,33
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	108.351.631.681,00	99.859.382.691,00	92,16
	Program Pengelolaan Pelayaran	29.205.300,00	28.827.900,00	98,71
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	4.355.004.513,00	4.140.421.729,00	95,07
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.591.849.058,00	25.257.424.037,00	94,98
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.382.349.279,00	10.385.116.360,00	91,24
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	3.725.791.466,00	3.590.812.171,00	96,38
	Program Aplikasi Informatika	11.342.253.313,00	11.140.448.006,00	98,22
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	84.455.000,00	84.405.000,00	99,94
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	57.000.000,00	56.642.500,00	99,37
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	36.542.178.639,00	35.219.783.963,00	96,38



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.826.954.746,00	7.041.392.798,00	89,96
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	32.910.000,00	30.310.000,00	92,10
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	45.931.991,00	45.610.800,00	99,30
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	664.855.000,00	657.544.325,00	98,90
	Program Pengembangan UMKM	5.949.203.800,00	5.840.314.600,00	98,17
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	365.285.544,00	360.281.910,00	98,63
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	21.657.037.558,00	21.244.329.530,00	98,09
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	13.414.059.599,00	12.497.371.107,00	93,17
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.546.985.599,00	10.729.304.781,00	92,92
	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.263.374.000,00	1.190.274.326,00	94,21
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	354.700.000,00	337.955.200,00	95,28
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	105.000.000,00	95.836.800,00	91,27
	Program Promosi Penanaman Modal	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	69.433.976.109,00	66.658.535.974,00	96,00
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.018.675.766,00	10.241.304.038,00	92,94
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	7.923.838.380,00	7.678.858.892,00	96,91
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	48.214.045.326,00	46.506.965.252,00	96,46
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	888.988.837,00	861.382.522,00	96,89
	Program Pemasaran Pariwisata	238.427.800,00	221.296.730,00	92,81
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	150.000.000,00	148.728.540,00	99,15
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.338.503.951,00	11.021.289.315,00	97,20
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.413.624.173,00	8.118.024.250,00	96,49
	Program Pembinaan Perpustakaan	2.034.358.586,00	2.019.566.188,00	99,27
	Program Pengelolaan Arsip	890.521.192,00	883.698.877,00	99,23
22	DINAS PERIKANAN	18.815.705.976,00	18.096.679.835,00	96,18
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.163.662.435,00	6.729.789.179,00	93,94
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	155.515.385,00	155.455.250,00	99,96
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.417.118.556,00	10.155.518.552,00	97,49



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	123.162.806,00	119.527.668,00	97,05
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	956.246.794,00	936.389.186,00	97,92
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	49.546.125.248,00	47.408.845.698,00	95,69
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.300.799.211,00	24.815.469.690,00	98,08
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	11.680.434.483,00	11.294.953.654,00	96,70
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	286.842.964,00	285.850.180,00	99,65
	Program Pengembangan Ekspor	2.266.429.432,00	2.208.454.756,00	97,44
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	344.817.783,00	336.257.322,00	97,52
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	9.471.238.875,00	8.279.158.846,00	87,41
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	119.137.500,00	113.776.250,00	95,50
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	76.425.000,00	74.925.000,00	98,04
24	SEKRETARIAT DAERAH	341.559.720.237,00	313.834.112.216,25	91,88
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	66.790.530.385,00	64.842.270.620,00	97,08
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	40.340.228.587,00	38.508.298.118,00	95,46
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	6.186.151.488,00	5.718.542.076,00	92,44
25	SEKRETARIAT DPRD	98.613.660.476,00	87.339.422.593,00	88,57
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	60.535.739.800,00	54.957.753.088,00	90,79
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	38.077.920.676,00	32.381.669.505,00	85,04
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.481.816.138,00	17.953.984.916,25	97,14
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.533.672.687,00	12.132.171.300,00	96,80
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.298.209.300,00	1.259.852.810,00	97,05
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.028.746.548,00	3.967.241.881,25	98,47
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	621.187.603,00	594.718.925,00	95,74
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	822.462.794.955,00	803.820.604.683,00	97,73
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.435.775.010,00	16.817.819.972,00	96,46
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	800.280.834.708,00	782.723.934.739,00	97,81
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.746.185.237,00	4.278.849.972,00	90,15
28	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	59.022.404.426,00	53.171.751.245,00	90,09
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	46.907.854.764,00	43.105.009.006,00	91,89
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.114.549.662,00	10.066.742.239,00	83,10



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	15.231.116.399,00	13.928.568.083,00	91,45
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.378.708.527,00	10.878.894.309,00	95,61
	Program Kepegawaian Daerah	2.284.384.680,00	1.697.805.600,00	74,32
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.568.023.192,00	1.351.868.174,00	86,21
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	107.687.205.631,00	100.948.078.960,00	93,74
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.639.037.824,00	6.056.576.204,00	91,23
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.956.317.423,00	1.930.438.000,00	98,68
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	10.435.499.200,00	5.382.642.432,00	51,58
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85.495.968.215,00	84.592.629.114,00	98,94
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	418.609,00	417.500,00	99,74
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	3.159.964.360,00	2.985.375.710,00	94,47
31	INSPEKTORAT	94.645.194.486,00	89.707.039.287,00	94,78
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.269.011.008,00	16.554.839.794,00	95,86
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.500.906.893,00	1.075.360.250,00	71,65
32	KECAMATAN SIDOARJO	31.785.694.578,00	30.315.618.502,00	95,38
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22.742.480.456,00	21.812.882.620,00	95,91
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.030.397.727,00	635.627.617,00	61,69
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	7.563.263.855,00	7.440.705.725,00	98,38
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	70.857.500,00	70.357.500,00	99,29
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	159.142.540,00	159.142.540,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	219.552.500,00	196.902.500,00	89,68
33	KECAMATAN CANDI	6.518.710.743,00	6.056.074.417,00	92,90
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.785.176.686,00	5.389.527.822,00	93,16
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	631.794.057,00	571.444.095,00	90,45
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	46.790.000,00	40.340.000,00	86,22
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	54.950.000,00	54.762.500,00	99,66
34	KECAMATAN BUDURAN	5.618.723.545,00	5.039.411.350,00	89,69
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.439.023.948,00	4.877.503.050,00	89,68



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	106.234.057,00	92.277.800,00	86,86
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	46.855.500,00	44.158.500,00	94,24
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.297.540,00	20.212.000,00	94,90
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.312.500,00	5.260.000,00	99,01
35	KECAMATAN WONOAYU	5.822.629.487,00	5.432.130.290,00	93,29
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.018.848.590,00	4.737.113.062,00	94,39
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	521.238.397,00	470.324.728,00	90,23
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	169.615.000,00	125.765.000,00	74,15
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.802.500,00	56.802.500,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56.125.000,00	42.125.000,00	75,06
36	KECAMATAN KRIAN	10.743.827.355,00	9.962.199.335,00	92,72
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.066.457.888,00	8.681.998.610,00	95,76
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	270.570.397,00	156.198.231,00	57,73
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.046.092.500,00	1.029.907.500,00	98,45
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	193.956.570,00	57.044.994,00	29,41
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	82.475.000,00	15.275.000,00	18,52
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	84.275.000,00	21.775.000,00	25,84
37	KECAMATAN PORONG	10.174.734.834,00	8.910.003.964,00	87,57
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.398.220.184,00	7.312.055.865,00	87,07
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	453.592.850,00	337.545.100,00	74,42
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.131.175.000,00	1.085.863.699,00	95,99
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	81.150.000,00	69.217.500,00	85,30
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	101.746.800,00	97.171.800,00	95,50
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.850.000,00	8.150.000,00	92,09
38	KECAMATAN KREMBUNG	5.775.943.158,00	5.495.892.461,00	95,15
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.032.679.601,00	4.776.310.011,00	94,91
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	552.934.057,00	530.903.950,00	96,02



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	87.353.500,00	85.858.500,00	98,29
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	97.226.000,00	97.070.000,00	99,84
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.750.000,00	5.750.000,00	100,00
39	KECAMATAN JABON	5.030.563.270,00	4.302.608.727,00	85,53
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.427.599.213,00	3.987.549.877,00	90,06
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	545.121.557,00	269.633.850,00	49,46
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	35.305.000,00	30.925.000,00	87,59
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	22.537.500,00	14.500.000,00	64,34
40	KECAMATAN BALONGBENDO	5.679.860.163,00	5.035.184.363,00	88,65
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.716.028.956,00	4.465.203.763,00	94,68
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	851.906.207,00	458.670.600,00	53,84
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	41.587.500,00	41.387.500,00	99,52
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.337.500,00	69.922.500,00	99,41
41	KECAMATAN TARIK	5.701.561.656,00	4.926.752.121,00	86,41
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.746.342.599,00	4.354.279.871,00	91,74
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	644.134.057,00	384.780.750,00	59,74
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	293.310.000,00	171.111.500,00	58,34
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.775.000,00	16.580.000,00	93,28
42	KECAMATAN TAMAN	19.607.565.441,00	18.407.733.428,00	93,88
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.981.593.734,00	13.364.493.428,00	95,59
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	508.556.807,00	339.996.844,00	66,86
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.435.957.205,00	4.227.575.656,00	95,30
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	429.272.500,00	269.937.500,00	62,88
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63.325.195,00	62.235.000,00	98,28
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	188.860.000,00	143.495.000,00	75,98
43	KECAMATAN WARU	6.073.141.123,00	5.496.452.494,00	90,50
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.255.966.831,00	4.836.781.700,00	92,02



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	671.847.645,00	515.094.147,00	76,67
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	71.481.122,00	70.731.122,00	98,95
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	44.618.600,00	44.618.600,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	29.226.925,00	29.226.925,00	100,00
44	KECAMATAN GEDANGAN	6.693.906.566,00	6.157.303.594,00	91,98
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.478.465.909,00	5.197.826.144,00	94,88
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	590.192.657,00	459.897.150,00	77,92
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	78.975.000,00	76.425.000,00	96,77
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	86.810.500,00	85.740.300,00	98,77
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	459.462.500,00	337.415.000,00	73,44
45	KECAMATAN SEDATI	5.856.966.340,00	4.942.705.662,00	84,39
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.115.794.943,00	4.604.175.412,00	90,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	584.666.557,00	199.788.000,00	34,17
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	80.948.750,00	67.886.750,00	83,86
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	67.387.690,00	62.737.500,00	93,10
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.168.400,00	8.118.000,00	99,38
46	KECAMATAN TANGGULANGIN	6.204.807.923,00	5.753.329.449,00	92,72
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.561.402.923,00	5.260.534.449,00	94,59
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	541.905.000,00	393.745.000,00	72,66
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			#DIV/0!
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	101.500.000,00	99.050.000,00	97,59
47	KECAMATAN TULANGAN	6.056.499.664,00	5.643.355.256,00	93,18
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.818.176.857,00	5.415.715.475,00	93,08
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	136.296.557,00	128.259.825,00	94,10
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	73.710.000,00	71.109.956,00	96,47
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	21.716.250,00	21.670.000,00	99,79
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00



48	KECAMATAN PRAMBON	5.869.661.334,00	5.386.328.605,00	91,77
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.288.148.834,00	5.015.728.205,00	94,85
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	501.375.000,00	291.514.900,00	58,14
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	37.150.000,00	36.805.500,00	99,07
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.887.500,00	32.330.000,00	98,30
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.100.000,00	9.950.000,00	98,51
49	KECAMATAN SUKODONO	6.351.379.258,00	5.694.780.215,00	89,66
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.838.244.451,00	5.355.651.965,00	91,73
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	362.071.557,00	228.065.000,00	62,99
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	126.920.000,00	86.920.000,00	68,48
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.743.250,00	12.743.250,00	100,00
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00
	JUMLAH	6.683.181.703.425,00	6.189.599.103.262,10	92,61

Realisasi anggaran tahun 2023 pada 120 program/kegiatan tersebut diatas, rata-rata realisasi capaian nya adalah 92,61% dengan capaian kinerja rata-rata 103,20%, artinya penggunaan anggaran telah memenuhi target kinerja lebih dari 100%. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program kegiatan tersebut telah terjadi efektivitas dan efisiensi sumber daya anggaran sebesar 10,26% mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih baik.



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak mendapatkan Program dan Kegiatan yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun Program dan Kegiatan yang didapat dari Pemerintah Pusat berupa : Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Sedangkan Program dan Kegiatan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Sedangkan untuk Penugasan, selama tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan tugas pembantuan secara eksplisit kepada Desa / Kelurahan, yang diberikan dalam bentuk bantuan stimulan Pembangunan Desa / Kelurahan, baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat kemajuan pembangunan Desa / Kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat Desa / Kelurahan dalam proses pembangunan terus digalang melalui kegiatan Musrenbang.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian atau Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND). Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif. Penetapan rencana penerapan SPM dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait dan untuk lebih memperkuat bahwa indikator didalam SPM dijalankan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

A. Bidang Urusan Pendidikan

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan
1	Pendidikan Dasar
2	Pendidikan Kesenjangan
3	Pendidikan Anak Usia Dini

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	2023



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		(SD/Mi,SMP/MTs)		
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2023
3	Pendidikan AnakUsia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2023

3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan danna pencapaian SPM oleh pemerintahn daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pendidikan Antara lain:

Mata Anggaran		Besar Anggaran
KAB. SIDOARJO		233,202,757,525
PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	23,715,070,000
2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	4,786,875,695
3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	13,905,000
4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	13,757,431,956
PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR		
5	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	118,344,681,759
6	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	650,500,619
7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	12,163,541,669
8	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	27,450,818,947
9	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	7,023,656,956
PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN		
10	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	3,599,280,000
11	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	0
12	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	872,182,569



13	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	1,317,912,355
14	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	19,506,900,000

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pendidikan antara lain:

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH GEDUNG	JUMLAH KELAS	JUMLAH MURID	TENAGA PENGAJAR
1	Sekolah Dasar Negeri	464	4.131	110.829	6.033
2	Sekolah Dasar Swsata dan Sederajat	122	1.521	34.113	2.047
3	Sekolah Menengah Pertama Negeri	47	1.264	42.273	1.988
4	Sekolah Menengah Pertama Swasta	143	2.676	34.241	4.132
5	Sekolah PAUD Negeri	2	15	276	19
6	Sekolah PAUD Swasta	1.625	5.669	64.347	5.034

5. Hasil Capaian

Hasil Caiapan adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

5.1 Realisasi Penerapan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2023			Keterangan
				Pembilan g	Penyebut	Nilai	
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/M	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	278630	278630	100%	Jumlah Warga Kabupaten/NegaraUsia 7-15 Tahunyangberpartisipasida lam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) JumlahWarga Kabupaten Usia 7-15Tahun



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2023			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
		Ts)					
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3197	3197	100 %	Jumlah Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam <u>Pendidikan kesetaraan</u> Jumlah Warga Kabupaten Usia 7 –18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) JumlahWarga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	57383	57383	100 %	Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi <u>dalam pendidikan PAUD</u> Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6Tahun

5.2 Realisasi Anggaran

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET	REALISASI	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8
	KAB. SIDOARJO			233,202,757,525	232,201,162,525	99.57 %
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			42,273,282,651	42,271,687,651	100.00 %
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD K2023542		23,715,070,000	23,715,070,000	100.00 %
		1	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	18,896,130,000	18,896,130,000	100.00 %
		2	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	282,440,000	282,440,000	100.00 %
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	4,536,500,000	4,536,500,000	100.00 %
	2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan K2023532		4,786,875,695	4,786,625,695	99.99 %



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

	1	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2,500,000	2,250,000	90.00 %
	2	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	4,784,375,695	4,784,375,695	100.00 %
	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K2023543	13,905,000	12,560,000	90.33 %
	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	3,500,000	3,200,000	91.43 %
	2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	6,250,000	5,435,000	86.96 %
	3	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	4,155,000	3,925,000	94.46 %
	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD) K2023541	13,757,431,956	13,757,431,956	100.00 %
	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	13,757,431,956	13,757,431,956	100.00 %
	3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	246,300,000	246,300,000	100.00 %
	6	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023534	650,500,619	650,500,619	100.00 %
	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	500,000,000	500,000,000	100.00 %
	2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	150,500,619	150,500,619	100.00 %
	7	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B) K2023535	12,163,541,669	12,163,541,669	100.00 %
	3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit	230,811,000	230,811,000	100.00 %



			1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran			
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	27,365,283,947	26,365,283,947	96.35 %
	8	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) K2023536		7,023,656,956	7,023,656,956	100.00 %
		2	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	1,293,850,000	1,293,850,000	100.00 %
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	7,860,000	7,860,000	100.00 %
	9	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan) K2023562		872,182,569	872,182,569	100.00 %
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	162,477,540	162,477,540	100.00 %
		4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	49,337,500	49,337,500	100.00 %
	10	Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan) K2023561		1,317,912,355	1,317,912,355	100.00 %
		1	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	1,317,912,355	1,317,912,355	100.00 %

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan Langkah Langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.



Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SPM di Bidang Pendidikan antara lain :

1. Dalam Proses Pengumpulan data :

Sumber data dari :

- a. Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
- b. Data kependudukan dari Dispendukcapil.
- c. Data Emis (Kemenag)

Terdapat beberapa permasalahan dari pengumpulan data, diantaranya;

- a. Data kependudukan yang diperlukan untuk menghitung APM, APK, APS berdasarkan klasifikasi usia PAUD 4-6 tahun, 5-6 tahun, SD sederajat 7-12 tahun, SMP sederajat 13-15 tahun, Kesetaraan 7-18 tahun. Data-data sesuai kriteria di atas tidak sesuai dengan aplikasi Dispendukcapil (SIK)
- b. Data siswa dari Emis kemenag kita tidak mendapatkan akses, untuk mendapatkan data siswa RA, MI, MTs secara manual

2. Dalam Proses Penghitungan Kebutuhan :

Perhitungan kebutuhan berdasar Renstra OPD. Pagu anggaran bersifat dinamis disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (APBD)

3. Dalam Pelaksanaan kegiatan :

Pada pelaksanaan kegiatan seringkali terkendala faktor teknis, misal harus menyiapkan peraturan bupati, atau SK bupati yang memerlukan waktu untuk penyelesaiannya sehingga kegiatan menunggu hingga selesainya Perbub atau SK sebagai dasar pelaksanaan dan pencairan anggaran.

4. Dalam Perencanaan Dan Penganggaran :

Terjadinya perubahan kebijakan yang mempengaruhi perencanaan dan anggaran, sebagai contoh adanya rasionalisasi anggaran di tahun 2022 dan 2023, sehingga terdapat kegiatan yang harus ditunda ataupun tidak dilaksanakan. Pada sub kegiatan penerapan SPM banyak yang tidak sesuai dengan sub kegiatan pada DPA secara spesifik



B. Bidang Urusan Kesehatan

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	100%	2023



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	100%	2023
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100%	2023



3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Kesehatan Antara lain:

No	MATA ANGGARAN		BESARAN ANGGARAN
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		7,288,983,731
1	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237	7,288,983,731
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	1,984,358,489
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	22,680,000
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	20,516,000
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	144,725,278
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	397,912,500
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	195,325,000
	7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	614,583,500
	8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	11,550,000
	9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	2,250,255,000
	10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	158,675,000
	11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	498,887,715
	12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	989,515,247



4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Kesehatan antara lain:

	FASILITAS KESEHATAN	
	RS DI KABUPATEN SIDOARJO	PUSKESMAN
Jumlah Fasilitas	31 Rumah Sakit	30 Puskesmas
Dokter Umum	1047	143
Dokter Gigi	450	61
Dokter Spesialis	734	-
Perawat	3.202	509
Bidan	586	505
Apoteker dan Tenaga Kefarmasian	478	79
Tenaga umum/admin	2.421	541

5. Hasil Capaian

Hasil Caiapan adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

5.1 Realisasi Penerapan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung g Jawab	Realisasi 2023			Keterangan
				Pembilan g	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	38485	38485	100%	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2023			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
							kurun waktu satu tahun yang sama
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	36855	36855	100%	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	36394	36394	100%	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	138636	138636	100%	Jumlah balita 0–59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah balita 0–59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	303126	303126	100%	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2023			Keterangan
				Pembilan g	Penyebut	Nilai	
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	1591286	1591286	100%	Jumlah pengunjung usia 15 tahun keatas mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	229815	229815	100%	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	578866	578866	100%	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	83675	83675	100%%	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah penyandang DM berdasarkan angka revalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2023			Keterangan
				Pembilan g	Penyebut	Nilai	
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	4939	4939	100%	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	43464	43464	100%	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	Dinas Kesehatan	40288	40288	100%	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama

5.2 Realisasi Anggaran

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO		7,288,983,731	6,710,358,460	92.06 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		7,288,983,731	6,710,358,460	92.06 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237	7,288,983,731	6,710,358,460	92.06 %
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	1,984,358,489	1,768,245,481	89.11 %
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	22,680,000	22,680,000	100.00 %
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	20,516,000	19,516,000	95.13 %
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	144,725,278	118,073,150	81.58 %



		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<u>397,912,500</u>	<u>361,602,500</u>	90.87 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	<u>195,325,000</u>	<u>169,707,500</u>	86.88 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	<u>614,583,500</u>	<u>521,285,000</u>	84.82 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	<u>11,550,000</u>	<u>10,830,000</u>	93.77 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	<u>2,250,255,000</u>	<u>2,250,164,160</u>	100.00 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	<u>158,675,000</u>	<u>129,519,750</u>	81.63 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<u>498,887,715</u>	<u>459,374,125</u>	92.08 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<u>989,515,247</u>	<u>879,360,792</u>	88.87 %

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan Langkah Langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Permasalahan yang adadalampelaksanaan SPM di Bidang Kesehatan antarlain :

a. Dalam Proses Penngumpulan data :

Sumber data dari :

- a. Menggunakan data proyeksi yang telah dihitung oleh BPS dan diolah oleh Pusdatin Kemenkes RI)
- d. Data Riil yang di yakini benar

b. Dalam Proses Penghitungan Kebutuhan :

Penghitungan kebutuhan disesuaikan dengan data sasaran

Solusi yang akan dilaksanakan :

1. Meningkatkan kunjungan rumah kepada lansia dengan kemandirian C sesuai dengan pendataan yang telah dilaksanakan
2. Meningkatkan kerja sama dengan jejaring dengan memberikan format laporan kunjungan lansia untuk diisi setiap bulan dan dilaporkan kepuskesmas
3. Pada saat pelayanan posyandu dilakukan sosialisasi/Ojt tentang ceklis Pengkajian paripurna Pasien Geriatri (P3G) pada kader



C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pendidikan Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	PelayananDasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	100%	2023
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	2023

3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan danpencapaian SPM oleh pemerintahn daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara lain:



No	MATA ANGGARAN		BESARAN ANGGARAN
	KAB. SIDOARJO		126,524,557,543
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		124,140,521,422
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638		124,140,521,422
	1	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	3,700,000,000
	2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	3,232,808
	3	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	118,114,181,862
	4	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	572,872,477
	5	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	1,750,234,275
	JUMLAH INDIKATOR		124,140,521,422
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		2,384,036,121
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023639		2,384,036,121
	1	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	1,142,780,000
	2	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	71,190,000
	3	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1,170,066,121

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Dukungan Personil	KET
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	7 PNS dan 5NON PNS	P2CKTR
		656 NON PNS	PDAM



2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	9 PNS dan 22 NON PNS	P2CKTR
---	---	----------------------	--------

5. Hasil Capaian

Hasil Caiapan adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

5.1 Realisasi Penerapan

No	PelayananDa sar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggun g Jawab	Realisasi 2023			Keterangan
				Penyebut	Pembilan g	Nilai	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari - hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok Pokok air minum sehari - hari	PDAM Sidoarjo dan P2CKTR	209.418	209.418	100 %	Jumlah Rumah Warga yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari- hari Seluruh Rumah warga kabupaten
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Dinas Pekerjaan Umum, Bina marga, dan Sumber Daya Air	3.390	3.390	100 %	Jumlah Rumah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic Seluruh Rumah warga kabupaten

5.2 Realisasi Anggaran

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO		126,524,557,543	115,302,054,417	91.13 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		124,140,521,422	112,976,416,855	91.01 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638	124,140,521,422	112,976,416,855	91.01 %
	1	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	3,700,000,000	3,226,695,561	87.21 %
	2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	3,232,808	3,232,808	100.00 %



		3	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	<u>118,114,181,862</u>	<u>107,897,927,161</u>	91.35 %
		4	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	<u>572,872,477</u>	<u>98,327,050</u>	17.16 %
		5	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	<u>1,750,234,275</u>	<u>1,750,234,275</u>	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR			124,140,521,422	112,976,416,855	91.01 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			2,384,036,121	2,325,637,562	97.55 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023639		2,384,036,121	2,325,637,562	97.55 %
		1	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	<u>1,142,780,000</u>	<u>1,142,780,000</u>	100.00 %
		2	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	<u>71,190,000</u>	<u>30,590,000</u>	42.97 %
		3	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	<u>1,170,066,121</u>	<u>1,152,267,562</u>	98.48 %

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah - langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum antara lain :

1. Tingkat cakupan dan pertumbuhan pelanggan baru PDAM yang rendah dan tingkat konsumsi air PDAM yang rendah, kualitas air baku PDAM pada wilayah tertentu kualitasnya kurang baik.

Berikut adalah rincian dari :

- a. Rumah yang terfasilitasi Jaringan Perpipaan : 186.150 SR
(SPAM dan PDAM)
 - b. Rumah yang menggunakan jaringan Non Perpipaan : 458.600 SR
(Menggunakan akses sumur, air curah, air hujan dll)
2. Jumlah rumah/bangunan (KK) yang mendapatkan pelayanan pengolahan lumpur tinja di IPLT masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah/bangunan (KK) di Sidoarjo. Hal ini karena kapasitas IPLT, jumlah SDM dan jumlah sarana pengangkutan yang dimiliki UPTD PALD masih belum mencukupi. Selain hambatan tersebut juga dikarenakan kesadaran masyarakat sendiri masih rendah tentang manfaat layanan penyedotan limbah domestic untuk diolah di IPLT. Oleh karena itu target peningkatan pelayanan disesuaikan dengan kapasitas maksimum IPLT. Dan pada tahun 2021, jumlah rumah/bangunan yang



mendapatkan pelayanan sudah memenuhi target yang ditetapkan. Berikut adalah rincian pelayanan Pengolahan Limbah Domestik di Sidoarjo :

- a. Akses Layak = 608.921 Rumah
- b. Akses Aman SPALD-S = 16.756 Rumah
- c. Akses Aman SPALD-T = 1.791 Rumah
- d. Menggunakan sarana Swasta = 17. 282 Rumah

Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- 1. Pengumpulan Data
 - a. Data layanan SPAM Pedesaan belum terdata dalam RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum).
 - b. Data Lokasi Prioritas Layanan SPALD-S/ SPALD-T belum terdata dalam SSK (Strategi Sanitasi Kota).
- 2. Penghitugan Kebutuhan
 - a. Area layanan dalam RISPAM dan SSK belum terinci.
- 3. Perencanaan dan Anggaran
 - a. Pagu anggaran belum sesuai dengan kebutuhan layanan, karena pagu bersifat dinamis.
- 4. Pelaksanaan
 - a. Layanan air bersih dan sanitasi dari pemerintah murni yang terbangun belum memenuhi target SPM adapun masih banyak yang di bantu oleh pelayanan Swasta.

D. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2023
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	2023

3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara lain:

No	MATA ANGGARANG		TARGET
	KAB. SIDOARJO		2,864,725,000
1	Program Pengembangan Perumahan		400,000,000
	1	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348	400,000,000
2	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		2,464,725,000



4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	43 PNS, 29 PPPK, 175 TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	0

5. Hasil Capaian

Hasil Capaian adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

5.1 Realisasi Penerapan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2023			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	DP2CKTR	163	163	100%	Jumlah Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni JumlahWarga Kabupaten korban bencana yang rumahnya tidak layak huni karena bencana
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Persentase (%) Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	DP2CKTR	0	0	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten



5.2 Realisasi Anggaran

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO		126,524,557,543	115,302,054,417	91.13 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		124,140,521,422	112,976,416,855	91.01 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638	124,140,521,422	112,976,416,855	91.01 %
	1	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	3,700,000,000	3,226,695,561	87.21 %
	2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	3,232,808	3,232,808	100.00 %
	3	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	118,114,181,862	107,897,927,161	91.35 %
	4	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	572,872,477	98,327,050	17.16 %
	5	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	1,750,234,275	1,750,234,275	100.00 %
	JUMLAH INDIKATOR		124,140,521,422	112,976,416,855	91.01 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		2,384,036,121	2,325,637,562	97.55 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023639	2,384,036,121	2,325,637,562	97.55 %
	1	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	1,142,780,000	1,142,780,000	100.00 %
	2	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	71,190,000	30,590,000	42.97 %
	3	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1,170,066,121	1,152,267,562	98.48 %

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

1. Data rumah yang layak huni untuk korban bencana tidak dimiliki secara rinci sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak dapat dilakukan secara maksimal.



2. Data rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah tidak dimiliki secara lengkap sehingga penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi tidak dapat dilakukan secara maksimal. (tidak ada atau tidak diinformasikan ke DP2CKTR Dokumen Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) di setiap proyek Relokasi untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pengalokasian anggarannya).

Adapun solusi yang diupayakan guna meningkatkan pelaksanaan SPM bidang Perumahan Rakyat antara lain :

1. Mencukupi/melengkapi data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antar OPD;
2. Memasukan data dasar rumah yang layak huni untuk korban bencana dan rumah masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah yang diperlukan agar lebih lengkap dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

E. Bidang Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentangperubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standarpelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
----	--



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
2	Pelayanan Informasi rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	2023
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2023
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2023
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2023
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	2023



3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara lain:

No	MATA ANGGARAN		TARGET
	KAB. SIDOARJO		21,959,287,117
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)		12,199,401,198
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444	10,691,333,139
		1 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	1,380,778,800
		2 Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	7,438,658,450
		3 Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	585,631,089
		4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	125,620,560
		5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	417,394,240
		6 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	743,250,000
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455	1,388,768,859
		1 Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	500,000,000
		2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100,000,000
		3 Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	788,768,859
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457	119,299,200
		1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	119,299,200
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)		1,989,217,012



	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456	643,246,470
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	75,000,000
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	568,246,470
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K2023447	342,998,867
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	80,000,000
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	81,348,867
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	165,000,000
	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16,650,000
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445	270,000,000
	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	270,000,000
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446	732,971,675
	1	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	732,971,675
3		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	7,770,668,907
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449	7,516,679,256
	1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	520,000,000
	2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	57,500,000
	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	446,917,546
	4	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	6,492,261,710
	9	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459	253,989,651
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	177,102,832
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	76,886,819

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Kesehatan antara lain:



No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dukungan Personil
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	84 PNS, 240 NON PNS
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	43 PNS, 29 PPPK, 175 TENAGA HARIAN LEPAS (THL)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

5. Hasil Capaian

Hasil Caiapan adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

5.1 Realisasi Penerapan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2023			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Satuan Polisi Pamong Praja	303	303	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara Jumlah keseluruhan Warga Kabupaten yang terkena penegakan hokum Perda dan perkara
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layananan formasirawan bencana	Badan Penanggula ngan Bencana Daerah	2.091.930	2.091.930	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Kabupatendiwilay ah rawan bencana
3	Pelayanan pencegahan dan	Persentase (%) Warga Kabupaten	Badan Penanggula ngan Bencana	2.091.930	2.091.930	100%	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggun g Jawab	Realisasi 2023			Keterangan
				Pembilang	Penyebut	Nilai	
	kesiapsiagaan terhadap bencana	yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Daerah				pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Kabupatendiwilayah rawan bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulan g Bencana Daerah	69	69	100%	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang) Jumlah korban bencana skala kabupaten/kota yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (Orang)
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	Badan Penanggulan g Bencana Daerah	549	549	100%	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dampak kebakaran Jumlah kejadiankebakaran dengan menggunakan skala kabupaten/kota yang seharusnya diselamatkan dan dievakuasi menggunakan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamat lengkap (Orang)

5.2 Realisasi Anggaran

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO		21,959,287,117	21,220,037,005	96.63 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)		12,199,401,198	11,895,881,047	97.51 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444	10,691,333,139	10,561,509,955	98.79 %
	1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	1,380,778,800	1,364,189,328	98.80 %



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023**

	2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	7,438,658,450	7,357,000,450	98.90 %
	3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	585,631,089	585,000,250	99.89 %
	4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	125,620,560	96,750,927	77.02 %
	5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	417,394,240	416,319,000	99.74 %
	6	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	743,250,000	742,250,000	99.87 %
2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455	1,388,768,859	1,215,200,000	87.50 %
	1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	500,000,000	416,500,000	83.30 %
	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100,000,000	100,000,000	100.00 %
	3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	788,768,859	698,700,000	88.58 %
3		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457	119,299,200	119,171,092	99.89 %
	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	119,299,200	119,171,092	99.89 %
2		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	1,989,217,012	1,761,466,949	88.55 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456	643,246,470	597,448,195	92.88 %
	1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	75,000,000	73,445,925	97.93 %
	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	568,246,470	524,002,270	92.21 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K2023447	342,998,867	330,010,904	96.21 %
	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	80,000,000	77,783,250	97.23 %
	2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	81,348,867	77,105,000	94.78 %
	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	165,000,000	158,568,154	96.10 %



	4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	16,650,000	16,554,500	99.43 %
6		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445	270,000,000	270,000,000	100.00 %
	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	270,000,000	270,000,000	100.00 %
7		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446	732,971,675	564,007,850	76.95 %
	1	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	732,971,675	564,007,850	76.95 %
3		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	7,770,668,907	7,562,689,009	97.32 %
8		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449	7,516,679,256	7,370,134,609	98.05 %
	1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	520,000,000	515,727,515	99.18 %
	2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	57,500,000	54,983,630	95.62 %
	3	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	446,917,546	380,499,488	85.14 %
	4	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	6,492,261,710	6,418,923,976	98.87 %
9		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459	253,989,651	192,554,400	75.81 %
	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	177,102,832	125,829,900	71.05 %
	2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	76,886,819	66,724,500	86.78 %

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam bidang urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :

a. Penegakan perda dan perkara

Banyak peraturan perda perkara yang belum ditegakkan dengan baik sehingga dirasa perlu untuk melakukan kegiatan mulai penyuluhan, pembinaan maupun penegakan hukum. Kasus dominan terkait dengan penegakan perda adalah pelanggaran izin



- b. KRB Belum detail mendeskripsikan kejadian rawan bencana tiap desa atau kelurahan, sehingga belum bisa dihitung secara detail kebutuhan barang dan biaya untuk pengantasan bencana baik di pra bencana maupun pasca bencana.
- c. Pola Layanan dan kesiapsiagaan bencana selama ini belum maksimal karena selalu mengandalkan tatap muka yang diundang oleh BPBD Kabupaten.
- d. Untuk mencapai target SPM 15 menit, Kabupaten Sidoarjo harus memiliki 36 Pos Damkar, sedangkan kondisi eksisting hanya memiliki 5 Pos Damkar, sehingga rasio antara sumber daya dengan target kinerja sangat jauh. Selain itu belum terbentuknya relawan kebakaran dan Satuan Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di desa/kelurahan juga menjadi salah satu faktor belum terpenuhinya target respon time. Penanganan kebakaran di Kabupaten Sidoarjo sementara masih mengandalkan aparatur dan sarana prasarana dr BPBD, sementara itu dengan jumlah kejadian kebakaran yang meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 menyebabkan rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran menurun.

Adapun solusi yang kami upayakan antara lain :

- a. Dokumen Teknis dari KRB agar disahkan dalam PERBUP atau SK Bupati, agar mudah di Reviu tiap tahun (KRB Per Desa/Kelurahan)
- b. Reviu Bencana tiap tahun hendaknya melibatkan dari pihak Desa dan Kecamatan dengan Hasil Reviu berbasis peta citra.
- c. Dokumen Teknis KRB (KRB perdesa kelurahan) harus detail menyajikan area yang rawan bencana per Desa/Kelurahan sehingga bisa dihitung perencanaan kebutuhan barang dan biaya penanganan Bencana (Pra dan Pasca) lebih detail.
- d. Posting/alokasi anggaran dan barang diserahkan kepada OPD masing2 yang menangani dibawah koordinasi BPBD seperti Dinsos, Dinkes, DP2CKTR.
- e. Membuat Group WA berjenjang mulai dari tingkat kabupaten dan kecamatan, WA group Desa dan WA Group RT.



- f. BPBD Menyiapkan materi layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana seperti mitigasi bencana dan bagaimana penanganann bencana (Pra dan Pasca) Berupa video animasi dan paparan.
- g. Mengadakan pelatihan perwakilan dari satgas bencana tiap desa/kelurahan yang dibagi perkecamatan.

F. Bidang Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Sosial Antara Lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang	100%	2023



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	diluar Panti	memperoleh Rehabilitasi social diluar panti		
2	Rehabilitasi sosial dasaranak telantar diluar Panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2023
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlanter yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2023
4	Rehabilitasi sosial dasartuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	100%	2023
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	100%	2023

3. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara lain:

No	MATA ANGGARAN		ANGGARAN
	KAB. SIDOARJO		8,312,813,555
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		8,312,813,555
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152	8,256,813,555
	1	Penyediaan permakanan	7,048,825,600
	2	Penyediaan sandang	14,459,322
	3	Penyediaan alat bantu	100,815,000



		4	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	191,075,000
		5	Pemberian layanan data dan pengaduan	121,595,538
		6	Pemberian layanan kedaruratan	780,043,095
	JUMLAH INDIKATOR			8,256,813,555
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153		56,000,000
		1	Penyediaan makanan	48,000,000
		2	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	8,000,000

4. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain :

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Dukungan Personil
1	Rehabilitasi social dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	27PNS 31 NON PNS 140 SLRT 18 TKSK 50 TAGANA 125 PKH
2	Rehabilitasi social dasar anak telantar diluar Panti	
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	
6.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial	

5. Hasil Capaian

Hasil Capaian adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.



5.1 Realisasi Penerapan

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD/ Lembaga Penanggu ng Jawab	Realisasi 2023			Keterangan
				Penyebut	Pembilang	Nilai	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas telantar diluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti	Dinas Sosia	3871	3871	100%	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi social diluar panti Jumlah keseluruhan warga kabupaten penyandang disabilitas diluar panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar Panti	Persentase (%) anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosia	1485	1485	100%	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Jumlah keseluruhan anak telantardiluar panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten lanjut usiatelantar yangmemperole h Rehabilitasi sosial diluar panti	Dinas Sosial	65068	65068	100%	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlanter yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti JumlahWarga Kabupaten lanjut usia terlanter diluar panti
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Persentase (%) Warga Kabupaten yang gelandangan danpengemisyangmemperoleh ehabilitasisocial dasartuna social diluar panti	Dinas Sosial	80	80	100 %	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social diluar panti Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis diluar panti
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Presentase (%) korban bencana skalakabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat& pasca	Dinas Sosial	3424	3424	100 %	Jumlah korban bencana yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat (KK) dan pasca

5.2 Realisasi Anggaran

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET	REALISASI	SERAPAN
	KAB. SIDOARJO		8,312,813,555	7,975,654,143	95.94 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		8,312,813,555	7,975,654,143	95.94 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152	8,256,813,555	7,922,481,643	95.95 %
	1	Penyediaan permakanaan	7,048,825,600	6,755,854,600	95.84 %
	2	Penyediaan sandang	14,459,322	14,444,400	99.90 %
	3	Penyediaan alat bantu	100,815,000	100,738,750	99.92 %



	4	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	191,075,000	186,861,250	97.79 %
	5	Pemberian layanan data dan pengaduan	121,595,538	84,754,994	69.70 %
	6	Pemberian layanan kedaruratan	780,043,095	779,827,649	99.97 %
	JUMLAH INDIKATOR		8,256,813,555	7,922,481,643	95.95 %
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153		56,000,000	53,172,500	94.95 %
	1	Penyediaan makanan	48,000,000	47,722,500	99.42 %
	2	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	8,000,000	5,450,000	68.13 %

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial antara lain :

Target yang dilayani pada SPM bencana disesuaikan dengan bantuan yang tersalurkan sampai dengan 31 Desember 2023 sehingga menjadi capaian 100% karena sifatnya yang insidental, dan sampai dengan selesainya tahun anggaran 2023 tercatat masih terdapat persediaan sembako (anggaran DPA Dinsos sebanyak 1072 sembako) untuk bencana yang akan disalurkan apabila terjadi bencana dan terdapat laporan atau permintaan yang diterima.



BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 kami sampaikan. Kegiatan Penyusunan Capaian LPPD Tahun 2023. Evaluasi penerapan LPPD dalam rangka menginterpretasikan peraturan terkait didalam LPPD telah dijalankan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) secara konsisten dan efektif.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dapat dipakai sebagai salah satu dasar dalam penetapan pembangunan pemerintah daerah sehingga program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memenuhi pelayanan dasar masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.



DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2023	3
Suhu dan Kelembapan per Bulan di Tahun 2023	5
Kecepatan Angin dan Tekanan Udara per Bulan di Tahun 2023	5
Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan, dan Penyinaran Matahari per Bulan di Tahun 2023	5
Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2023	6
Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	8
Desa dan Kelurahan per Kecamatan	9
Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah	10
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dari Tahun 2020-2023	24
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	24
Pendapatan Asli Daerah	25
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	27
Pokok-Pokok Visi Kabupaten Sidoarjo	56
Keterkaitan Visi dengan Misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	58
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026	61
Jenis Pelayanan Dasar urusan Pendidikan	71
Target Pencapaian SPM urusan Pendidikan	72
Jenis Pelayanan Dasar urusan Kesehatan	72
Target Pencapaian SPM urusan Kesehatan	73
Jenis Pelayanan Dasar urusan Pekerjaan Umum	74
Target Pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum	75
Jenis Pelayanan Dasar urusan Perumahan Rakyat	75
Target Pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat	76
Jenis Pelayanan Dasar urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	76
Target Pencapaian SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	77
Jenis Pelayanan Dasar urusan Sosial	78
Target Pencapaian SPM urusan Sosial	78

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Capaian Kinerja Makro	80
Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo	82
Capaian TPT Kabupaten Sidoarjo Terhadap Nasional dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2023	84
II.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	87
1 Urusan Pendidikan	87
2 Urusan Kesehatan	99
3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106
4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	116



	5	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	122
	6	Urusan Sosial	129
	7	Urusan Tenaga kerja	133
	8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	143
	9	Urusan Pangan	153
	10	Urusan Pertanahan	155
	11	Urusan Lingkungan Hidup	157
	12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	162
	13	Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	163
	14	Urusan Perhubungan	165
	15	Urusan Komunikasi dan Informatika	167
	16	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	173
	17	Urusan Penanaman Modal	179
	18	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	183
	19	Urusan Statistik	184
	20	Urusan Persandian	185
	21	Urusan Kebudayaan	187
	22	Urusan Perpustakaan	192
	23	Urusan Kearsipan	193
	24	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	196
	25	Urusan Kelautan & Perikanan	197
	26	Urusan Pariwisata	198
	27	Urusan Pertanian	199
	28	Urusan Kehutanan	200
	29	Urusan Energi dan Sumber daya mineral	200
	30	Urusan Perdagangan	201
	31	Urusan Perindustrian	203
	32	Urusan Transmigrasi	204
II.2.2		Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	204
	1	Urusan Pendidikan	204
	2	Urusan Kesehatan	205
	3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	206
	4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	207
	5	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	208
	6	Urusan Sosial	209
	7	Urusan Tenaga kerja	210
	8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	210
	9	Urusan Pangan	211
	10	Urusan Pertanahan	211
	11	Urusan Lingkungan Hidup	211
	12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	212
	13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa	212
	14	Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	213
	15	Urusan Perhubungan	213
	16	Urusan Komunikasi dan Informatika	213
	17	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	214
	18	Urusan Penanaman Modal	214



	19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	214
	20	Urusan Statistik	215
	21	Urusan Persandian	215
	22	Urusan Kebudayaan	215
	23	Urusan Perpustakaan	215
	24	Urusan Kearsipan	216
	25	Urusan Kelautan dan Perikanan	216
	26	Urusan Pariwisata	216
	27	Urusan Pertanian	217
	28	Urusan Kehutanan	217
	29	Urusan Energi dan Sumber daya mineral	217
	30	Urusan Perdagangan	217
	31	Urusan Perindustrian	218
	32	Urusan Transmigrasi	219
II.2.3		Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah	219
	1	Urusan Pemerintahan(Perencanaan & Keuangan)	219
	2	Urusan Pemerintahan(Pengadaan)	220
	3	Urusan Pemerintahan(Kepegawaian)	221
	4	Urusan Pemerintahan(Manajemen Keuangan)	221
	5	Urusan Pemerintahan(Transparansi & Partisipasi Publik)	222
II.3		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	224
		Hasil Pengukuran Kinerja	224
		Indikator Kinerja Utama (IKU)	229
		Indikator Kinerja Daerah (IKD)	230
		Perolehan Nilai RB Tahun 2023	235
		Indikator Kinerja Sasaran I	238
		Capaian Nilai SAKIP Tahun 2023	238
		Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD	239
		Perolehan Nilai Opini BPK	241
		Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD	241
		Capaian Opini BPK Tahun 2020-2023	242
		Perolehan Nilai Survei Eksternal Persepsi Korupsi	243
		Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD	243
		Perolehan Hasil LPPD	244
		Perolehan Hasil LPPD 2020-2023	245
		Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD	245
		Nilai Indeks SPBE 2023	247
		Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD	247
		Nilai Indeks Inovasi Daerah 2023	249
		Perbandingan Realisasi IID 2023 dengan Target Akhir RPJMD	250
		Realisasi SPIP Tahun 2023	251
		Nilai SPIP 2021-2023	251
		Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD	252
		Indikator Kinerja Sasaran II	253
		Rekap Hasil Penilaian Pelayanan Publik Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023	254
		Realisasi IPP Tahun 2023	255
		Perbandingan dengan Target Akhir RPJMD	255



Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	256
--	-----

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A.	Bidang Urusan Pendidikan	
	Jenis Pelayanan Dasar	268
	Target Pencapaian SPM Oleh daerah	268
	Anggaran	269
	Dukungan Personil	270
	Hasil Capaian	270
	Realisasi Anggaran	271
B.	Bidang Urusan Kesehatan	
	Jenis Pelayanan Dasar	275
	Target Pencapaian SPM Oleh daerah	275
	Anggaran	277
	Dukungan Personil	278
	Realisasi Anggaran	281
C.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	
	Jenis Pelayanan Dasar	283
	Target Pencapaian SPM Oleh daerah	283
	Anggaran	284
	Dukungan Personil	284
	Hasil Capaian	285
	Realisasi Anggaran	285
D.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	
	Jenis Pelayanan Dasar	287
	Target Pencapaian SPM Oleh daerah	288
	Anggaran	288
	Dukungan Personil	289
	Hasil Capaian	289
	Realisasi Anggaran	290
E.	Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
	Jenis Pelayanan Dasar	291
	Target Pencapaian SPM Oleh daerah	292
	Anggaran	293
	Dukungan Personil	295
	Realisasi Penerapan	295
	Realisasi Anggaran	296
F.	Bidang Urusan Sosial	
	Jenis Pelayanan Dasar	300
	Target Pencapaian SPM Oleh daerah	300
	Anggaran	301
	Dukungan Personil	302
	Realisasi Penerapan	303
	Realisasi Anggaran	303



DAFTAR GRAFIK

BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo	6
Perkembangan Pendapatan Kabupaten Sidoarjo	24
Perkembangan Belanja Kabupaten Sidoarjo	27

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sidoarjo	81
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2023	235
Perbandingan Realisasi RB dengan Target RPJMD	236
Perkembangan Nilai SAKIP 2020-2023	239
Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD	240
Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD	242
Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD	243
Tren Capaian Kapabilitas APIP 2020-2023	244
Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD	245
Tren Nilai Indeks SPBE	247
LHE SPBE KemenPANRB	248
Kenaikan IID Tahun 2021-2023	249
Inovasi Terlapor	249
Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD	250
Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target RPJMD	252
Tren IPP Tahun 2019-2023	255